

CAVR UPDATE / Dec 2003 – Jan 2004

DAFTAR ISI

1. Dengar Pendapat Umum tentang Konflik Politik internal
2. Tinjauan Umum Program
3. Dukungan bagi korban
4. Rekonsiliasi Komunitas
5. Penggalian Kebenaran
6. Dokumentasi dan Pengarsipan
7. Keuangan
8. Kunjungan dan Pengunjung

Lampiran 1: Laporan Keuangan Triwulan, Oktober-Desember 2003
Lampiran 2: Laporan Dengar Pendapat Umum tentang Konflik Politik Internal, 15-18 Desember 2003

Komisi Penerimaan, Kebenaran dan Rekonsiliasi di Timor Leste (CAVR – singkatan dalam bahasa Portugis) adalah lembaga nasional yang bersifat independen. Komisi ini mendapatkan mandat untuk melakukan penggalian kebenaran, memfasilitasi rekonsiliasi komunitas, menyampaikan laporan tentang pekerjaan dan penemuannya, dan memberi rekomendasi untuk tindak lanjut. Untuk informasi lebih lanjut, kunjungi situs web CAVR di www.easttimor-reconciliation.org

Comissao de Acolhimento, Verdade e Reconciliacao de Timor-Leste (CAVR)
PO Box 144, Dili, Timor-Leste
Mobile 723 0699

Email: info@easttimor-reconciliation.org
Website: www.easttimor-reconciliation.org

CAVR UPDATE / Dec 2003 – Jan 2004

‘Pemaafan dalam konteks politikmerupakan tindakan yang memadukan kebenaran moral, kesabaran, empati, dan komitmen untuk memperbaiki suatu hubungan manusia yang terputus. Kombinasi seperti itu menuntut sebuah pembalikan secara kolektif dari masa lalu, yang tidak mengabaikan kejahatan maupun masa lalu ataupun memaafkannya, tidak melupakan keadilan ataupun merendharkannya menjadi dendam, tetapi yang menuntut rasa kemanusiaan dari para seteru, bahkan dalam melakukan tidakannya yang merendahkan martabat manusia, dan yang menghargai keadilan yang menegakkan kembali masyarakat politik di atas keadilan yang menghancurkannya’.

Donald Shriver, ‘An Ethic for Enemies: Forgiveness in Politics’, 1995

Laporan perkembangan ini memuat kegiatan CAVR selama bulan Desember 2003 dan Januari 2004, dan memberi perhatian khusus kepada dengar pendapat publik bersejarah tentang konflik politik internal, yang diyakini oleh pangamat merupakan sesuatu yang unik dalam sejarah singkat komisi-komisi kebenaran.

Laporan kami tentang dengar pendapat ini lebih panjang dari laporan serupa yang ditulis sebelumnya. Hal ini untuk memuaskan ketertarikan publik yang sangat besar terhadap apa yang disampaikan dalam dengar pendapat oleh mereka yang bersaksi, termasuk para pemimpin politik Timor Leste yang, dalam kata-kata mantan wartawan Portugis, Adelino Gomes, memberi dunia ‘pelajaran tentang kemanusiaan’.

Laporan perkembangan ini juga memuat laporan keuangan triwulan CAVR untuk periode ini. Masa pelaporan juga mencakup masa Natal. CAVR ditutup selama dua minggu, untuk memberi waktu istirahat yang sangat pantas diperoleh para staff kami yang mengagumkan dan agar mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan keluarga dan teman mereka, yang tidak dimungkinkan oleh kesibukan sehari-kari di CAVR.

1. Dengar Pendapat tentang konflik politik internal

CAVR menutup tahun 2003 dengan sebuah dengar pendapat yang menyentuh secara mendalam, yang, seperti dengar pendapat terdahulu, dilakukan di tempat pertemuan terbuka CAVR (tempat olahraga para narapidana di Comarca lama atau penjara yang merupakan kantor nasional CAVR). Dengar pendapat yang dilaksanakan selama 4 hari, 15-18 Desember, disiarkan secara langsung melalui televisi dan radio nasional, serta dihadiri oleh banyak sekali pengunjung. Tema dari dengar pendapat tersebut adalah ‘Konflik Politik Internal 1974-1976’ dan berkaitan dengan rusaknya hubungan antara partai-partai politik Timor Leste dan kekerasan yang menyusulnya serta pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia (HAM) akibat dari kekerasan tersebut, yang terjadi selama periode antara keputusan Portugis untuk melakukan dekolonisasi sampai intervensi Indonesia pada akhir tahun 1975. Perhatian utama dari dengar pendapat tersebut adalah perang saudara menyakitkan pada tahun 1975 yang mengakibatkan meninggalnya ratusan orang, yang telah

memecah banyak keluarga dan masyarakat hingga sekarang, dan yang digunakan oleh Indonesia untuk membenarkan invasi.

Dengar Pendapat yang difasilitasi oleh 7 orang Komisaris Nasional CAVR tersebut dibuka oleh Uskup Basilio do Nascimento, yang menekankan pada rekonsiliasi internal, dan mendengarkan penuturan hidup dari enam orang korban yang menceritakan pengalaman mereka atau mengakui adanya kekerasan yang dilakukan baik oleh anggota-anggota UDT maupun Fretilin. Facilitated by CAVR's seven Timor Lesteese National Commissioners, the Dengar Pendapat was opened by Uskup Basilio do Nascimento, who emphasised internal personal reconciliation, dan heard vivid accounts by six korban of their experience or knowledge of violations committed by members of both UDT dan Fretilin. Orang-orang penting Timor Leste juga bersaksi dalam kapasitas pribadi mereka. Mereka termasuk Presiden Xanana Gusmão, Perdana Menteri Mari Alkatiri, Menteri Luar Negeri dan Pemenang Hadiah Nobel Perdamaian José Ramos Horta, Menteri Dalam Negeri Rogerio Lobato, Xavier do Amaral, Wakil Ketua Parlemen dan Presiden pada waktu itu, Domingos de Oliveira (Sekretaris Jendral UDT pada waktu itu dan Mario Carrascalão, seorang pemimpin UDT pada waktu itu dan sekarang Presiden PSD. Kelima pemimpin dari partai-partai bersejarah Timor Leste itu juga bersaksi mewakili partai mereka: Francisco Lu'Olo Guterres (Fretilin), Joao Carrascalão (UDT), Clementino dos Reis Amaral (Kota Deputy President), Paulo Freitas (Trabalhista) dan Frederico Almeida Santos (Apodeti Pro-Referendum). Undangan untuk bersaksi juga disampaikan kepada para bekas pemimpin Apodeti yang saat ini berdiam di Indonesia, tetapi ditolak.

Mayor-Jendral Mario Lemos Pires, Gubernur Portugis terakhir di Timor Leste, memberikan kesaksiannya lewat video. Komisaris Nasional CAVR, Jacinto Alves dan penasehat Peneliti, Dr Aki Matsuno, berkunjung ke Portugal untuk melakukan wawancara tersebut. Dengar pendapat tersebut juga mendengarkan kesaksian dari Jusuf Wanandi yang pada tahun 1975 aktif di Centre for Strategic dan International Studies (CSIS) berbasis di Jakarta, yang bekerja secara dekat dengan kalangan intelijen Indonesia dan memainkan peranan penting dalam Operasi Komodo, kampanye pengambilalihan tersebut Indonesia. Bapak Wanandi tidak dapat menghadirinya, tetapi kesaksiannya dibacakan dalam dengar pendapat. Kesaksian ahli independen disampaikan oleh pembela HAM yang sangat dihormati Mr. James Dunn, bekas konsul Australia untu Timor Leste. Bapak Dunn mengunjungi Timor Leste antara 1974 dan 1976 dan merupakan penulis buku '*Timor Leste: A Rough Passage to Kemerdekaan*' (2003).

Untuk membantu kalangan pemuda Timor Leste mendapatkan pemahaman lebih lanjut tentang periode yang lama tetapi masih relevan ini, CAVR mengadakan pameran 30 foto bersejarah dari periode tersebut selama dengar pendapat. Pameran yang hanya diberi judul '1975' tersebut dibuka oleh Dr Jose Ramos Horta, yang nampak dalam tampang yang lebih langsing dalam beberapa foto, pada malam kedua dari dengar pendapat tersebut. Foto-foto tersebut merupakan hasil kerja dari fotografer Inggris Penny Tweedie, yang mengunjungi Timor dalam bulan September 1975, dan dibeli oleh CAVR dengan dukungan dari USAID. CAVR merasa bangga telah memulangkan foto-foto ini ke Timor Leste untuk generasi mendatang. Pada malam yang sama, CAVR juga menayangkan dua film. Salah satunya terdiri dari video langka yang diambil oleh Clive Scollay dari Australia di Timor Leste pada bulan September 1975, menyusul memuncaknya perang saudara. CAVR membeli film

tersebut dari arsip film nasional Australia di Canberra. Seperti foto-foto Penny Tweedie's, film-film ini tidak pernah dilihat di Timor Leste. CAVR juga merasa terhormat untuk mengundang wartawan Portugis, Adelino Gomes, untuk membuka sebuah film yang menunjukkan perjalanan jauhnya dari perbatasan ke Dili sesudah mengambil gambar dari kegiatan tentara Indonesia dalam wilayah Timor Leste pada bulan Oktober-November 1975. Bukti visual independen Gomes bahwa Indonesia telah melanggar batas wilayah Timor Leste/Portugis jauh sebelum invasi penuh terjadi diabaikan secara internasional, dengan bayaran mahal oleh rakyat Timor Leste.

Dengar pendapat tersebut diterima dengan sangat baik. Di Timor-Leste, banyak umpan balik positif diterima di jalan-jalan. Sambutan dari para pengamat internasional juga positif. Dalam sebuah komentar yang diterbitkan sesudah dengar pendapat tersebut, James Dunn menulis: 'Sesi empat hari tersebut merupakan gerakan berani dari Komisi, suatu dengar pendapat yang sangat bergantung pada keikutsertaan para pelaku utama dalam drama 1975, dan kesediaan mereka untuk terbuka, jujur dan berdamai. Dengar pendapat tersebut mudah saja menuju ke arah yang salah... (tetapi) berakhir dengan pertunjukan rekonsiliasi yang luar biasa, hasil yang jauh melampaui harapan. Dengar pendapat tersebut merupakan pencapaian yang berarti bagi rakyat Timor Leste, sebuah hadiah Natal yang berlimpah yang diberikan oleh para pemimpin negara tersebut kepada rakyat mereka'.

Berbicara dalam sebuah pertemuan di Lisbon sebulan sesudah dengar pendapat tersebut, wartawan veteran Portugis, Adelino Gomes, seorang wartawan senior yang bekerja pada 'Publico', menatakan bahwa dengar pendapat tersebut merupakan titik terpenting, dalam bahasa manusia, yang pernah saya saksikan dalam sejarah Timor-Leste'. Beliau melanjutkan dengan memuji rakyat Timor Leste yang telah memberi dunia 'sebuah pelajaran tentang kemanusiaan'.

Cerita yang lebih lengkap tentang Dengar Pendapat tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2 dalam Laporan Perkembangan ini. Untuk mendapatkan salinan lengkap dari refleksi Adelino Gomes, berjudul 'sebuah pelajaran tentang kemanusiaan', silahkan kunjungi situs web CAVR.

2. Tinjauan Umum Program

CAVR pertemuan sehari untuk evaluasi dan perencanaan pada 12 Desember untuk meninjau kembali pencapaian-pencapaian hingga sekarang dan merencanakan pekerjaan akhir untuk tiga bulan mendatang, Januari-Maret 2004. Para pesertanya adalah Komisariss-komisaris Nasional, Komisariss-komisaris Regional dan para staff senior. Selama tiga bulan terakhir ini, Tim Distrik di 13 distrik, yang didukung oleh staf National, akan melengkapi tugas-tugas berikut:

- Pengambilan pernyataan yang terarah (misalnya menyoar perempuan atau wilayah tertentu yang belum dicakup secara memadai);
- Identifikasi lebih lanjut, dukungan dan perijukan korban dengan kebutuhan mendesak (sekitar 300 orang);
- Sebuah survey kematian retrospektif (melibatkan wawancara dengan 2000 rumah tangga) dan pencacahan makam (menghitung semua makam di semua pemakaman umum di Timor-Leste);
- Penelitian tematik; dan

- Semua dengar pendapat untuk rekonsiliasi komunitas yang belum terlaksana (sekitar 670 saksi).

Menjelang akhir Maret, semua Tim Distrik juga akan mengadakan pertemuan untuk melaporkan kembali dan menerima masukan kembali dari anggota dan pemuka masyarakat tentang pekerjaan CAVR hingga sekarang. Sebuah lomba lukis untuk anak-anak tentang tema HAM akan dilaksanakan di 13 distrik sebagai bagian dari sebuah kampanye untuk mempromosikan HAM dan pekerjaan CAVR. Dua dengar pendapat nasional dijadwalkan untuk periode ini: satu tentang komunitas internasional dan hak penenbapak nasib sendiri, pada 15-16 Maret, dan yang lain mengenai anak-anak dalam konflik, 29-30 Maret. Sebuah lokakarya evaluasi dan pelaporan kembali dengan staf Distrik dan para Komisaris Regional juga akan dilakukan akhir Maret.

Juga dalam bulan Desember, para Komisaris Nasional membentuk sebuah Kelompok Kerja untuk membuat kebijakan dan mekanisme-mekanisme penyusutan dan restrukturisasi CAVR sesudah penutupan kegiatan-kegiatan di tingkat Distrik pada akhir Maret. Sebuah tabel staf baru telah dibuat dan sebuah Panel Seleksi yang dibentuk dari para Komisaris Nasional dan Direktur Eksekutif akan mengawasi proses penyusutan dan restrukturisasi. Panel Seleksi ini telah memulai pekerjaannya menjelang akhir bulan Februari. Tabel staf yang baru menunjukkan bahwa CAVR disusutkan hingga 50% menjelang April 2004, yakni dari 280 staf menjadi 113 orang, dan menjadi 40 orang menjelang Agustus 2004.

Tujuan utama dari restrukturisasi CAVR adalah untuk memastikan produktivitas yang maksimum dalam penulisan Laporan Akhir dan kegiatan-kegiatan pendukungnya. Untuk tujuan tersebut, Tim Penulis dan Tim Pengolah Data yang ada sekarang akan digantikan oleh sejumlah Tim baru, seperti Tim Produksi, Tim Kampanye Rekomendasi dan Laporan Akhir, Tim Reparasi, dan Tim Comarca dan Pengarsipan. Sebuah Tim Teknis Editorial juga akan dibentuk untuk mengawasi semua aspek penulisan dan produksi Laporan Akhir.

3. Dukungan Korban

CAVR melakukan lokakarya penyembuhan ketiga untuk mereka yang selamat dari pelanggaran-pelanggaran HAM berat, 3 – 5 Desember dan yang keempat pada 27 – 29 Januari. Kedua lokakarya tersebut dilaksanakan di kantor nasional CAVR. Yang terdahulu melibatkan 13 laki-laki dan 6 perempuan dari 13 Distrik di Timor Leste. Yang terakhir dikhususkan untuk perempuan dan dihadiri oleh 25 peserta dari seluruh penjuru negeri.

Lokakarya-lokakarya ini dilakukan sebagaimana lokakarya-lokakarya sebelumnya. CAVR bekerjasama secara dekat dengan kelompok-kelompok dan organisasi-organisasi kunci masyarakat sipil yang terlibat dalam pekerjaan mendukung mereka yang selamat dari pelanggaran. Dana untuk kegiatan ini masih tetap disediakan oleh lembaga Belanda, HIVOS.

Fokupers menyediakan pendampingan kelompok sehari penuh yang berkualitas tinggi untuk kedua lokakarya tersebut, yang sangat dihargai oleh CAVR. Akomodasi disediakan oleh Gedung BPG (ex CNRT) untuk lokakarya pertama dan oleh Susteran Canossiana Balide untuk yang kedua. Keterlibatan Arte Moris' juga sangat dihargai karena mereka menyediakan bahan kepada para peserta lokakarya bulan

Desember untuk secara kreatif mengespresikan perasaan dan pengalaman mereka dan Gil Madeira memberikan kesempatan bagi eskpresi dan relaksasi melalui musik dengan gitar dan lagunya.

Sebagaimana lokakarya-lokakarya sebelumnya, prioritas diberikan bagi penciptaan lingkungan yang aman untuk berbagi cerita hidup dan menggali pengalaman masa lalu dan harapan untuk masa depan, dengan cara yang mendukung, terhormat dan menghargai.

Perasaan-perasaan, pengalaman-pengalaman, harapan-harapan dan rekomendasi-rekomendasi dari para korban direkam untuk masa depan dan sebagai dasar untuk laporan-laporan dan laporan-laporan di masa depan bagi lembaga-lembaga yang berkuasa.

Peserta pada lokakarya bulan Desember terdiri dari:

Mario Belo de Asis	Maliana
Mario Gonsalves	Maliana
Amelia da costa	Lautem
Jeremias dos Reis	Lautem
Olinda de araujo	Covalima
Lurdes do Espirito Santo	Manatuto
Adriano Pereira	Manatuto
Celsetina Guterres	Baucau
Alberto	Baucau
Cristovao Paixao	Dili
Carlos Bareto	Dili
Jeronimo	Dili
Martinho da Costa	Aileu
Joao baptista	Aileu
Antonio Alves	Aileu
Xisto fernandes	Viqueque
Florindo de Jesus	Liquisa
Imaculada da Concecao	Ermera
Juliana da Cruz	Ermera

Peserta pada lokakarya penyembuhan bulan Januari terdiri dari:

Marcelina Poto	Quibi-selo
Jacinta abi	Oe-silo
Paulina Foni	Quibi-Selo
Juliana Sufa	Oesilo
Maria Lucia	Bedois/Fatuahi/Cristo rei
Maria Araujo Alves	Suhurama/Inurfuik/Naifeto
Filomena Alves	Suhurama/Inurfuik/Naifeto
Filomena belo	Atewa/Marulu/Quilicai
Joaquina D.R.Gaio	Gurusa / Lakuliu /Quilecai
Etelvina Ximenes	Abafala/Quilucal
Rosa Colo Bere	Matai / Suai
Rosalinda Abuk	Fatuk / Metan
Martinha Amaral Gomes	Suai Kota
Jacinta da Silva	Lebulau / Nunumoge/ Hatubuilico
Angelina da Costa	Mauchiga / Hatubilico
Olga da Silva	Mauxica /Hatubuilico

Saturnina Ximenez	Watucarbau /Viqueque
Joana da Costa	Ailili
Beatris Soares	Butar / Sau
Regina Freitas	Cacaven
Marta Ximenez	Lospitalos Kota
Veronica Moniz	Aiasa Maba
Angelina Nunes	Lalegol / Tuluata
Alda Babo	Ponilala
Prisca Lemos	Manusae/Cucara

Lokakarya penyembuhan berikutnya akan dilaksanakan pada minggu kedua bulan Februari.

Divisi Dukungan Korban terus memberi perhatian utama dalam memberikan dukungan kepada tim-tim distrik, dan memantau dukungan lanjutan kepada mereka yang telah mengikuti kegiatan-kegiatan seperti lokakarya penyembuhan dengan dengar pendapat selama periode ini.

Selama bulan Desember 2003 – Januari 2004, tim-tim CAVR telah memfasilitasi lebih banyak lagi lokakarya Community Profiling di distrik-distrik untuk membantu mengenali dampak dari kekerasan bertahun-tahun tersebut terhadap masyarakat, sehingga jumlah lokakarya community profiling secara keseluruhan menjadi 237.

Pada akhir bulan Desember bagian pertama dari proyek yang terdiri dari dua bagian yang didanai oleh CEP, yang memberikan repara mendesak kepada orang-orang yang selamat dari pelanggaran HAM akan berakhir. Menjelang akhir Desember sejumlah US\$80,000 telah dibagikan kepada 307 survivor dan kepada organisasi-organisasi di tingkat nasional dan Distrik untuk memberikan dukungan secara terus menerus kepada para survivor. Uang ini digunakan oleh para survivor untuk sejumlah kegiatan termasuk perawatan kesehatan, biaya sekolah, membeli ternak dan membuka usaha kecil.

Bagian kedua dari Skema Reparasi Mendesak yang didukung oleh CEP telah dimulai bulan Januari dan menjelang Maret semua dana sudah akan dibagikan kepada pribadi-pribadi yang selamat dari pelanggaran, dan/atau organisasi-organisasi yang mendukung mereka.

4. Rekonsiliasi Komunitas (PRK)

Hingga bulan November, semua tim telah diberitahu bahwa mereka sudah harus memasukkan pernyataan-pernyataan akhir mereka kepada kantor nasional menjelang akhir Desember untuk memungkinkan triwlna pertama tahun untuk melengkapi semua dengar pendapat rekonsiliasi di semua distrik. Dengan banyaknya dengar pendapat yang harus dilakukan di seluruh negeri, semua tim telah memusatkan usaha mereka untuk mengumpulkan putaran terakhir dari pernyataan-pernyataan dan untuk mengorganisir serta melaksanakan dengar pendapat yang diperkirakan berjumlah 120 yang masih harus dilaksanakan selama tiga bulan terakhir pelaksanaan, yang mencakup 800 kasus. Karena keterbatasan-keterbatasan logistik dan keinginan untuk memberikan semua kesempatan kepada semua yang telah menunjukkan niatnya untuk berpartisipasi, sejumlah tim distrik masih terus memasukkan rekaman pernyataan dalam bulan Januari. Namun demikian, menjelang akhir Januari semua distrik telah memasukkan semua pernyataan dan telah menyiapkan jadwal untuk melaksanakan dengar pendapat mereka.

Pada akhir Januari telah dikumpulkan seluruhnya 1547 pernyataan saksi, karena staf distrik mengambil 200 pernyataan terutama dalam bulan Desember. Karena jumlah ini merupakan jumlah keseluruhan pernyataan yang diambil selama masa kerja CAVR, proses ini telah melampaui target semula untuk mengambil 1000 pernyataan sekitar 50%. Secara keseluruhan telah dilakukan 26 dengar pendapat selama masa dua bulan melibatkan kesaksian dari 128 saksi.

Bulan Januari menyaksikan Dengar Pendapat yang patut dicatat ketika 20 saksi memberi kesaksian dalam sebuah Dengar Pendapat, terutama menyangkut kegiatan mereka ketika anggota milisi di Caikasa, Maubara, tempat lahirnya milisi Besi Merah Putih yang terkenal. Tim CAVR Liquica memfasilitasi pertemuan publik yang menyaksikan kehadiran anggota masyarakat dalam jumlah besar dengan tingkat keterlibatan yang tinggi. Sesudah para tetua Caikasa menyucikan pertemuan tersebut dengan upacara menurut tradisi setempat, para peserta diberi kesempatan untuk meminta maaf atas tindakan mereka, berjanji untuk tidak akan melibatkan diri dalam tindakan serupa, dan diterima kembali oleh masyarakat mereka.

- *2 Desember*: Maliana, Lolotoe, Lupal: 1 saksi, masyarakat Lupal
Alasan Dengar Pendapat: Keanggotaan milisi tahun 1999, memegang senjata.
Tindakan Rekonsiliasi komunitas: meminta maaf, janji untuk tidak mengulangi lagi
- *17 Desember*: Baucau, Bucoli: 1 saksi.
- *20 Desember*: Dili, Cristo Rei: 11 saksi, 1 korban, masyarakat Cristo Rei. Alasan Dengar Pendapat: keanggotaan milisi '99, menjaga pos milisi, memegang senjata
Tindakan Rekonsiliasi Komunitas: meminta maaf, janji untuk tidak mengulangi.
- *23 Desember*: Dili, Rai Nakdoko: 7 saksi, komunitas Rai Nakdoko
Alasan Dengar Pendapat: keanggotaan milisi 1999
Tindakan Rekonsiliasi Komunitas: meminta maaf, janji untuk tidak mengulangi
*1 orang korban tidak dapat hadir
- *15 Januari*: Viqueque, Wesoru: 12 saksi, sejumlah korban
- *15 Januari*: Manatuto, Cribas: 11 saksi, komunitas Cribas
Alasan Dengar Pendapat: keanggotaan milisi 1999
Tindakan Rekonsiliasi Komunitas: meminta maaf, janji untuk tidak mengulangi
*1 saksi mengakui keterlibatannya dalam pelanggaran berat – kasus tersebut dihentikan dan dirujuk ke OGP
- *16 Januari*: Baucau, Kelakai: 1 saksi, 2 korban, masyarakat Kelakai.
Alasan Dengar Pendapat: keanggotaan kelompok militer, pemukulan dan intimidasi.
Tindakan Rekonsiliasi Komunitas: meminta maaf kepada masyarakat, janji untuk tidak mengulangi.
* Para korban yang tidak mau menerima saksi mempertahankan hak hukumnya untuk menuntut.
- *17 Januari*: Dili, Bebonuk, Metin II: 4 saksi, 1 korban, masyarakat Metin II. Alasan Dengar Pendapat: keanggotaan milisi 1999, menjaga pos, memegang arms
Tindakan Rekonsiliasi Komunitas: meminta maaf, janji untuk tidak mengulangi
*1 anggota masyarakat selanjutnya mengajukan permintaan untuk Dengar Pendapat PRK untuk dirinya sendiri sesudah namanya disebut dalam kesaksian-kesaksian.
- *19 Januari*: Manufahi, Tutuluru: 5 saksi.
- *19 Januari*: Liquica, Maubara: 9 saksi.
- *21 Januari*: Manufahi, Daisua: 10 saksi.
- *22 Januari*: Manatuto, Uma Kraik: 1 saksi.

- *23 Januari*: Viqueque, Uatukarbau: 7 saksi.
 - *23 Januari*: Los Palos, Moro/Fainara: 3 saksi.
 - *23 Januari*: Aileu, Remixio: 1 saksi.
 - *24 Januari*: Dili, Kuluhun: 1 saksi.
 - *26 Januari*: Manufahi, Beikala: 1 saksi.
 - *27 Januari*: Aileu, Fahisoe: 4 saksi.
 - *27 Januari*: Liquica, Maubara, Caikasa: 14 saksi.
 - *28 Januari*: Manufahi, Rotuto: 1 saksi.
 - *28 Januari*: Manututo, Lifoo: 1 saksi.
 - *28 Januari*: Covalima, Fohorem: 4 saksi, 5 korban, masyarakat Fohorem
- Alasan Dengar Pendapat: keanggotaan milisi 1999, menjaga pos milisi, memegang senjata

Tindakan Rekonsiliasi Komunitas: Meminta maaf, janji untuk tidak mengulangi.

* 2 korban tidak dapat hadir

- *29 Januari*: Manatuto, Aiteas: 10 saksi.
- *30 Januari*: Aileu, Manukasa: 7 saksi.
- *30 Januari*: Liquica, Maubara, Caikasa: 20 saksi.
- *31 Januari*: Dili, Fatuhada: 1 saksi, masyarakat Fatuhada

Alasan Dengar Pendapat: bekas Chefe de Suco dan orang yang dicurigai mengorganisir milisi

Tindakan Rekonsiliasi Komunitas: tidak dapat mencapai titik yang memuaskan dari sudut pandang masyarakat. Tuduhan keterlibatan dalam tindakan kejahatan berat kasus tersebut dirujuk kembali ke OGP.

5. Penggalan kebenaran

Untuk tetap mengacu pada rencana strategis CAVR, kegiatan-kegiatan berikut ini dilaksanakan oleh Divisi Penggalan Kebenaran sepanjang bulan Desember 2003 dan Januari 2004.

• ***Pengambilan Pernyataan***

Pada bulan Desember CAVR berusaha mendorong pengambilan pernyataan di distrik Baucau, Dili, Bobonaro, Covalima dan Manatuto. Hal ini dilakukan dengan menghentikan sementara pengambilan pernyataan di distrik-distrik di mana lebih banyak kemajuan telah dicapai, sehingga staf dari wilayah-wilayah ini dapat membantu teman-temannya di distrik-distrik yang disebutkan. Karenanya, staf pengambilan pernyataan dari Liquiça bergabung dengan tim pengambilan pernyataan dari Baucau, staff Aileu membantu Dili, Oecusse membantu Bobonaro, Ainaro bergabung dengan Covalima dan Manufahi mendukung Manatuto. Dalam bulan Desember, 13 pengambil pernyataan juga dialihkan untuk bekerja dalam Survey Kematian Retropektif (Retrospective Mortality Survey – RMS) yang merupakan bagian dari penyelidikan CAVR terhadap jumlah korban meninggal.

Dalam bulan Januari, sesudah liburan Natal, tim-tim ini kembali ke distriknya masing-masing dan memusatkan perhatiannya pada pengambilan pernyataan di desa-desa yang hingga sekarang belum diberi kesempatan untuk memberikan pernyataan. Secara nasional, sejumlah 7300 pernyataan telah diambil menjelang akhir Januari. Untuk mencapai target 8000 pernyataan yang disepakati, sejumlah 700 pernyataan lagi perlu diambil menjelang akhir Maret.

- ***Pemrosesan Data***

Duabelas staf CAVR bekerja untuk membaca dan memberi kode kepada pernyataan-pernyataan yang disebutkan di atas, dan 6 staf lagi bertanggungjawab untuk melakukan pemasukan data. Bersama-sama, mereka telah emproses 3675 pernyataan hingga akhir Januari. Selama periode ini, CAVR juga telah melakukan peninjauan ulang yang intensif terhadap kualitas pernyataan-pernyataan. Sejumlah 4000 sudah akan ditinjau menjelang akhir Maret sehingga hasilnya dapat dianalisis untuk Laporan Akhir.

- ***Penelitian dan penyelidikan***

Pekerjaan Survey Kematian Retropektif (RMS) dimulai bulan Desember menyusul pengangkatan staf. Pekerjaan ini sedang dilakukan dengan dukungan dari staf Kantor Statistik nasional Timor Leste. CAVR juga dibantu dalam survey ini oleh Benetec USA, yang mempunyai keahlian khusus dalam melakukan survey dan menganalisis data HAM. Sejumlah 1440 rumahtangga, yang dipilih secara acak di setiap distrik sedang disurvei. RMS merupakan bagian dari penyelidikan CAVR terhadap jumlah korban yang meninggal dunia dan penghilangan paksa di Timor Leste selama jangka waktu yang berada dalam mandatnya.

Pada saat yang sama, peneliti tetap dilanjutkan untuk kedelapan tema yang telah diprioritaskan oleh CAVR untuk diselidiki. Tema-tema tersebut adalah: perempuan dan konflik, anak-anak dan konflik, Tentara Indonesia (TNI), Fretilin/Falintil, pelaku-pelaku internasional, Konflik Politik internal tahun 74-76, kelaparan dan penghilangan paksa, dan pemenjaraan politik dan penyiksaan.

- ***Dengar Pendapat Umum***

Divisi Penggalan Kebenaran terlibat secara dekat dalam penelitian, dokumentasi dan logistik untuk Dengar Pendapat Publik mengenai Konflik politik Internal 1974-1976 yang telah dilaksanakan dengan berhasil pada 15-18 Desember 2003 (lihat laporannya dalam Laporan Perkembangan ini, dan lampiran) dan dalam mempersiapkan kedua Public Hearings publik yang akan dilaksanakan dalam bulan Maret masing-masing mengenai hak penentuan nasib sendiri dan anak-anak.

6. Dokumentasi dan Pengarsipan

Peraturan CAVR menuntut agar CAVR mengamankan catatan-catatan dan arsipnya untuk penggunaan di masa depan. Catatan-catatan dan arsip ini terdiri dari semua informasi dan mencakup pengarsipan yang dapat diakses untuk beribu-ribu pernyataan saksi, data penelitian dan bahan-bahan lainnya, termasuk foto-foto, catatan audio dan visual. Bahan-bahan ini akan menjadi bahan utama dari sebuah pusat dokumentasi yang sedang dibangun oleh CAVR.

Suatu langkah penting dalam pelaksanaan mandat ini dilakukan dalam bulan in November ketika seorang aktivis professional, Ms Del Cuddihy, mengambil posisinya sebagai penasehat di CAVR, disediakan oleh Australian Volunteers International. Kegiatan utama dalam bulan Desember termasuk pelaksanaan pameran foto '1975' yang sangat menggugah, yang dilakukan bersamaan dengan Dengar Pendapat publik tentang Konflik politik Internal (lihat laporan di atas), dan dimulainya inventarisasi di tingkat organisasi untuk catatan-catatang dan dokumentasi lainnya yang dibuat atau dikumpulkan oleh CAVR. Pekerjaan ini dilanjutkan dalam bulan Januari dengan didukung oleh pembentukan sebuah Kelompok Kerja tingkat tinggi.

Selama periode ini, CAVR menerima pengiriman sumbangan dalam bentuk barang yang diberikan oleh USAID, termasuk komputer-komputer untuk mendigitasi bahan-bahan, lemari pajangan, lemari penyimpanan file dan barang-barang penting lainnya. Selama periode ini, penasehat pengarsipan CAVR juga telah menghubungi pihak-pihak lain di Dili yang juga terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan pengarsipan, perpustakaan dan museum.

7. Keuangan

Dalam periode Desember 03 – Januari 04, dana-dana berikut ini telah diterima atau diusulkan:

- \$82,526 dari Pemerintah Denmark melalui UNDP. Jumlah ini merupakan sisa dari perjanjian pembiayaan bersama yang ditandatangani bulan Desember 2002;
- \$32,900 (dari keseluruhan jumlah \$60,000) dari UNDP untuk dukungan teknis. Dana ini merupakan bagian dari hibag UNDP kepada CAVR pada bulan Juli 2003 dan telah dilaporkan dalam Laporan Perkembangan terdahulu;
- \$39,901 (dalam bentuk barang) disetujui oleh USAID untuk program radio mingguan CAVR;
- \$46,800 dari hibah berjumlah EUR125,000 telah dibayarkan dicagarkan (dibayarkan terlebih dahulu) kepada CAVR oleh Pemerintah Irlandia, dan sisanya akan dibayar pada tahun 2004;
- \$40,000 disetujui oleh United States Institute of Peace (hibah kedua dari USIP kepada CAVR);
- \$134,000 disediakan oleh Pemerintah Selandia Baru.

Pada bulan Januari 2004 CAVR merevisi proposal pendanaan umumnya menjadi sebuah anggaran proyek bernilai \$5,266,000 dan telah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para donor, secara bersama-sama dan dengan masing-masing donor, untuk meminta tambahan satu juta Dollar AS untuk rencana anggaran ini. President Xanana Gusmão dan Perdana Menteri Mari Alkatiri mendukung imbauan ini dengan menulis surat kepada para donor.

8. Kunjungan dan pengunjung

2 Desember: Ms Carol Hannon, mewakili Irlandia

2 Desember: briefing kepada Duta Besar Kamallesh Sharma, Utusan khusus Sekjen PBB untuk UNMISSET

4 Desember: Kelompok Study Jepang tentang situasi pasca pertikaian yang disponsori oleh

Japan Institute for International Affairs

5 Desember: briefing kepada para donor di CAVR

10 Desember: Paulo Pinto dan Hazem Galal tentang proyek bahasa bidang peradilan

10 Desember: Guglielmo Colombo, Kepala Kantor Komisi Eropa

10 Desember: Tania Burke, Misi Australian

15 Desember: Federica Donati, Kantor Komisaris Tinggi HAM PBB, Geneva

15-18 Desember: saksi-saksi untuk Dengar Pendapat Umum tentang Konflik politik Internal

(Lihat laporan terpisah)

19 Januari: Ateesh Chanda, Brown University

20 Januari: Duta besar AS, Joseph Rees di Kedutaan Besar AS

20 Januari: Konsul-Jendral Selandia Baru, Peter Guinness

20 Januari: Wakil Utusan Khusus Sekjen PBB Sukehiro Hasegawa dan bapak Haoliang Xu/Ms Lene Jespersen, UNDP
20 Januari: Peluncuran buku 'Woman of Kemerdekaan' oleh Kirsty Sword Gusmão
21 Januari: Duta Besar Jepang Asahi di Kedutaan Jepang
22 Januari: Duta Besar Inggris Tina Redshaw di Kedutaan
26 Januari: Perayaan Australia Day di Hotel Timor
27 Januari: Angela Soares, AESOP/APHEDA
28 Januari: Duta Besar Australia Paul Foley di Kedutaan Besar
30 Januari: Yo'av Karny, United States Institute of Peace
30 Januari: Kelompok Perempuan Asia-Pacific didukung oleh Timor-Leste Centre for Peace dan Democracy.

APPENDIX 2

KONFLIK POLITIK INTERNAL 1974-1976 Dengar Pendapat Nasional CAVR, 15-18 Desember 2003

Kantor Nasional CAVR, ex-Comarca Balide, Dili, Timor-Leste

Pengantar

Dengar Pendapat Umum CAVR tentang Konflik Internal 1974-76 merupakan empat hari bersejarah untuk Timor Leste. Untuk pertama kalinya dalam sejarah negeri ini, pemuka-pemuka masyarakat utama dan wakil-wakil partai politik berbicara secara terbuka dan kepada sebuah lembaga resmi negara tentang kekerasan masa lalu antara orang Timor Leste dalam sejarah singkat antara watu pembentukan partai-partai politik Timor Leste dan invasi militer Indonesia.

Dengar Pendapat tersebut dudahului dengan pekerjaan pendahuluan selama berbulan-bulan. Serangkaian pertemuan telah diadakan dengan partai-partai politik dan para pemimpin politik, untuk membangun pengertian tentang mandat CAVR dan peranan Dengar Pendapat ini dalam memenuhi mandat tersebut. Tokoh-tokoh internasional penting telah diwawancarai. Komisi memberika prioritas yang begitu tinggi terhadap Dengar Pendapat ini karena keyakinan bahwa konflik antara orang Timor Leste pada tahun 1975, pada awal pembentukan sebuah negara baru, merupakan suatu urusan yang belum tuntas dalam psikologi dan kehidupan politik orang Timor Leste. Untuk berbicara secara terbuka dan dengan kejujuran mengenai peristiwa-peristiwa dari periode ini, dan melakukannya dalam semangat mencari pemahaman dan menjangkau pihak yang saling berseberangan, juga dilihat sebagai aspek penting dalam pekerjaan rekonsiliasi CAVR.

Metodologi Dengar Pendapat tersebut dirancang untuk membagi keempat hari tersebut menjadi \ kesaksian dari tiga jenis saksi: orang-orang yang selamat dari pelanggaran HAM; para pelaku utama dari proses; saksi ahli; dan para pemimpin dari partai-partai histories. Secara keseluruhan, CAVR mendengarkan kesaksian dari 14 orang saksi, dan pemimpin dari keempat partai politik historis.

Setiap hari diawali dengan nyanyian merdu oleh paduan suara dari Lahane. Pada sore hari kedua dar dengar pendapat tersebut, sebuah pameran foto bersejarah dibuka oleh Pemenang Hadiah Nobel dan Menteri Luar Negeri Dr José Ramos Horta Each, bersama dengan pemutaran film historis oleh Clive Scollay dari Australia dan wartawan Portugis Adelino Gomes. bapak Gomes juga hadir, dan menceritakan kembali pengalamannya sendiri ketika merekam peristiwa penyerbuan militer Indonesia dekat perbatasan pada bulan Oktober 1975, serta pelariannya. Dengan Dom Basilio do Nascimento membuka dengar pendapat, dan President Xanana Gusmão menutupnya, peristiwa tersebut mendapatkan makna secara nasional dipadu dengan semangat dari mereka yang bersaksi untuk tampil dalam keterbukaan dan mendamaikan, mencoba membantu penyembuhan luka-luka dan membangun dasar bagi hubungan-hubungan nasional yang baru.

Dengar Pendapat empat hari tersebut ditayangkan lewat televisi secara langsung di seluruh Dili oleh TVTL dan disiarkan lewat Radio Timor-Leste. Media nasional lainnya mengikuti dengar pendapat tersebut dari dekat.¹

¹ Laporan ini bukan merupakan catatan kata demi kata dari dengar pendapat. Juga bukan merupakan analisis atau perbandingan dari kesaksian yang diberikan kepada CAVR. Laporan ini bertujuan untuk memberi cakupan umum dari kesaksian yang diberikan selama empat hari tersebut untuk memungkinkan para pembaca mendapatkan pemahaman umum tentang apa yang dikatakan. Laporan ini disajikan dalam urutan kronologis sebagaimana Dengar Pendapat dilangsungkan. Selain Mayor Jendral (Portugis), Bapak Yusuf Wanandi (Indonesia) dan bapak James Dunn (English), semua kesaksian disampaikan dalam bahasa Tetum, salah satu dari bahasa resmi Timor-Leste'. Kutipan dalam laporan ini diambil dari catatan yang diambil secara awangan pada saat dengar pendapat.

Jadwal

Hari Pertama, 15 Desember 2003:

1. Sambutan oleh Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR
2. Pidato Pembukaan oleh Uskup Basilio do Nascimento, Pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste
3. Kesaksian:
 - Xanana Gusmão, pelaku utama
 - Yusuf Wanandi, pelaku utama (kesaksian tertulis, dibacakan oleh Komisaris Nasional Rev. Agostinho Vasconcelos)
 - Manuel Freitas, kesaksian survivor
 - Manuel Carrascalão, pelaku utama

Hari Kedua, 16 Desember 2003:

1. Paduan Suara
2. Doa
3. Kesaksian:
 - Monis da Maia, survivor dari Distrik Manufahe
 - Mayor-Jendral Lemos Pires, pelaku utama (wawancara yang direkam dari Portugal)
 - Mari Alkatiri, pelaku utama
 - Jose Ramos Horta, pelaku utama

Hari Ketiga, 17 Desember 2003:

1. Paduan suara
2. Kesaksian:
 - Antonio Serpa, survivor dari Laleia di Distrik Manatuto
 - Tomas Goncalves, pelaku utama
 - Rogerio Lobato, pelaku utama
 - Domingos de Oliveira, pelaku utama
 - Francisco Xavier do Amaral, pelaku utama

Hari Keempat, 18 Desember 2003:

1. Choir
2. Kesaksian:
 - James Dunn, saksi ahli
 - Kota, Clementino Amaral (Wakil Ketua)
 - Apodeti, bapak Frederico Almeida Santos (Ketua, Apodeti Pro-Referendum)
 - Trabalhista, Paulo Freitas da Silva (Ketua)
 - UDT, Joao Carrascalão (Ketua)
 - Fretilin, Francisco Lu'Olo Guterres (Ketua), Mari Alkatiri (Sekretaris Jendral)
3. Pidato Penutupan oleh Yang Mulia Kay Rala Xanana Gusmão, Presiden RDTL
4. Refleksi Penutupan Closing Reflection oleh Fr. Jovito do Rego Araujo, Wakil Ketua CAVR
5. Doa Penutup oleh Rev. Maria de Fatima Gomes

Sambutan oleh Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR

Dalam pidato pembukaannya, Ketua CAVR Aniceto Guterres Lopes mengatakan bahwa untuk upaya untuk memahami masa lalu, mengakui kesalahan-kesalahan masa lalu dan belajar darinya, merupakan bagian tak terpisahkan dari proses pembentukan negara Timor-Leste.

“Hari ini, empat tahun sesudah kita memperoleh kemerdekaan kita, kita siap untuk mengambil sebuah langkah yang sulit di jalan pengenalan diri. Kita aman, dan cukup berani serta bijaksana untuk mengetahui bahwa kita harus melihat kepada sejarah kita dan memahaminya, jika kita benar-benar ingin meninggalkannya. Saya ingin berterima kasih kepada para pemimpin nasional kita atas hal penting ini dan dukungan mereka yang sangat besar terhadap proses ini.

“Dalam empat hari ini kita akan menggali bersama, sebagai bangsa yang bersatu dan merdeka, salah satu dari periode paling menyakitkan dalam sejarah kita. Cerita yang akan anda dengarkan dari para korban, para pelaku utama, saksi ahli dan utusan-utusan partai sekali-sekali akan memenuhi anda dengan kebanggaan. Kadang-kadang cerita-cerita itu akan membuat kita menyesal dan malu. Marilah kita menempuh proses ini bersama, mengakui bahwa untuk mengakui kegagalan juga perlu keberanian, dan bahwa proses ini dilakukan dengan tujuan membersihkan rumah kita, membuang bau dari sampah yang busuk yang hanya dapat menjadi bau dan meracuni jika tetap tersembunyi di tempat-tempat gelap.”

“...Sebagian dari anda mungkin akan bertanya mengapa kita perlu membuka luka lama yang telah sembuh. Ini adalah pertanyaan yang harus dihadapi oleh CAVR dengan jujur jika ingin melaksanakan mandat yang diberikan oleh wakil-wakil anda, Parlemen, kepada kami. Masalahnya bukanlah apakah kita perlu meninggalkan masa lalu. Kita tahu bahwa kita perlu. Tujuan kita adalah untuk menemukan jalan terbaik secara berani untuk meninggalkan masa lalu kita, untuk meju ke depan tanpa dibebani oleh masa lalu ... Proses yang akan kita jalani bersama dalam empat hari mendatang ini dimaksudkan untuk membantu kita dalam penyembuhan luka-luka masa lalu. Janganlah kita melarikan diri dari kebutuhan untuk melihat kepada sejarah kita. Apa yang telah terjadi itulah kebenaran, memang benar-benar terjadi. Marilah kita belajar dari pengalaman-pengalaman ini bersama sehingga luka-luka lama itu sungguh-sungguh dapat dibersihkan dan dapat sembuh secara sempurna, terbuka terhadap cahaya dan udara, dalam semangat rekonsiliasi dan keinginan untuk menciptakan suatu masa depan yang damai dan makmur bagi rakyat. Marilah kita mengakui keberhasilan dan kejayaan masa lalu, dan juga kesalahan-kesalahan kita, sehingga kita dapat menjaga diri untuk tidak melakukannya lagi.

“...Alasan-alasan seperti kebutuhan, keamanan dan perang tidak pernah memadai untuk membenarkan pelanggaran terhadap hak-hak warga negara. Ini merupakan pelajaran yang perlu kita bawa bersama kita, sehingga kesalahan-kesalahanitu tidak akan terulang lagi di masa depan ...”

Sebagai penutup, Guterres Lopes mengatakan,

“Untuk maju ke depan, marilah kita menatap lurus ke depan, sambil juga mengingat dari mana kita datang.”

Pidato Pembukaan oleh Uskup Dom Basilio do Nascimento, Pemimpin Gereja Katolik di Timor-Leste

Uskup Basilio do Nascimento dikenal karena kepribadiannya yang hangat dan kombinasi antara gairah kecerdasannya dengan sentuhan kerakyatannya. Beliau memulai pidatonya dengan mengatakan bahwa ketika beliau menerima undangan untuk membuka dengar pendapat itu, ”hati saya terbelah,” katanya, menuturkan keprihatinannya terhadap masa depan Timor ketika CAVR memulai pekerjaannya.

“Mengapa kita berada di sini sekarang? Kerana waktu historis ...karena luka-luka masa lalu, semua orang Timor telah menunggu...agar kita dapat melakukan rekonsiliasi ...rekonsiliasi bagi penderitaan masa lalu, untuk negeri kita, semua orang Timor menderita...Orang Timor perlu mengadakan rekonsiliasi dalam diri kita masing-masing, dengan tanah air kita dan dengan sejarah kita ...kita tahu bahwa ini merupakan ide yang baik, tetapi sangat sulit dilakukan ...kita mendengar kata-kata pembenaran dan legitimasi ...'karena perangnya saya melakukan ini' ...kita perlu menguji ini...”

“Mengenai moralitas ...rekonsiliasi di dalam diri kita sendiri hanya dapat terjadi jika kita dapat melepaskan rasa bersalah kita ...jika tidak, akan selalu ada suara yang berbicara pada kita ...selalu memanggil dalam kepala kita, benak kita ...itulah sebabnya saya mengatakan bahwa rekonsiliasi hanya dapat dicapai jika kita dapat melepaskan rasa bersalah kita ...

Kita bisa mencari segala macam alasan dan argumentasi intelektual ...tetapi jika kita belum melakukan rekonsiliasi dalam diri kita sendiri, kita masih terbelah. Bukan hanya sebagai bangsa atau kelompok, tetapi dalam diri kita sendiri ...seperti orang dengan dua kepribadian, mulut kita mengatakan satu hal, tindakan kita lain lagi ...”

Uskup Nascimento juga melakukan refleksi tentang keadilan dan mengatakan bahwa rekonsiliasi dengan keadilan adalah jalannya.

“Kita tahu bahwa mereka yang telah meninggal tidak akan hidup kembali, tetapi kita perlu mengetahui keadaan seputar kematian mereka ...apa yang kita, orang Timor, maksud sebagai keadilan adalah sesuatu yang sangat khusus ...Saya melihat bahwa orang Timor tidak menunggu hingga mereka yang telah berbuat salah dihukum. Ini terserah pada negara ...ketika anak tante Maria terbunuh di pegunungan ...keadilan untuk orang Timor biasa termasuk pembersihan nama, dan memastikan bahwa orang tidak merupakan (para korban) ...Jadi ini membuat kita berpikir. Orang-orang pandai mengatakan kepada kita bahwa kita perlu keadilan melalui pengadilan. Benar. Tetapi menurut rakyat, ada juga keadilan yang lain.”

Menutup pidatonya, Uskup Nascimento berterima kasih kepada para pemimpin partai-partai politik bersejarah atas keberanian dan kerendahan hati mereka untuk tampil dalam dengar pendapat. Beliau mengatakan kepada semua orang Timor bahwa, ”sudah saatnya untuk mengerti masa lalu kita ...dan untuk menciptakan sebuah rumah baru di Timor.”

Para Komisaris menempati kursi mereka, dan jumlah hadirin membengkak melampaui 800 orang, untuk mendengarkan kesaksian pertama dari seorang pelaku utama dari periode tahun 1974-76, bapak Xanana Gusmão.

Kesaksian-kesaksian

Bapak Xanana Gusmão, pelaku utama

Bapak Xanana Gusmão berbicara sebagai pelaku utama perorangan, bukan sebagai Presiden RDTL. Beliau menggambarkan keterlibatannya dalam proses politik Timor-Leste, mulai dari peristiwa-peristiwa 1974-1976, dan selanjutnya dalam tahapan-tahapan yang berbeda dari perjuangan rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri.

“Saya bergabung dengan Fretilin dalam bulan September 1975, sesudah kudeta balasan. Dalam bulan Mei 1976 ... pertemuan di Viqueque. Tahun 1977 saya pergi ke Lospalos. Pada tanggal 22 November ... saya pergi ke Matebian, dan saya bertanggungjawab untuk Wilayah Ponte-Leste. Bulan Maret 1981 ... dalam reorganisasi saya menjadi Komandan Falintil. Pada tahun 1987, saya mendirikan CNRM, dan Falintil menjadi terpisah dari Fretilin. Inilah keterlibatan saya sebagai pelaku proses.

“Saya datang ke sini dengan tujuan untuk melakukan refleksi tentang sebab dan akibat ...dan dengan para pemimpin di sini ...untuk menjelaskan kondisi-kondisi dalam proses ini ...”

Bapak Gusmão berbicara panjang lebar mengenai iklim politik dan sosial Timor sesudah “Revolusi Bunga” 25 April 1974 di Portugal. Beliau menceriterakan betapa bahagianya orang Timor pada awalnya, dan mempunyai harapan yang tinggi atas proses selanjutnya. Tetapi, beliau mengatakan bahwa dengan sangat cepat kebebasan politik baru di Timor berubah menjadi politik serangan pribadi.

“... ketika kita mempunyai kebebasan untuk membentuk partai-partai dan berbicara tentang demokrasi ...segera saja kita melihat serangan-serangan pribadi ... dan kelompok-kelompok saling menyerang ... partai-partai memecah belah orang Timor ... dalam keluarga ... ayah dan anak, saudara, teman terpecah belah ... kita biasanya bertemu dan saling menyambut, tetapi sejak itu tidak lagi, kita saling menatap dan berkata, siapakah kamu?”

Bapak Gusmão mencatat bagaimana partai-partai gagal melihat kepentingan nasional yang lebih besar, tetapi memusatkan perhatiannya untuk menunjukkan diri mereka sebagai pemegang utama kepentingan nasional.

“Para pemimpin partai politik tidak mempunyai energi untuk mengurangi kekerasan ... para pemimpin partai-partai politik merasa senang ketika mereka mer laporan dari lapangan bahwa mereka telah memukul orang ... ketika mereka mendengar keberadaan suatu partai politik di suatu tempat, mereka mengirim orang mereka ... dan kemudian mereka akan bertikai begitu mereka sampai di sana ...”

Bapak Gusmão mengalisis pembentukan dan pusat perhatian dari masing-masing kedua partai politik bersejarah, ASDT (yang belakangan menjadi Fretilin) dan UDT, dan tentang partai Apodeti yang mendukung integrasi dengan Indonesia. Partai Trabalhista dan Kota tidak memainkan peranan kunci dalam proses tersebut, katanya. “partai-partai itu,” katanya “mendorong terjadinya perpecahan di antara rakyat.”

Bapak Gusmão mengatakan bahwa situasi di Timor begitu tegang sejak bulan Juni 1975, terutama di wilayah pedalaman. Keadaan ini semakin memburuk dalam bulan Juli, ketika beliau mengatakan bahwa situasi “sangat buruk”, dan dalam bulan Agustus sebelum perebutan kekuasaan oleh UDT beliau mengatakan bahwa orang-orang berjalan keliling Dili dengan senjata. Beliau menyebut kudeta tersebut (dengan menggunakan kata itu), sebagai gerakan anti-komunis. Sebelumnya beliau mengatakan bahwa para pemimpin UDT berada di bawah tekanan dari Jakarta. Katanya, tekanan dari Jakarta terhadap para pemimpin UDT terjadi dalam konteks perang AS di Vietnam, dan situasi di Kamboja

Bapak Gusmão menceriterakan bagaimana anggota-anggota UDT membawanya ke Komite Central mereka untuk menjelaskan situasi mereka, mereka mengatakan bahwa kalau Indonesia mengira bahwa Timor adalah Komunis Indonesia akan menyerbu. Beliau mencatat bahwa “Generalisasi yang dilakukan oleh UDT bahwa semua Fretilin adalah Komunis ... sangat mudah untuk dilakukan,” tetapi bahwa dalam ini, orang-orang di pedalaman mulai bertikai.”

Bapak Gusmão sangat berterus terang mengenai jawaban Fretilin: “jawaban dari Fretilin adalah balas dendam.” Begitu Fretilin menguasai keadaan, katanya “di Taibesse (sebuah daerah di pinggiran kota Dili) ... orang-orang saya sendiri mulai memukul orang ... merreka mengatakan ‘kita berhak untuk memukul orang’ ...” bapak Gusmão menekankan bahwa “sikap ‘saya sudah mendapatkan hak’ untuk melakukan hal seperti itu merupakan sesuatu yang harus diubah dalam masyarakat Timor Leste.”

Bapak Gusmão berbicara tentang penyerbuan dengan kekuatan penuh pada tanggal 7 Desember di Dili, dan pengungsian ke gunung-gunung di sekitar Dili. Beliau berbicara tentang masalah yang sangat sensitif ketika Fretilin membawa para tawanan UDT ke Aileu dan Same di mana mereka dibunuh. Katanya:

“... Para tawanan UDT dan Apodeti dibawa ke gunung-gunung bukan dengan maksud untuk membunuh mereka ... tetapi pasukan-pasukan penerjun sudah mulai mendarat ... tentara Indonesia sudah menduasai Dili, mulai bergerak ke atas. Kendali, saya dapat mengatakan ... kurang ada kendali ... Pembantaian di Aileu, ada yang mengatakan bahwa itu merupakan balas dendam politik, tetapi saya tidak percaya bahwa hal itu merupakan suatu kebijakan partai, terutama karena pada waktu itu sudah tidak ada kendali yang begitu besar, kami, para anggota Dewan Pusat Fretilin, pengikut politik sipil, pada waktu invasi orang-orang militer mengatakan kepada kami bahwa jika kami tidak mau memanggul senjata ... lari saja ... situasi pada waktu itu tidak sepenuhnya tidak terkendali, tetapi mendekati ... situasi di Dili, rakyat berlari-berlari dan berlari ke gunung-gunung ... saya bisa mengatakan bahwa pembantaian itu bukan merupakan sebuah program politik yang terencana, bukan suatu kebijakan atau strategi. Pembantaian itu terjadi, dan pembantaian Same menunjukkan kepada kita bahwa Dewan Pusat Fretilin tidak mempunyai kemampuan ... karena musuh sedang mendesak ... perhatian sepenuhnya dari Falintil dan Dewan Pusat Fretilin adalah pada gerak maju musuh ... kita tidak bisa mengatakan bahwa partai memerintahkan untuk melakukan ini, tidak, masalahnya adalah pasukan musuh terus mendekati, dari arah Timur, dari perbatasan, kemudian di Dili, pasukan penerjun di Baucau, pendaratan di Lospalos, di Viqueque ... situasi pada waktu itu kurang terkendali ... kita tidak bisa mengatakan bahwa Fretilin mengatur pembantaian itu ...”

Kemudian, ketika ditanya oleh Komisaris Nasional bapak Jose Estevaso tentang ini, bapak Gusmão mengatakan,

“Meskipun peerangan telah dimulai ... kami belum kehilangan semua kendali ... kami belum kehilangan kendali sepenuhnya ... kami mencoba menghadapi musuh yang sedang bergerak maju, bukan hanya melalui jalan raya tetapi dari mana-mana ... Dewan Pusat bertemu di Maubisse ... dan hanya berbicara tentang musuh ... kami tidak punya waktu untuk memutuskan tentang masalah-masalah lain. Dewan Pusat berbicara tentang di mana musuh berada? Musuh sudah bergerak ke mana? Jadi itulah kekurangan kendali. ... mereka yang terbunuh di Aileu ... kalau mereka yang memberi kesaksian mengatakan siapa yang bertanggungjawab, itu tidak apa-apa ... Apa yang saya katakan adalah bahwa saya mengerti bahwa mereka membawa orang ke Aileu bukan untuk dibunuh tetapi untuk melarikan diri (dari invasi) ... itu terserah pada CAVR untuk memutuskan ...”

Bapak Gusmão menutup kesaksiannya dengan meminta kepada semua orang Timor Leste yang turut dalam Dengar Pendapat, dalam semangat yang dikatakan oleh Uskup Nascimento dan Ketua CAVR bapak Aniceto Guterres Lopes.

“... ini bukanlah sebuah pengadilan ... kita sedang mencoba untuk mengerti ini, karena hal ini merupakan sesuatu yang sudah kita lakukan ... saya meminta anda untuk percaya pada CAVR ... untuk menguatkan proses yang sudah dibicarakan oleh Uskup.”

Bapak Gusmão kembali ke CAVR pada hari keempat untuk menutup Dengar Pendapat, dalam kapasitasnya sebagai Presiden RDTL.

Bapak Manuel Duarte, Survivor dari Distrik Ermera district

Bapak Manuel Duarte menceritakan bagaimana beliau selamat dari sebuah pembunuhan tahanan oleh partai UDT dalam bulan September 1975. Ceriteranya mencerminkan keerasan sewenang-wenang yang diganjarkan kepada para tahanan yang ditawan oleh kedua partai politik terbesar.

Sebagai seorang anggota Fretilin, beliau menceritakan dirinya ditangkap oleh UDT di Dili pada tanggal 11 Agustus 1975, dilepas dan kemudian ditangkap lagi pada tanggal 12 Agustus dan dibawa ke desa Aifu. Beliau menceritakan bagaimana sesudah Fretilin merebut kekuasaan tanggal 20 Agustus 1975, UDT mengungsi ke Ermera dengan membawa para tahanan. Beliau mengatakan bahwa pada waktu itu ada lebih dari 70 tahanan yang disesakkan ke dalam sebuah ruang tahanan kecil, dan tentang 7 orang yang dibawa ke desa Claetremas. Beliau menceritakan secara ilustratif tentang saat-saat eksekusi yang mengerikan.

“Pak tua Lourenço mengatakan bahwa ‘Tidak apa-apa bagi kami untuk mati, tetapi berilah kami waktu untuk berdoa kepada Tuhan.’ Kami berlutu, enam orang berada di belakang kami dengan panah. Sesudah berdoa, mereka bertanya kepada kami ‘Apakah kalian sudah selesai berdoa?’ Kemudian mereka menghitung satu, dua, tiga ... mereka mengarahkan panah mereka ke punggung kami. Saya sekonyong-konyong terguling, lima orang lainnya juga jatuh menyusul saya ke dalam perkebunan kopi, di sebuah jurang di pinggir sungai. Kemudian mereka mengikuti kami, mereka mengangkat dagu saya dan memukulnya dengan sepotong kayu hingga potongan kayu itu patah ... mereka mengangkat kami dan meletakkan kami dalam sebuah baris ... menutupi tubuh kami dengan sebuah kain terpal tipis dan meletakkan ranting-ranting kopi di atasnya ... kemudian mereka pergi ...”

Bapak Duarte menceritakan bagaimana beliau secara perlahan-lahan bergerak keluar dari terpal itu, merayap ke semak-semak dan sepanjang malam berusaha menjangkau sebuah rumah, di mana beliau kemudian dirawat. Ketika Fretilin tiba di Ermera hari berikutnya, beliau dibawa ke Dili untuk perawatan. Beliau mengingat kembali bahwa beliau baru kembali ke Ermera tanggal 6 Desember, sehari sebelum invasi penuh Indonesia.

Bapak Jusuf Wanandi, pelaku utama Indonesia

Bapak Jusuf Wanandi, juga dikenal sebagai Liem Bian-Kie berasal dari Sumatra Barat dan merupakan anggota Dewan dan peneliti senior pada Centre for Strategic and International Studies (Pusat Studi Strategis dan Internasional, CSIS) di Jakarta. Beliau adalah seorang sarjana hukum dan ahli strategi politik dan keamanan and, di antara kedudukan-kedudukan yang lain, saat ini memangku jabatan sebagai Presiden Direktur perusahaan penerbitan 'the Jakarta Post'. CSIS didirikan pada tahun 1971 dengan dukungan almarhum Mayor-Jendral Ali Murtopo dan Soedjono Hoemardani, waktu itu merupakan asisten pribadi Presiden Suharto, untuk melakukan kajian kebijakan dalam masalah-masalah yang mempunyai kepentingan strategis bagi Indonesia. Kelompok Murtopo menentang kemerdekaan Timor Leste. CSIS bekerja secara dekat dengan dinas intelijen Bakin dan sengan Operasi Khusus (OPSUS) dan memainkan peranan penting dalam Operasi Komodo. CSIS juga menghabiskan sumberdaya yang cukup besar untuk menyanggah pandangan-pandangan yang mendukung kemerdekaan rakyat Timor Leste terutama di lingkungan konservatif di ibukota-ibukota negara-negara barat, termasuk Australia dan AS.

Bapak Wanandi tidak dapat melakukan perjalanan ke Timor Leste untuk tampil dalam Dengar Pendapat tersebut. Beliau menyampaikan submisi tertulis ke CAVR, yang dibacakan dalam bahasa Indonesia oleh Komisaris Nasional Rev. Agostinho Vasconcelos.

Bapak Wanandi membuka penyajiannya dengan merujuk kepada Konstitusi Indonesia tahun 1945, dan dukungan bagi hak semua bangsa atas kemerdekaan serta penghapusan kolonialisme. Namun demikian, katanya, "perjalanan bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya, terdapat batas-batas tertentu untuk mencegah anarki dan konflik secara terus menerus ..."

Hal ini menggambarkan konteks dari analisisnya tentang peristiwa-peristiwa pada tahun 1974-75. pada dasarnya Indonesia mendukung hak rakyat Timor untuk menentukan nasib sendiri tetapi maksudnya adalah bahwa mereka seharusnya mempunyai pilihan yang realistis dengan memilih bergabung dengan Indonesia.

Bapak Wanandi menekankan bahwa beliau menganggap peristiwa 1974-75 sebagai kegagalan Portugal untuk memenuhi tanggungjawabnya untuk melakukan dekolonisasi. Beliau mengatakan bahwa Portugal "tidak mempunyai konsep yang jelas dan terinci" tentang sebuah proses dekolonisasi Timor Leste, dan bahwa "mereka selalu kewalahan dengan *fait accompli* akibat perkembangan di wilayah-wilayah jajahan, termasuk Timor Leste ..." Dia bercerita tentang pertemuan-pertemuan antara Portugal dan Indonesia, di mana katanya Indonesia mulai mengerti bahwa proses bagi Indonesia untuk mempengaruhi Timor menuju integrasi akan didukung. Namun demikian, beliau mengatakan bahwa ketidakstabilan pemerintahan Portugis sesudah revolusi bulan April 1974 juga mengakibatkan Portugis tidak dapat memenuhi janji-janji dan rencana yang dibuat antara kedua negara "jadi Indonesia merasa 'dibodohi' dalam berbagai rencana dan kesepakatan."

Bapak Wanandi juga berbicara tentang ketidakpastian dalam pandangan orang-orang Indonesia tentang Timor-Leste. Dalam hal ini beliau menceritakan kesulitan untuk mendamaikan ide penentuan nasib sendiri dengan pandangan orang Indonesia bahwa Timor seharusnya memilih untuk bergabung dengan Indonesia. Beliau mengatakan bahwa Indonesia berada dalam situasi yang tegang pada tahun 1974 karena krisis utang minyak, dan bahwa Presiden Suharto pusing dengan keperluan untuk konsolidasi ekonomi dan pembangunan. Beliau mengatakan bahwa:

"... di dalam Indonesia orang yang sepenuhnya menolak pandangan Timor Leste bergabung dengan Indonesia adalah Presiden Soeharto. Beliau merasa bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tidak pernah diberi mandat untuk membuat keputusan di luar wilayah Republik Indonesia. Beliau juga sedang mengalami banyak tantangan dalam pembangunan nasional, terutama secara ekonomis. Karenanya beliau tidak ingin menambahkan beban yang tidak diperlukan ..."

Bapak Wanandi melukiskan sebuah keadaan di mana Indonesia kehilangan kesabaran diplomatiknya “ketika perang saudara terjadi 11 Agustus 1975 antara UDT dan Fretilin,” dan belakangan “dengan pernyataan kemerdekaan sepiha Fretilin dalam bulan November 1975, jalan damai dan diplomatik menjadi buntu dan kekerasan menjadi sebuah *fait accompli*.”

Bapak Wanandi berbicara tentang kekhawatiran Indonesia dengan masalah komunisme di wilayah ini, dalam konteks kemenangan Vietnam Utara. Dalam kaitan ini, beliau mengatakan bahwa Indonesia mempunyai kepentingan strategis di Timor Leste,” bahwa Timor Leste dapat menjadi sumber masalah keamanan jika terjadi kekosongan kekuasaan, suatu hal yang dapat saja terjadi dalam kerangka proses dekolonisasi..” Beliau mengatakan bahwa pemerintah Australia dan Malaysia mengingatkan tentang masalah ini, menyarankan agar Indonesia “mempengaruhi proses tersebut guna menjamin keamanan dan stabilitas di wilayah Asia-Pasifik.”

Dalam analisisnya, bapak Wanandi sama sekali tidak menyebutkan tentang Operasi Komodo Indonesia yang telah dimulai tahun 1974, dan yang melibatkan kegiatan militer Indonesia di perbatasan dalam wilayah Timor Leste dalam bulan Oktober 1975, sebagaimana diungkapkan belakangan dalam kesaksian saksi-saksi lainnya. Beliau juga tidak menyebutkan tentang pertemuan yang diadakan antara tokoh-tokoh kunci Indonesia dan pemimpin-pemimpin UDT sebelum aksi UDT tanggal 11 Agustus. Mungkin untuk menyinggung secara singkat, beliau mengatakan “General Moerdani selalu berpendapat bahwa kita harus memerangi perang saudara ini dengan membantu UDT dan Apodeti dengan senjata dan ‘sukarelawan’, tetapi orang-orang yang terlibat selalu sedikit wilayah yang dimasukipun terbatas, dan ini semua dilakukan dalam kerahasiaan.”

Menutup penyampaianya, bapak Wanandi mengemukakan bahwa analisisnya

“merupakan suatu interpretasi pribadi ... tentang pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran orang-orang dan kelompok-kelompok yang memainkan peranan dalam perkembangan proses dekolonisasi di Timor Leste di tahun 1974-1975. karena ini merupakan pandangan pribadi, tentu saja ini akan dikoreksi oleh yang lain dalam ‘dengan pendapat’ ini atau dalam kesempatan lainnya, yang pasti akan muncul.. saya ingin menekankan di sini bahwa ini tidak mencerminkan pendapat dan pandangan dari para pelaku serta orang-orang yang memainkan peranan penting pada masa itu, dan saya secara pribadi belum tentu setuju dengan para pemimpin Indonesia pada waktu ini. Terutama sekarang ketika kita sudah mengerti masalahnya secara lebih penuh.”

Bapak Manuel Freitas, Survivor dari Distrik Covalima

Manuel Freitas memberi kesaksian sebagai *survivor* dari kekerasan di tahun 1975 di Dili. Dari Suai, beliau berada di Dili sebagai remaja pada tahun 1975 selama masa kekerasan partai politik Timor Leste dala bulan Agustus-September.

Bapak Freitas berbicara tentang kekalutan pada waktu itu, dan kekerasan terhadap orang-orang biasa oleh mereka yang mempunyai kekuasaan dan senjata. Dia menceritakan bagaimana beliau dihadang banyak kali di pinggir jalan oleh kelompok-kelompok politik, memintanya untuk menunjukkan kartu identitas dari partai politik, tetapi beliau sendiri tidak tahu kartu mana yang harus ditunjukkan untuk menghindarkan dirinya dari pemukulan. Ceritanya menggarisbawahi betapa sulitnya bagi orang biasa untuk mengelak dari perangkap kekerasan pada waktu itu..

Pada bulan Agustus 1975 beliau dipenjarakan di Dili oleh partai UDT. Beliau menceritakan dirinya disiksa dan diancam akan dibunuh di penjara, sebelum dibebaskan dengan tubuhnya yang berlumuran darah. bapak Freitas menceritakan tentang kekerasan yang terjadi ketika Fretilin memasuki Dili dari Aileu 20 agustus. Dili, yang menggambarkan pemandangan pertempuran bersenjata di jalanan, dengan orang-orang sipil terperangkap di tengah-tengahnya. Begitu Fretilin menguasai keadaan, beliau mengatakan bahwa beliau dipilih untuk bertugas di perbatasan dalam bulan September 1975.

Ketika di aselesai menceritakan pengalamannya pada tahun 1975, bapak Freitas mengatakan berbicara tentang tahun-tahun pendudukan militer Indonesia ketika beliau masuk keluar penjara berkali-kali. Pada tahun 1983 beliau mengatakan bahwa beliau dibawa oleh tentara Indonesia, kemudianditangkap lagi pada tahun 1984 oleh tentara dan dipenjarakan selamaempat tahun. Sesudah pembantaian Santa Cruz pada tahun 1991 beliau dipenjarakan lagi selama tujuh tahun.

Ketika ditanya oleh Wakil Ketua CAVR, pastor Juvito de Araujo, “Bagaimana perasaan anda sekarang jika melihat orang-orang dari partai UDT?” bapak Freitas menjawab:

“Jalan menuju perdamaian adalah rekonsiliasi. Negara kita dibangun dari darah dan tulang belulang. Ini saatnya untuk perdamaian ... pengalaman yang telah kita lalui pada waktu itu tidak boeh terulang lagi ... saya meminta orang-orang untuk mengingat orang-orang yang mati di pegunungan. Banyak orang dari masyarakat ingin mendengar dari partai-partai politik bersejarah. Kami tidak meminta banyak dari partai-partai. Lakukan pekerjaan anda dengan benar. Kami tidak ingin berperang lagi. Jika kalian ingin berperang lagi, serahkan kekuasaan kepada yang lain ... jika kalian mau memerintah, memerintahlah dengan baik, dengan rasa cinta terhadap rakyat ... kami tidak mau mati lagi ...”

Bapak Mario Carrascalão, pelaku utama

Bapak Mario Carrascalão adalah kepada Departemen Pertanian pada tahun 1975, dan merupakan seorang tokoh penting dari partai politik UDT. Dari 1982-1991 beliau menjadi Gubernur Timor Leste di bawah pemerintahan Indonesia. Beliau memberikan kesaksian selama lebih dari tiga jam pada siang pertama proses dengan pendapat.

Bapak Carrascalão menceritakan secara rinci tentang peristiwa-peristiwa tahun 1975, dan suasana politik di Timor dalam bulan-bulan pertama tahun 1975. Analisisnya tentang sebab-sebab timbulnya kekerasan dan pertikaian antara partai-partai politik Timor Leste mengkaji faktor-faktor eksternal dan internal. Beliau memulai kesaksiannya, bapak Carrascalão mengatakan:

“Saya sudah tua. Sebelum saya mati, adalah penting untuk membagi apa yang saya ketahui. Banyak orang yang tidak mengetahui apa yang terjadi ...”

Kesaksian bapak Carrascalão memberi perhatian utama pada periode sesudah perubahan rejim 25 April 1974 di Portugal yang mengarah pembentukan partai-partai politik di Timor, ketegangan antara partai-partai dalam bulan-bulan menjelang kekerasan bulan Agustus 1975, apa yang disebutnya gerakan anti komunis bulan Agustus oleh UDT serta tanggapan Fretilin, keadaan di kamp-kamp di Timor Barat ketika pengikut-pengikut UDT mengungsi menyeberangi perbatasan bulan September 1975 serta upaya-upaya rejim Indonesia untuk melegitimasi penyerbuannya dengan dokumen Integrasi pada tahun 1976.

Bapak Carrascalão mengatakan bahwa pada bulan April 1974, ketika terjadi Revolusi Bunga di Portugal, beliau sedang belajar di Portugal dan terlibat dalam kelompok yang mempersiapkan kejatuhan rejim Caetano. Karena ketertarikannya untuk mendirikan sebuah partai Politik di Timor, beliau merupakan ketua dari komite yang didirikan untuk membentuk partai UDT. bapak Carrascalão bersusah payah menyanggah pandangan bahwa dialah ketua pertama partai UDT, dengan menjelaskan bahwa hal ini merancukan peranannya sebagai ketua komite.

UDT didirikan, katanya, dengan tujuan semula untuk membentuk federasi dengan Portugal, dengan pikiran bahwa dalam 20 tahun Timor akan menjadi cukup matang dan berkembang untuk merdeka.

Dia mengatakan bahwa terdapat banyak faktor internal di balik memburuknya iklim politik di Timor di tahun 1975. Orang Timor pada dasarnya tidak mempunyai pengalaman politik apapun dalam sebuah proses yang terbuka dan demokratis; tidak ada pendidikan kewarganegaraan—Portugal gagal melakukan ini karena berkonsentrasi pada upaya untuk pergi secepat mungkin; beliau mengatakan bahwa para mahasiswa Timor Leste yang kembali dari Portugal mengubah partai Fretilin dari sebuah

partai moderat menjadi partai revolusioner yang melihat dirinya sebagai satu-datunya wakil rakyat Timor.”

Bapak Carrascalão menggarisbawahi pandangannya bahwa sejumlah kecil mahasiswa yang kembali dari Portugal, tujuh orang, mengubah arah partai ASDT menjadi Fretilin yang berfokus revolusioner. Ideologi, katanya, memecah belah orang Timor. “... Orang Timor tidak duduk bersama dan berkomunikasi satu dengan lainnya. Inilah masalahnya.”

Bapak Carrascalão berbicara tentang bagaimana di pegunungan terpencil Timor, masyarakat cenderung untuk setia kepada salah satu partai saja. “Di Maubisse,” katanya, “semua orang adalah pengikut UDT, di Uatu-lari semua orang Fretilin, di Uatu-caribau semua Apodeti ... Timor terpecah seperti ini.”

#####

Pada saat aksi UDT tanggal 11 Agustus, beliau sedang mengadakan perjalanan di daerah pegunungan di bagian tengah Timor Leste dalam rangka tugas, dan bahwa, “...pada tanggal 12 Agustus pada siang hari, saya mendengar di radio bahwa gerakan anti-komunis sekarang mengontrol seluruh wilayah Timor Leste.”

Dalam perjalanannya menuju Dili, Bapak Carrascalão menceritakan tentang sebuah kota yang sedang dalam keadaan genting.

“Saat saya tiba (di Dili), yang saya lihat hanyalah komandan militer yang memegang wewenang atas UDT, bukan pemimpin politik. Anak kecil dan orang tua memegang senapan dan melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan...kami melihat anak kecil, duabelas tahun, menyanggah senapan di jalan-jalan ...di Dili, rakyat terbagi menjadi dua, Fretilin mengontrol bagian timur, UDT mengontrol bagian barat ... saya melihat tidak ada pengorganisasian. Adik saya Joao mengepal (UDT). Beliau tidak tidur...rapat tidak diadakan. Tidak seorangpun berkonsultasi dengan saya tentang apa yang harus dilakukan. Setiap orang berbuat seenaknya saja.”

Ditanyai oleh Ketua CAVR, Bapak Aniceto Guterres Lopes, apa pendapat beliau tentang tujuan dari gerakan anti-komunis UDT, Bapak Carrascalão mengatakan bahwa tujuannya adalah untuk meminta agar Portugal datang dan menghentikan kegiatan Fretilin. Beliau melanjutkan bahwa tujuannya bukan untuk menangkap Fretilin, akan tetapi Fretilin bereaksi dan keadaan makin memburuk. Beliau mengakui bahwa para pemimpin Timor Leste gagal pada saat itu untuk duduk dan membahas tentang perselisihan-perselisihan di antara mereka.

Bapak Carrascalão berbicara tajam menentang komunisme dalam kesaksiannya. Beliau mengatakan bahwa saat UDT mengambil tindakan pada bulan Agustus 1975, “gerakan komunis belum menetapkan strukturnya. Masih dalam tahap dini saat kudeta terjadi.” Beliau menyatakan, “Saya bukan orang komunis.”

Bapak Carrascalão menekankan bahwa di Timor Leste pada saat itu terdapat banyak senjata yang berasal dari pemerintahan Portugis, “banyak sekali senapan ... tidak akan terpakai semuanya dalam jangka waktu lima tahun...” Dalam kesannya, pada saat itu polisi menyalurkan senjata pada UDT dan militer menyalurkannya pada Fretilin. Secara keseluruhan, terdapat 17.000 senapan yang dipegang oleh kedua belah pihak, yang pada dasarnya terlalu banyak dalam keadaan semacam itu.

Bapak Carrascalão menceritakan tentang larinya UDT ke Batugade sesudah Fretilin mengambil alih kekuasaan. Selama tembak-menembak pada malam hari antara UDT dan Fretilin, beliau menyaksikan untuk pertama kalinya, **tracer bullets** melintasi langit pekat. Beliau mengatakan bahwa pertama kalinya beliau menyadari bahwa peluru-peluru itu ditembakkan oleh pasukan Indonesia adalah sesudah tiba di Atambua, saat disadarinya bahwa senapan Portugis tidak seperti itu.

Beliau menceritakan tentang kehidupan di Atambua, dan penanda-tanganan Deklarasi Balibo yang memproklamkan integrasi Timor Leste ke dalam tubuh Republik Indonesia. Menurut Bapak Carrascalao, terdapat dua pemikiran yang berbeda. UDT, menurut beliau, ingin meminta Indonesia

untuk datang menciptakan kondisi menuju demokrasi di Timor Leste.” Namun Bakin, badan intelijen Indonesia menginginkan integrasi sepenuhnya. Pemikiran Bakin inilah yang “dilaksanakan dan diumumkan lewat radio” sebagai Deklarasi Balibo.

Bapak Carrascalão menyatakan bahwa sesudah invasi, sebuah badan yang dinamakan majelis rakyat diselenggarakan di Dili untuk merealisasikan isi dari deklarasi tersebut. Kemudian, deklarasi ini dibawa kepada Presiden Indonesia, Suharto. Menurut Bapak Carrascalao, Presiden Suharto tidak begitu mempercayai dokumen ini, sehingga sebuah kunjungan diadakan oleh sebuah delegasi, termasuk sejumlah diplomat dari India dan Iran.

Menjelang akhir kesaksiannya, Bapak Carrascalão merefleksikan tentang masalah-masalah keadilan dan rekonsiliasi.

“Tugas CAVR untuk menciptakan rekonsiliasi adalah sesuatu yang tidak mudah... saya kira untuk mendapatkan rekonsiliasi, kita membutuhkan keadilan. ... Apakah hal ini patut disampaikan pada penduduk dalam sebuah referendum, atau perlu ditanyakan pada parlemen, apakah kita hanya menginginkan rekonsiliasi? Atau rekonsiliasi sekaligus keadilan? Dalam hemat saya, secara pribadi, mereka yang membuat kesalahan harus dihukum, sesuai dengan prinsip internasional.”

Bapak Monis da Maia, dari Manufah District

Bapak Monis da Maia berasal dari bagian selatan distrik Same. Beliau menggambarkan peristiwa pasca-pengambilalihan kekuasaan oleh UDT pada bulan Agustus 1975, kemudian apa yang terjadi sesudah Fretilin yang mengambil alih kekuasaan pada bulan yang sama dan masa sesudah invasi Indonesia pada bulan Desember. Sekali lagi, riwayat yang diceritakan oleh beliau menunjukkan betapa buruknya perlakuan terhadap tahanan-tahanan oleh partai-partai politik di Timor-Leste pada saat itu.

Bapak da Maia menceritakan bahwa saat UDT mengambil alih kekuasaan, beliau dipanggil untuk datang ke suatu kantor pada tanggal 11 Agustus. Di situ, anggota-anggota UDT mengatakan pada beliau, “sekarang kamu tidak bisa merespon apa-apa, karena dari timur ke barat, seluruh negara ini sudah UDT semua.” Saat Fretilin memasuki Same pada tanggal 27 Agustus, menurut beliau, orang-orang UDT melarikan diri ke arah timur, tetapi beliau dan orang-orang lain tidak melarikan diri karena ingin melihat kedatangan pasukan.

Menurut beliau, prajurit Fretilin melihatnya di jalan raya dan mulai memukulinya. Dalam keadaan tidak sadar, beliau dibawa ke sebuah sekolah yang digunakan sebagai sebuah tempat tahanan. Beliau menceritakan tentang pembunuhan tahanan di tempat itu dan bagaimana para tahanan dipukuli secara reguler. Beliau juga mengingat bahwa suatu saat beliau dikira telah meninggal, sesudah dipukuli habis-habisan.

Bapak da Maia menceritakan tentang apa yang dinamakan “keadilan rakyat” selama masa itu, ketika Fretilin membawa para tahanan ke hadapan penduduk untuk dituduh dan dihukum. Beliau mengatakan bahwa para tahanan yang mendapat tuduhan-tuduhan berat dibawa ke penjara di Aileu. Meski masyarakat hanya menuduhnya menggunakan kata-kata kasar, beliau menceritakan bahwa dirinya turut dibawa ke Aileu pada tanggal 9 Oktober dan dalam perjalanan, para tahanan dipukuli. Mereka dipukuli juga saat tiba di Aileu.

Dengan tibanya militer Indonesia di Dili pada bulan Desember, beliau mengatakan bahwa makin banyak tahanan yang tiba di Aileu dari Dili. Saat pesawat Indonesia menyerang Aileu pada tanggal 27 Desember, menurutnya mereka berangkat jalan kaki menuju Maubisse di sektor tengah. Beliau menyatakan bahwa mereka berjalan terus meski hujan sepanjang malam. Pada malam hari, “beberapa orang dibunuh ... pada tikungan jalan menuju Turiscaí.” Dari Maubisse mereka melanjutkan terus menuju Same di sebelah selatan. Di Same, para tahanan ditempatkan di sebuah rumah. Bapak da Maia menceritakan bagaimana pada suatu hari beliau dan orang-orang lain dimasukkan ke dalam sebuah

mobil, ditutup matanya dan mobil itupun berangkat. Di pinggir jalan, mobil berhenti dan para tahanan ditembak satu per satu.

“... Saya berlutut, menutup mata dan menyerahkan diri pada Tuhan. Senjata ditujukan ke arah saya. Saat saya selesai berdoa, saya ditembak dan saya jatuh ke tanah. Saya heran bagaimana peluru itu hanya melukai bagian belakang kepala saya ...ada delapan orang yang dibawa untuk dibunuh, enam tewas di tempat ...”

Bapak da Maia merangkak pergi dan kemudian disembunyikan oleh sanak keluarga. Beliau menceritakan bagaimana pada tanggal 29 Januari 1976, beliau mendengar bunyi senapan di Same Kota. “Saya berpikir ABRI dan Fretilin sudah mulai kontak senjata, tetapi ternyata tidak. Apa yang sedan terjadi adalah pembunuhan tahanan (yang ditahan oleh Fretilin) di Sekolah Dasar.” Pada bulan 1976, Bapak da Maia menyerah pada militer Indonesia.

Mayor Jendral Mario Lemos Pires, pelaku utama

Mayor Jendral Mario Lemos Pires adalah gubernur Portugis terakhir di Timor-Leste, dikirim oleh Pemerintah Portugis sesudah perubahan pemerintahan pada bulan April 1974 untuk mengawasi proses dekolonisasi. Beliau pada saat itu berusia 44 tahun dan tiba sebagai Gubernur dan Panglima Besar Angkatan Bersenjata Timor Leste, sebagai wakil dari *Movimento das Forcas Armadas* dan satu-satunya sumber kekuasaan legislatif.

Beliau menyumbangkan tulisannya pada dua laporan resmi Pemerintah Portugal tentang dekolonisasi Timor-Leste dan menerbitkan tulisan tentang apa yang terjadi pada tahun 1974-75 dalam bukunya *Decolonizacao de Timor: Missao Impossivel?*

Kesaksian Mayor Jendral Lemos Pires direkam di Portugal, sebagaia sebuah wawancara dengan Komisaris Nasional Jacinto Alves pada bulan September. Beliau memberikan kesaksiannya sebagai tanggapan secara umum terhadap berbagai pertanyaan dan isu yang dikemukakan oleh CAVR sebelum wawancara direkam. Beliau kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik yang dikemukakan oleh Komisaris Nasional Jacinto Alves. Ini adalah pertama kalinya beliau mengutarakan pendapatnya terhadap rakyat Timor tentang peristiwa-peristiwa bersejarah. Mayor Jendral Lemos Pires berbicara dengan wibawa, dan menunjukkan bahwa beliau memahami secara mendalam isu-isu yang dibahas dan tentang Timor-Leste.

Beliau memulai dengan membicarakan tentang faktor-faktor eksteren yang mempengaruhi proses dekolonisasi. Beliau menekankan bahwa keputusan Portugal untuk meninggalkan Timor-Leste disebabkan oleh pecahnya revolusi, dan bukan karena adanya persetujuan antara pemerintah dan partai-partai oposisi.

“Saya menekankan hal ini karena tidak seorangpun di Timor-Leste bersedia menerima informasi seperti ini. Tidak ada tuntutan politik semacam ini di Timor-Leste, rakyat Timor tidak siap secara politik menghadapi situasi seperti ini ... karena alasan yang sama, Portugal tidak siap untuk meninggalkan Timor-Leste, Portugal tidak mempunyai kebijakan dekolonisasi, dan lebih buruk dari itu, semua negara di dunia yang mendorong Portugal untuk meninggalkan Timor-Leste, tidak membantu kami melaksanakannya.”

Dalam menggambarkan misinya di Timor-Leste, Mayor Jendral Lemos Pires merujuk pada terbatasnya sumber daya yang tersedia untuk proses dekolonisasi tersebut, dan keprihatinan Portugal dalam menerima 500,000 orang Portugis dari daerah-daerah mantan jajahan Portugis di Afrika.

“Saya meninggalkan Timor-Leste dengan keyakinan bahwa bantuan yang akan saya terima dari pemerintah Portugis akan sangat terbatas, dan lebih buruk lagi, bahwa fokus politik di Portugal terhadap proses di Timor Leste minimal. Ternyata saya benar.”

Beliau menceritakan tentang Portugal sesudah revolusi tahun 1974, dan bahwa situasi pada saat itu tidak menguntungkan bagi proses di Timor-Leste.

“Pasca revolusi, bangsa Portugis yang muncul dari proses itu sangat lemah, tidak bersatu, dan mendapatkan banyak kesulitan serta tidak mempunyai kredibilitas di antara sekutu-sekutunya (dari Barat). Seluruh bangsa sangat khawatir tentang revolusi dan mencoba

berupaya memperoleh stabilitas politik, memperhatikan mereka yang tiba dari Afrika dan memutuskan secara tegas untuk menghentikan perang di negara-negara Afrika...

“Apa pendapat rakyat Portugis tentang Timor-Leste pada tahun 1974, pasca revolusi? Tidak terpikir sama sekali, tidak banyak, sedikit. Tidak terpikirkan. Pikiran mereka terpusatkan pada revolusi dan sanak keluarganya di daerah-daerah di Afrika...”

Tentang partai-partai politik dan kehidupan politik pada tahun 1974-75 di Timor Leste, beliau mengatakan,

“... Partai-partai politik lahir berkat revolusi, fenomena ini bukanlah hasil dari proses pembelajaran yang terjadi di daerah-daerah jajahan di Afrika di mana perang menciptakan berbagai politisi yang berbobot, yang nantinya terjadi juga di Timor-Leste selama invasi Indonesia. Partai-partai politik ini diciptakan oleh warga Timor yang mengorganisir diri dan mulai mendapatkan ide-ide politiknya. Jelas bahwa mereka sangat tidak matang dan hal itu sangat membahayakan.

“Kurang adanya persiapan menuju kehidupan berdemokrasi, pada saat kesempatan ini pertama diajukan pada Timor-Leste ... Tidak ada yang mempersiapkan orang Timor, maupun mempersiapkan partai-partai tersebut, untuk kegiatan politik. Bagaimana mereka dapat dipersiapkan? ... Revolusi pada saat itu tidak meminta adanya waktu untuk mempersiapkan para pemimpin Timor sebelum memberitahukan pada mereka bahwa negaranya akan merdeka.”

Beliau menekankan bahwa telah nampak pada tahun 1975 bahwa partai-partai besar hanya UDT dan Fretilin pada saat itu di Timor, Kota dan Trabalhista adalah “partai-partai elit kecil tanpa dukungan dari rakyat,” dan bahwa Apodeti tidak mempunyai dukungan kuat, bahwa “para pemimpinnya mempunyai hubungan dekat dengan Konsul Indonesia dan kadang sulit dimengerti siapa yang memimpin partai tersebut ... orang Timor atau Bapak Tomodok.”

“Orang Timor menjalani proses ini tanpa rasa terkejut dan dengan agak tanpa arah, banyak di antara mereka yang menjadi anggota partai tanpa mengetahui ideologi partai itu ... banyak yang menjadi anggota partai tertentu karena persahabatan atau karena mereka dihubungi partai itu pada tahap awal ... para pemimpin tradisionallah yang mungkin paling terkejut, karena telah terbiasa hidup dalam suasana yang stabil di bawah pemerintahan Portugis ...”

Berbicara tentang pihak internasional, poin utama yang ingin disampaikan oleh Mayor Jendral Lemos Pires adalah bahwa “PBB... seharusnya diberikan peran utama dalam proses ini.” Beliau menyatakan bahwa beliau telah meminta pada Pemerintah Portugis akan adanya misi PBB di Timor-Leste, tetapi pemerintah Portugis tidak pernah menyampaikan permintaan beliau. Beliau mengatakan bahwa perhatian Portugal terpusatkan pada proses dekolonisasi Afrika, di mana mereka tidak menginginkan keterlibatan PBB.

Mayor Jendral Lemos Pires mencatat bahwa that negara-negara sekutu Portugal di Barat dan Amerika Serikat “berperanan penting dalam proses ini. Mereka mengetahui tentang invasi Indonesia dan mereka menerima invasi itu.” Beliau mengatakan bahwa Australia berperanan negatif terhadap proses itu, “yang paling penting bagi mereka adalah agar Timor-Leste tidak menjadi titik ketidakstabilan yang akan memprihatinkan Indonesia.”

Tentang Indonesia, beliau mengatakan,

“dalam pendapat saya ... Indonesia memutuskan bahwa integrasi Timor Leste bukan solusi politik terbaik tapi merupakan solusi satu-satunya. ... Dari saat perjanjian dibuat antara UDT dan Fretilin, seluruh tindakan Indonesia memburuk sejak saat itu. Indonesia tidak menerima kemerdekaan sebagai solusi politik Timor-Leste.”

Mayor Jendral Lemos Pires kemudian memeriksa berbagai faktor internal yang berdampak terhadap proses dekolonisasi.

Dalam posisinya sebagai Komandan militer, Mayor Jendral Lemos Pires mengatakan bahwa sementara militer dapat dijadikan jaminan keamanan, “apa yang saya temukan pada bulan November 1974 adalah bahwa mereka lebih menjadi risiko terhadap keamanan”. Menurut beliau, para prajurit terpengaruh oleh revolusi di Portugal dan pemikiran bahwa telah tiba saatnya prajurit Portugis meninggalkan daerah-daerah jajahan. Beliau mengatakan bahwa prajurit Timor, meski adalah prajurit yang baik, turut terpengaruh oleh revolusi karena mereka adalah warga Timor dan mempunyai pandangan masing-masing tentang partai-partai politik.

“Setiap prajurit ingin bersikap memihak, tapi hal yang paling buruk adalah bagaimana partai-partai, terutama UDT dan Fretilin, mencoba meyakinkan tiap prajurit untuk membantu dan mendukung masing-masing partai. Dengan demikian, saya berpendapat bahwa militer pada saat itu tidak dapat menjalankan tugasnya.”

Pengorganisasian kembali militer adalah bagian dari proses dekolonisasi. Akan tetapi, menurut beliau permintaannya untuk didatangkannya dua kompi pasukan, ditanggapi dengan datangnya dua kesatuan pasukan payung yang jumlahnya kurang dari 70 orang. Beliau mengatakan, “inilah satu-satunya kelompok yang bisa saya andalkan...”

Selain itu, menurut Mayor Jendral Lemos Pires, salah satu kekhawatiran baginya adalah bahwa selama proses dekolonisasi, termasuk saat beliau meninggalkan Dili menuju Atauro, tujuannya adalah bagaimana mencegah konflik antara prajurit Portugis dan Timor.

Beliau menjelaskan tentang penerapan proses dekolonisasi. Peraturan pemerintahan dirubah, undang-undang baru dikeluarkan dan diadakan pemilihan tingkat daerah. Sistem pendidikan juga direncanakan akan diubah.

Menurut beliau, pembentukan koalisi penting, terutama karena UDT dan Fretilin adalah partai-partai utama yang membicarakan rencana undang-undang dekolonisasi, yang menurut beliau, mempersiapkan jalan menuju ‘pemerintahan transisi yang sangat mirip dengan pemerintahan transisi yang diciptakan pada tahun 2000 di bawah UNTAET.’ Beliau mencatat bahwa undang-undang ini disetujui pada tanggal 17 Juni 1975, “tetapi tidak diterapkan karena situasi politik di Portugal.”

“Menghadapi proses dekolonisasi, dengan program kerja yang spesifik serta maksud tegas untuk mengalihkan pemerintahan pada pemerintah Timor Leste dalam jangka waktu tiga tahun yaitu pada tahun 1978, Indonesia mengambil berbagai tindakan subversif untuk mencegah berjalannya proses menuju kemerdekaan itu ... Pasukan Indonesia seringkali menyelusup masuk melalui perbatasan, mereka mengadakan pameran di konsulat untuk mempertunjukkan kekuatan militernya ... dan mereka menciptakan serangkaian skenario untuk menunjukkan bahwa semua yang terjadi di Timor-Leste dipicu oleh komunis.”

Tentang apa yang dinamakan beliau kudeta UDT, Mayor Jendral Lemos Pires menggarisbawahi bahwa UDT melakukannya “dengan menggunakan senjata yang dicuri dari markas besar kepolisian tanpa letusan satu pun tembakan.” Beliau mengakui tidak pernah mendapat peringatan akan adanya kudeta itu, dan menyatakan bahwa kudeta tersebut menghentikan proses dekolonisasi. Beliau berangkat menuju Atauro tanpa memberikan penjelasan, menurutnya untuk mencegah pertikaian bersenjata akibat tindakannya dan untuk mencegah peperangan antara orang Timor dan orang Portugis.

Mayor Jendral menyatakan bahwa beliau seringkali ditanyai mengapa kekerasan tidak digunakan untuk menangani kudeta UDT. Menurutnya, prajurit Timor tidak bisa dikerahkan, akibat aliansinya dengan berbagai partai politik. “Dalam pendapat saya, perintah saya akan diabaikan oleh mereka.” Beliau juga mengatakan bahwa beliau mengkhawatirkan Indonesia dapat menyalahgunakan kesan seakan-akan Portugal berjuang bersama dengan Fretilin untuk mengalahkan UDT, demi mendapatkan alasan untuk mengadakan intervensi ke Timor Leste “untuk mencegah majunya kaum komunis dalam sejarah.” Menurut beliau, UDT meminta agar beliau menandatangani perjanjian tentang kerja sama antara Portugal dan UDT untuk memerangi kaum komunis. “... Apa konsekwensinya apabila seorang gubernur Portugis membuat aliansi politik dengan salah satu partai di tengah-tengah proses

dekolonisasi? Yang paling mungkin terjadi adalah Fretilin melarikan diri ke hutan untuk memulai perang gerilya....”

Ada beberapa pelajaran yang dapat diambil dari tahun 1975, menurut Mayor Jendral Lemos Pires. Beliau menekankan kurangnya dukungan terhadap Timor-Leste dari negara-negara sekutu Portugal hingga tahun 1999. Beliau menekankan bahwa penggunaan kekerasan yang tidak legitim, seperti oleh UDT, oleh militer Indonesia, akan selalu membuahkan kekerasan yang sekali digunakan, “tidak dapat direm, tidak ada batasnya dan melanggar hak asasi manusia.” Beliau mendorong mereka yang duduk dalam pemerintahan untuk menggunakan dialog, daripada kekerasan dalam memecahkan masalah. Mereka “harus berhati-hati dan berpikir terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai solusi, dan jika memutuskan demikian, harus ada alasan yang legitim. Apabila tidak legitim, itu bukan menunjukkan ketegasan, melainkan hanya kekerasan semata.” Beliau mendesak polisi dan militer agar “menjauhi partai-partai politik.” Beliau mencatat bahwa “ini adalah tanggung jawab besar bagi militer, tapi... tanggung jawab lebih besar lagi bagi para politisi.”

Menekankan pentingnya pendidikan kewarganegaraan bagi semua orang Timor, pada proses memperkuat lembaga-lembaga demokratik di Timor, dan pada pelatihan etika bagi militer, Mayor Jendral Lemos Pires menutup dengan menyatakan bahwa “yang paling penting sekarang di Timor terdapat rasa solidaritas, persatuan dan kebangsaan ... dan Timor Leste seharusnya dan nampaknya adalah suatu tempat yang stabil, damai dan bebas ...”

Bapak Mari Alkatiri, pelaku utama

Bapak Mari Alkatiri memberikan kesaksiannya pada tanggal 16 Desember. Bapak Alkatiri lahir di Dili pada bulan November 1948. Orang tuanya adalah anggota komunitas Arab di Dili dan berasal dari Yemen Selatan. Beliau dididik di Sekolah Mesjid di Dili, di sebuah sekolah negeri Portugis dan di Liceu Dili. Pada bulan Januari, beliau adalah salah seorang pendiri kelompok klandestin anti-kolonial di Dili dan dalam tahun itu juga, beliau berangkat menuju Angola untuk mempelajari pengukuran tanah. Beliau adalah pendiri Komite Sentral Fretilin, berperhatian khusus terhadap urusan politik dan diplomatik, terutama berkaitan dengan dunia Afrika dan Arab. Beliau dikirim keluar dari Timor-Leste pada bulan Desember 1975 pada ambang invasi Indonesia untuk menyebarkan informasi tentang Timor-Leste di seluruh dunia. Selama bertahun-tahun, beliau menjabat sebagai anggota senior dari misi diplomatik Fretilin. Beliau bekerja sebagai guru besar bagian hukum internasional di Universitas Eduardo Mondlane di Mosambik. Beliau adalah Sekretaris Jendral Fretilin dan sejak 2002, menjabat sebagai Perdana Menteri RDTL.

Bapak Alkatiri memberikan kesaksiannya sebagai pelaku utama dalam periode sejarah ini, bukan sebagai Perdana Menteri. Beliau memulai dengan mengatakan:

“Saya telah berpikir banyak tentang peran saya di sini sebagai salah satu perantara dalam proses ini. Banyak sekali rekan-rekan saya yang telah meninggal dan tidak dapat berbicara. Saya merasa penting sekali bahwa saya berbicara hari ini. Banyak sekali yang meninggal karena dua kelompok bertikai. Jadi kita perlu bertanya, bagaimana konflik ini bisa terjadi?”

Sebagian besar dari kesaksian Bapak Alkatiri adalah refleksi dari pertanyaan ini. Beliau memfokuskan perhatian pada faktor internal maupun eksternal yang terdapat pada saat itu, termasuk saat-saat menentukan, dan juga perorangan dan negara-negara penting.

Bapak Alkatiri menceritakan bahwa sekelompok kecil mulai aktif berpolitik di Timor pada tahun 1970, bertujuan untuk mulai mengembangkan kegiatan-kegiatan melawan kolonialisme Portugis. Dari kelompok kecil ini, menurut beliau, kelompok politik ASDT dibentuk pada tanggal 20 Mei 1974. Beliau merefleksikan bahwa beliau adalah satu-satunya pendiri kelompok ini yang masih hidup.

Beliau menceritakan tentang masa saat UDT dan Fretilin mungkin masih bisa bekerja sama, kemudian tentang koalisi yang gagal antara kedua partai pada tahun 1975, tentang masa menjelang pengambilan alih kekuasaan oleh UDT pada tanggal 11 Agustus 1975 dan tentang tanggapan Fretilin terhadap hal itu. Beliau juga membahas tentang saat Fretilin telah mengambil alih kekuasaan dari UDT dan

mengontrol Timor, dan tentang situasi di hutan sesudah invasi besar-besaran di Dili oleh Indonesia pada bulan Desember tahun itu.

Meski beliau mengakui tentang kesempatan yang terlewatkan dan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok politik Timor, poin utama yang dikemukakan oleh Bapak Alkatiri adalah bagaimana campur tangan dari luar menjadi faktor utama di balik konflik tahun 1975. Kata-kata penutup beliau adalah "... seandainya tidak ada campur tangan dari luar, tidak akan ada perang ..."

Beliau mengatakan bahwa dalam pendapatnya, sejak tanggal 25 April 1974, penjajahan Portugis sudah tidak relevan lagi, bahwa ancaman dari penjajah baru, yaitu Indonesia, yang merupakan faktor inti. Dengan ini, beliau menyangkal konsep bahwa Fretilin berubah berkat kedatangan para mahasiswa yang selesai kuliahnya di Portugal pasca Revolusi Bunga tahun 1974 di Portugal. Menurutnya, Fretilin, 'berubah karena realita dalam negeri dan regional,' yaitu ancaman penjajahan baru oleh Indonesia.

Dalam konteks inilah, dan karena apa yang menurutnya adalah dukungan Portugal bagi kolonialisme baru inilah, sebab dibubarkannya ASDT, menurut Bapak Alkatiri dan kemudian dibentuklah Fretilin. Beliau berkata bahwa sebuah front dibentuk demi menggalang kesadaran patriotik, serta untuk mempersiapkan rakyat melawan, seandainya Indonesia menyerang Timor.

Beliau mengatakan bahwa pada tahun 1974, ASDT telah berupaya bekerja sama dengan UDT untuk membentuk kebijakan nasional bersama demi menghadapi situasi ini, tetapi UDT tidak menanggapi tawaran ini. Membicarakan tentang koalisi singkat antara UDT dan Fretilin pada bulan Januari-Februari 1975 waktu itu, beliau mengatakan bahwa kerja sama ini gagal oleh karena kurangnya aturan kerja praktis yang dapat menangani perselisihan pendapat yang muncul dalam koalisi tersebut: "... dengan tidak adanya metode yang riil ... atau cara untuk memecahkan konflik, koalisi itu pun mati."

Beliau menceritakan tentang hari-hari menjelang pengambilan alih kekuasaan oleh UDT pada tanggal 11 Agustus. Memikirkan tentang bagaimana tumpahnya kekerasan, beliau menceritakan tentang pembunuhan Domingos Lobato, pemimpin Fretilin dan sekaligus adik laki-laki Nicolau Lobato pada tanggal 8 Agustus 1975. Beliau mengatakan bahwa Nicolau Lobato melepaskan pembunuh adiknya tersebut tanpa balas dendam. Menurut beliau, hal ini menunjukkan kepribadian Nicolau Lobato.

Bapak Alkatiri memikirkan tentang sebab di balik tindakan UDT pada tanggal 11 Agustus itu. Beliau menceritakan bagaimana beliau dan Bapak Joao Carrascalão sekarang berhubungan baik, tentang waktu yang mereka habiskan pada malam hari di sebuah hotel di New York, selama penjajahan Indonesia, berdiskusi tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat itu. Beliau mengatakan bahwa Bapak Joao Carrascalão menceritakan padanya bahwa waktu delegasi kembali dari pertemuan di Maucau pada bulan Juli 1975, delegasi itu berhenti di Jakarta dan Bali sebelum kembali ke Timor Leste. Beliau mengatakan bahwa Bapak Joao Carrascalão menceritakan bagaimana mereka bertemu dengan Menteri Pertahanan Malaysia, yang menawarkan untuk membantu UDT apabila UDT dapat mengalahkan Fretilin.

"Adalah kebohongan besar kalau ada orang yang berkata bahwa UDT menyerang Fretilin karena mereka komunis. Chico Lopes menginginkan integrasi. Lopes berubah pikiran, dan menjadi seorang duta besar Indonesia. Di antara orang-orang UDT, hanya Joao Carrascalão yang aktif secara politik sebelum tahun 1974. Joao Carrascalão mengatakan bahwa jika para komunis pergi dari Timor-Leste, Indonesia tidak akan mengganggu Timor lagi. Beliau berkata demikian pada saya. Beliau mengatakan bahwa nanti kalau kita sudah mendapatkan kemerdekaan, mereka semua bisa kembali. Beliau betul-betul percaya hal itu. Tapi siapakah yang komunis? Mahasiswa? Nama saya muncul pada daftar itu dan saya belum pernah ke Portugal ... Saat kejadian 11 Agustus meletus, Indonesia mengira bahwa UDT sudah menang. Radio Kupang menyiarkan bahwa UDT adalah komunis pro-Soviet, dan Fretilin komunis pro-China. Rekan-rekan, komunis atau bukan komunis, Indonesia akan datang juga ..."

Beliau mengatakan bahwa pada tanggal 17 Agustus, para pemimpin Fretilin tiba di markas besar militer di Aileu, dan pada saat ini, "kami masih berniat berdialog dengan UDT." Sekali lagi, beliau bertanya, "Kenapa kami tidak dapat mencapai solusi damai dengan UDT pada saat itu?" dan menjawab

bahwa Fretilin sudah menerima berita bahwa pasukan UDT telah bersiap siaga di Los Palos, dan bahwa dengan demikian, kalau tidak melawan, satu-satunya yang akan terjadi adalah “menunggu untuk ditangkap di Aileu.”

Bapak Alkatiri mengatakan bahwa tindakan Fretilin pada tanggal 20 Agustus bukan merupakan suatu kontra-kudeta. Beliau mengatakan bahwa tindakan itu tidak ditujukan terhadap UDT.

“... Tidak ada kontra-kudeta. Tindakan itu tidak ditujukan terhadap UDT, sebenarnya itu adalah suatu reaksi terhadap serangan yang lebih besar lagi ... UDT sebenarnya hanyalah semacam perantara...”

Menurutnya, sesudah Fretilin mengambil alih, Komite Sentral membentuk suatu komite baru untuk mempertimbangkan keadaan orang-orang Fretilin yang sedang ditahan di penjara. Beliau mencatat bahwa Fretilin memenjarakan baik anggota UDT maupun Fretilin. Anggota Fretilin yang ditahan adalah mereka yang kelakuannya dianggap “berlebihan”. Beliau mengatakan bahwa dalam penjarapenjara tersebut, tidak ada pelanggaran hak asasi manusia dan Palang Merah Internasional diperbolehkan mengunjungi penjara-penjara tersebut, dan juga bahwa hal ini menunjukkan orang Timor sendiri mampu menangani masalah yang mereka hadapi. “Oleh karena itu, saya mengatakan bahwa kalau tidak ada campur tangan dan tekanan dari luar, masalah ini bisa diselesaikan dalam masa yang singkat saja.”

Saat diminta untuk memikirkan tentang dampak terhadap HAM dari peristiwa-peristiwa di atas, Bapak Alkatiri mengajukan beberapa komentar penting. Beliau mengakui bahwa konflik antara kedua partai terbawa-bawa ke pedesaan, di mana banyak orang yang terbunuh. Beliau juga mengakui tentang pembunuhan massal yang dilakukan oleh Fretilin, yang membawa orang dari Dili ke Aileu dan Same di mana mereka dibunuh.

“Jika saya mendengarkan orang yang datang mengunjungi saya dan mereka berkata ‘adik saya dibunuh oleh Fretilin karena beliau dipanggil pengkhianat. Kami ini pengkhianat atau tidak?’ Saya tahu bahwa masalah ini perlu diselesaikan.

“Pelanggaran HAM memang terjadi ... Fretilin menyatakan bertanggung jawab atas hal-hal positif dan juga negatif dalam masa lalunya... Saya sendiri tidak melanggar HAM seseorangpun. Sebagai seorang yang turut serta dalam proses di masa lalu itu, saya tidak melanggar HAM ... Saya tidak mengenal mereka yang melakukan pembunuhan terhadap mereka di Aileu dan Same ... (tetapi) Fretilin sebagai sebuah organisasi harus menyatakan bertanggung jawab atas pembunuhan yang terjadi di Aileu dan Same. Mereka yang melakukannya adalah orang-orang dari Fretilin ... sebagai sebuah organisasi politik, Fretilin menyatakan bertanggung jawab ... Fretilin telah membentuk sebuah Komisi untuk Persatuan dan Toleransi untuk menginvestigasi tentang pembunuhan tersebut – siapa yang membunuh dan siapa yang dibunuh? Kami harus bertanggung jawab.

“Dalam politik, kita harus bertanggung jawab secara kolektif ...kalau kita tidak berkuasa, kita harus bertanggung jawab secara politik ... saya sendiri tidak tahu siapa yang melakukannya dan siapa yang memerintahkan dilakukannya pembunuhan tersebut – kalau saya tahu, saya akan membeberkannya pada CAVR, tidak dalam suatu Dengar Pendapat, tapi akan saya ungkapkan pada CAVR.”

Dalam penutupan pada akhir kesaksiannya, Bapak Alkatiri mengutarakan beberapa poin utama. Beliau mengatakan bahwa sementara faktor-faktor internal memperburuk kekerasan yang terjadi, faktor-faktor eksternal lebih penting. Beliau mencatat bahwa terdapat suatu aliansi internasional antara Lisboa, Jakarta, Canberra dan Washington mendorong terjadinya integrasi, dan Lisbon tidak mempersiapkan proses dekolonisasi secara matang mengingat pemerintahannya sendiri sedang berantakan pada saat itu. Namun beliau juga mengakui bahwa orang Timor sendiri seharusnya mencoba dengan lebih kuat lagi untuk mencari jalan keluar dari masalah yang mereka alami, sebelum memilih menggunakan kekerasan, mencatat bahwa “memulai perang itu mudah, tapi menyelesaikannya sulit sekali.”

Dr. Jose Ramos Horta, pelaku utama

Hari kedua Dengar Pendapat berakhir dengan kesaksian Dr Jose Ramos Horta. Jose Ramos Horta lahir pada bulan Desember 1949. Sesudah tamat sekolah dari Liceu di Dili, beliau bekerja sebagai seorang jurnalis pada surat kabar *A Voz de Timor* dan adalah salah satu pendiri kelompok klandestin pada tahun 1970. Beliau diasingkan di Mosambik pada tahun yang sama karena dituduh mengkritik rezim Portugis. Beliau memulai bekerja kembali sebagai seorang jurnalis di Timor pada tahun 1972 dan memainkan peran penting dalam didirikannya ASDT, yang kemudian menjadi Fretilin. Beliau mengadakan perjalanan ke Australia dan Indonesia untuk mendapatkan dukungan bagi kemerdekaan. Sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 November, 1975 beliau diangkat sebagai Menteri Urusan Luar Negeri dan Informasi Eksternal dan dikirim keluar dari Timor pada awal bulan Desember untuk menyebarkan secara global isu tentang Timor Leste, terutama di PBB. Bersama Uskup Belo, beliau dianugerahi Hadiah Nobel untuk Perdamaian pada tahun 1996. Beliau menjadi Menteri Urusan dan Kerja Sama Luar Negeri RDTL pada tahun 2002. Beliau menulis *Funu: The Unfinished Saga of Timor Leste*.

Dr Ramos Horta memberikan analisa tajam tentang situasi geopolitik bagi Timor pada tahun 1974-75, dan diktat realpolitik pada saat itu. Beliau juga memberikan kesaksian yang penting tentang konteks politik dan sosial dan peristiwa-peristiwa di Timor selama masa itu.

Demikian kata-kata pembukaan Dr Horta:

“Kita perlu mempelajari sejarah kita. Bukannya karena kita dapat mencuci bersih apa yang telah terjadi ... tapi demi mengakui kesalahan-kesalahan kita, mengetahui kebenaran ...”

Dr Horta kemudian memusatkan perhatian pada konteks geopolitik pada saat itu, yang menurutnya, berpengaruh kuat terhadap apa yang terjadi di Timor. Dalam membahas Revolusi Bunga di Portugal pada tahun 1974, beliau menekankan tentang Perang Dingin dan mengatakan bahwa kalau tidak karena hal ini, situasi di Timor tidak akan seperti itu. Beliau menekankan juga bahwa dalam konteks internasional ini, orang di seluruh dunia menderita akibat konflik antara Amerika Serikat dan Uni Soviet.

Menurut beliau, apa yang terjadi di Indocina mempengaruhi pemikiran di Washington tentang Timor. Sebagai contoh, Washington menganggap MPLA di Angola sebagai boneka Uni Soviet, dan ribuan orang tewas dalam konflik yang terjadi di sana. Beliau mengatakan bahwa meski dengan adanya segala faktor di atas, Uni Soviet tidak pernah menginjakkan kaki di Timor, karena Uni Soviet hanya melakukan intervensi di negara-negara yang berkaitan dengan kepentingan strategisnya dan tujuan utamanya yaitu mencegah menguatnya pengaruh Republik Rakyat Cina di Indonesia.

Dr Horta membahas faktor-faktor internasional utama lainnya. Sementara Revolusi Bunga telah berjalan baik dan dengan damai, beliau mencatat bahwa keadaan ini tidak berlangsung lama. Portugal menjalin hubungan baik dengan Uni Soviet dan Kuba – membuat Washington sangat gugup, dan mereka mulai giat mengganggu kestabilan Portugal. Ini mengurangi kemampuan Portugal untuk menangani masalah Timor secara efektif.

Dr Horta juga memusatkan perhatian pada Indonesia, dan upaya-upaya Timor yang gagal untuk meyakinkan Indonesia bahwa sebuah Timor yang merdeka bukanlah sebuah ancaman.

“Pada tanggal 15 Juni 1974, sesudah dibentuknya ASDT, saya ditugaskan oleh para pemimpin kita...untuk bertolak ke Jakarta...bukan ke negara-negara lain. Mengapa ke Jakarta untuk memulai kegiatan diplomatik kita? Because kami mengetahui bahwa banyak hal yang tergantung pada Jakarta ... Saya bertemu dengan Adam Malik (Menteri Luar Negeri pada saat itu) ...Saya menerima surat dari beliau menyatakan ‘Indonesia menghormati hak Timor untuk menentukan nasibnya sendiri.’ ... Inilah pendapat Adam Malik. Pendapat militer lain lagi ... siapa militer? Ali Murtopo adalah pemimpinnya... Adam Malik sudah terasing pada saat itu ...

“Yang paling dipikirkan oleh Indonesia pada saat itu adalah, apakah Timor akan mendapatkan kemerdekaan? Mereka tidak mau apabila Timor merdeka, di bawah Fretilin

atau tidak. Mengapa? Karena apabila Timor merdeka, hal itu merupakan contoh bagi daerah-daerah lain.

“Mudah menyebarkan propaganda anti komunis... tapi kepentingan Indonesia di Timor adalah kepentingan strategis, bukan ideologis ... mungkin sedikit ideologis, tapi sebagian besar strategis. Mereka menggunakan segala macam cara untuk mengganggu kestabilan Timor ...”

Dr Horta membicarakan tentang kesempatan yang terlewatkan oleh PBB di mana PBB sebenarnya dapat memainkan peran yang penting untuk mencapai proses transisi yang damai di Timor.

“Ada kemungkinan bahwa Indonesia tidak akan memasuki wilayah Timor apabila PBB mengambil alih situasi di Timor, tapi PBB menolak.

“Mengapa Komite Dekolonisasi PBB datang ke Timor? Saya meminta Duta Besar Salem untuk mengirimkan timnya ke sini. Mengapa? Karena Indonesia tidak mau apabila masalah Timor mendunia. Portugal juga bersalah karena mereka tidak ‘menduniakan’ situasi di Timor.

“Penting bahwa PBB pada tahun 1974 mempunyai kesempatan untuk ‘menduniakan’ masalah Timor. Pada saat itu, PBB mengkritik Portugal tentang dekolonisasi ... tapi hanya memusatkan perhatian pada Mosambik dan Angola ... mereka tidak pernah mempertimbangkan situasi di Timor.”

Memusatkan perhatian pada masalah internal politik Timor, Dr Horta menekankan bahwa berbagai pandangan yang terdapat di antara partai-partai politik Timor adalah sesuatu yang normal. “Dalam semua partai-partai politik di seluruh dunia kini, terdapat berbagai faksi, ada yang konservatif, ada yang kiri ...” beliau menggambarkan dirinya sebagai tengah-kiri, mirip dengan Willie Brandt dari Jerman.

“Dalam tubuh Fretilin, terdapat beberapa sosial demokrat, beberapa Marxis, beberapa darinya Marxis berat. Dalam semua partai politik, terdapat faksi-faksi. Di Australia terdapat faksi-faksi dalam partai, di Washington juga ...bukanlah sesuatu yang aneh ... yang penting adalah bahwa para pemimpin dapat mempersatukan semua faksi ...pada tahun 1975 Nicolau Lobato mempunyai kekuatan untuk melakukan hal ini.”

Dr Horta kemudian menggambarkan Nicolau Lobato sebagai seorang Kristen Marxis, sebagaimana dipahami di banyak negara Amerika Latin. Lobato adalah seorang Marxis, dan sekaligus 100% Katolik. Beliau berkomentar: “Saat wartawan Barat mengatakan bahwa Fretilin komunis, saya berkata ‘mereka tidak mengerti apa yang mereka katakan.’”

Dr Horta mengatakan bahwa beliau berpendapat bahwa sebuah partai sosial demokrat tidak akan melawan saat Indonesia menginvasi Timor dan bahwa konflik itu terjadi karena Fretilin telah mengorganisir diri untuk melawan.

Dr Horta hati-hati sekali dalam mengklarifikasi tentang maksud baik Mayor Jendral Lemos Pires dalam upaya-upayanya dalam proses dekolonisasi, menggambarannya sebagai seorang korban dari proses ini.

“Lemos Pires adalah seseorang yang penuh integritas. Beliau datang dari Portugal ke Timor dengan satu perintah – memfasilitasi integrasi Timor ke dalam Indonesia secepatnya. Lemos Pires mendatangi semua distrik, dan beberapa sub-distrik. Beliau menyaksikan semua ini sendiri. Beliau menuliskan ke Portugal untuk mengatakan bahwa kebanyakan orang Timor tidak mau integrasi dengan Indonesia...Dan Lemos Pires bukan orang kiri. Beliau adalah orang kanan, dipercaya oleh Amerika Serikat...”

Membahas tentang koalisi yang gagal antara Fretilin dan UDT, Dr Horta berkata bahwa kedua partai gagal mencapai persetujuan, dan hal ini adalah pelajaran penting bagi Timor di masa depan. Beliau mengatakan bahwa ketidakstabilan dalam negeri diciptakan oleh situasi ini, dan juga situasi geopolitik

pada saat itu memperburuk konflik yang terjadi. Beliau mengangkat juga tentang beban yang ditanggung dalam hal hak asasi manusia.

“...banyak yang dibunuh ...tidak ada alasan untuk hal ini ... mereka tidak terlibat dalam perang, mereka adalah tahanan. Dibunuh. Ini adalah bagian kelabu dari sejarah kita ... Jangan sampai terulang lagi.”

Dr Horta mengatakan bahwa beliau yakin para pemimpin Fretilin dan UDT anti kekerasan, tapi mereka tidak mampu lagi mengontrol seluruh negara.

“Tapi kita tidak bisa lepas dari tanggung jawab. Kita harus menerimanya.”

Hari ketiga dari Dengar Pendapat dimulai dengan nyanyian indah oleh Koor Suave. Kesaksian pertama pada hari ketiga adalah Bapak Antonio Serpa dari Laleia di Manatuto district.

Bapak Antonio Serpa, survivor dari Laleia, Distrik Manatuto

Bapak Serpa mulai dengan menyatakan “untuk menceritakan riwayat saya saya memerlukan duapuluh empat hari. Saya akan mulai dengan menceritakan hal-hal yang paling penting.” Riwayat beliau mencerminkan dua puluh empat tahun penderitaan, tipikal bagi tiap orang Timor selama tahun-tahun gelap itu: mulai dari pemenjaraan selama konflik antara Fretilin dan UDT, dipaksa berjalan melewati hutan sesudah invasi Indonesia, dan pemenjaraan berkali-kali oleh militer Indonesia selama bertahun-tahun penjajahan.

Bapak Serpa menceritakan bahwa pada tahun 1975, pada usia 19 tahun, beliau adalah anggota suatu kelompok pemuda di Manatuto, bernama Lezeval. Beliau menyatakan bahwa beliau ditangkap oleh prajurit Falintil, yang memukulinya dan membawanya pertama ke Manatuto dan kemudian ke Dili. Beliau menceritakan tentang prajurit Indonesia yang ‘jatuh dari langit’ pada tanggal 7 Desember, dan bahwa pada tanggal 8 Desember, beliau dan tahanan-tahanan lain dibawa ke Aileu oleh Falintil.

“Saya kira terdapat 3000 orang di sana ... dalam situasi seperti itu, bahan pangan sulit sekali...kami takut dibunuh kalau kami meminta makanan ... dalam satu ruangan ... terdapat 70 orang di sana. Kami tidak diberikan makanan ... pada tanggal 27 Desember, Indonesia tiba di Aileu, dan kami berangkat ke Maubisse ... selama tiga hingga empat hari, kami tidak mendapat makanan dan kami tidak kuat lagi untuk lari ...pada tanggal 28 pagi hari kami melanjutkan perjalanan ke Maubisse, pada tanggal 28 malam hari, kami tidur di Maubisse dan pada tanggal 29 kami melanjutkan perjalanan ke Same ...”

Di Same, menurut beliau, mereka diperlakukan baik pertama-tama, tapi menurut beliau kemudian terjadi pembunuhan tahanan. Beliau mengatakan bahwa pada malam hari tanggal 11 Januari (1976) di desa Holarua, dekat rumah Mayor Lourenço... kami mendengar letusan peluru ... dan pada pagi hari, kami dengar delapan orang *mestizo* telah dibunuh (oleh Fretilin).”

Sesudah itu, beliau mengatakan bahwa para tahanan dibagikan menjadi beberapa kelompok. Beliau dibawa ke Faterberliu di daerah pegunungan di zona sentral, di mana beliau mengatakan bahwa para penduduk memperlakukan para tahanan dengan baik. Pada tanggal 20 Mei 1976, beliau mengatakan bahwa Nicolau Lobato mengumumkan para tahanan akan dibebaskan. Pada bulan Juni, beliau diperbolehkan pulang ke kampungnya di dekat Manatuto, di mana beliau menjadi pemimpin lokal di salah satu kamp pengungsi Fretilin dekat Laleia. Waktu mereka terpaksa mengungsi ke pegunungan dekat Natarbora pada 1978 karena serangan-serangan Indonesia yang makin gencar. Bapak Serpa menceritakan bahwa sikap orang Fretilin terhadap mantan anggota UDT makin memburuk,

“Tiap malam, siapapun yang dicurigai (oleh Fretilin), mereka memerintahkan kami untuk pergi mengambil orang yang dicurigai itu dan mereka dibunuh ... situasi makin memburuk ...”

Beliau kemudian menyerah pada militer Indonesia dan diselamatkan karena salah seorang komandan kenal dengan saudaranya. Beliau diperbolehkan kembali ke Laleia.

Bertahun-tahun kemudian, pada tahun 1982, Bapak Serpa mengatakan bahwa beliau dibawa oleh militer Indonesia dan ditahan di Pulau Atauro selama tiga tahun. Di sana, menurut beliau, mereka diselamatkan berkat bantuan internasional. Pada tahun 1985 beliau dibawa dari Atauro, ke Dili, di mana beliau ditahan di Becora dan dipukuli babak belur, dan dipindahkan ke Penjara Balide (sekarang markas CAVR). Dalam kesaksiannya, beliau menunjukkan ruangan-ruangan di markas CAVR di mana beliau ditahan. Beliau akhirnya dilepaskan dari penjara itu pada tahun 1995.

Saat ditanyai oleh para Komisaris, apakah beliau mempunyai pesan pada penduduk Timor-Leste pada akhir kesaksiannya, Bapak Serpa mengatakan,

“Pesan saya pada para pemuda seperti ini. Sekarang kita hidup dalam demokrasi, terdapat banyak partai, tapi penting untuk tidak mengulang apa yang terjadi sebelumnya ... memecah belah kita semua ... kita ini satu...jangan sampai hal ini terjadi lagi. Kita harus menghargai apa yang kita miliki.”

Bapak Tomas Goncalves, pelaku utama

Bapak Tomas Goncalves lahir di kota Atsabe, di bagian barat Timor-Leste, anak seorang liurai, Guilherme Goncalves. Pada tahun 1974, beliau menjadi anggota Apodeti, dan melakukan perjalanan beberapa kali antara Timor Leste dan Indonesia, sebelum memasuki wilayah Timor Leste bersama dengan pasukan Indonesia dari perbatasan sebelah barat pada bulan Oktober 1975 dan kemudian di Baucau selama invasi. Sebelumnya beliau telah diwawancarai oleh media dan peneliti asing dan ini merupakan pertama kali beliau berbicara dengan sebuah badan negara Timor Leste dan penduduk Timor Leste.

Bapak Goncalves mulai dengan menjelaskan bahwa di bawah Portugis, hidup orang tidak enak, dan ‘dengan demikian tanggal 25 April 1974 adalah hari penting bagi semua orang Timor’. Beliau mengatakan bahwa saat partai-partai politik berdiri di Timor, beliau menjadi anggota Apodeti sesudah diundang oleh Abilio Soares.

“Mengapa saya tidak menjadi anggota UDT atau Fretilin? ... Semuanya adalah partai kita, dengan berbagai ideologi, meski kita semua satu. Saya pikir lebih baik kalau kita dekat dengan Indonesia.”

Beliau menceritakan bahwa sebagai sekretaris partai, beliau dibasiskan di Atsabe, di bagian barat Timor Leste, dan beliau dikirim ke bagian-bagian lain untuk melakukan kampanye. Beliau bercerita bahwa pada bulan Agustus 1974, beliau bertolak ke Atambua di Timor Barat, merencanakan untuk membentuk suatu pasukan, seandainya diperlukan di masa mendatang. Beliau hanya berada di sana satu atau dua minggu saja, tapi Sekretaris Jendral Apodeti berhubungan dengan Jakarta yang mengirimkan seragam militer kepada Apodeti. Seragam tersebut, menurut beliau, dimaksudkan untuk digunakan dalam rangka protes terhadap kunjungan delegasi Portugis pada bulan September.

Beliau menceritakan bahwa kemudian beliau dipanggil ke Jakarta untuk bertemu dengan Menteri Luar Negeri Indonesia Bapak Adam Malik. Beliau menceritakan tentang suatu pertemuan yang sangat membingungkan, karena beliau tidak memahami Bahasa Indonesia dengan baik. Menurut beliau, beliau hanya mengiyakan apapun yang dikatakan padanya. Sesudah pertemuan dengan Menlu, beliau mengatakan bahwa beliau dipertemukan dengan militer. Beliau kemudian kembali ke Atambua dan bahwa pada bulan November, sekitar 110 orang anggota Apodeti bergabung dengan beliau di sana, dan mereka memulai latihan militer dengan satu pasukan Indonesia pada bulan Desember di suatu kamp sekitar delapan kilometer di luar Atambua. Beliau menerima uang dari tiga orang komandan, yang menyatakan mereka adalah pedagang. Di antara ketiga orang tersebut, termasuk tiga orang perwira bernama Kalbuadi dan Subianto.

Bapak Goncalves mengatakan bahwa operasi militer Indonesia menginfiltrasi Timor sejak bulan September 1975. Menurut beliau, tiga kelompok memasuki Suai, Bobonaro dan Fatubesi.

“Mereka membunuh banyak orang. Saya tidak tahu berapa orang. Siapapun yang sedang berada di luar, akan dibunuh. ... Mereka berkata bahwa Timor komunis . Menurut saya, Timor bukan komunis , Timor Katolik ...”

Bapak Goncalves membicarakan tentang invasi pada tanggal 16 Oktober, dari arah perbatasan dengan Atambua, saat para jurnalis asing terbunuh di Balibo.

“...pada bulan Oktober, pada tanggal 15 malam, saya berada di rumah (di Atambua) ...pihak Indonesia memanggil saya, Kalbuadi memerintahkan saya untuk membawa orang-orang saya ke perbatasan ... kami membagikan senjata ... terdapat satu batalyon ... Rajawali ...tiga kompi ... Subianto, Ali Musa ... Pada malam hari, kami bergerak... menuju Balibo ... di Balibo Fretilin tidak melawan banyak ... saat kami semua tiba di sana, tidak ada Falintil di sana ... kita dengar berita di Timor, sama dengan berita yang terdengar di seluruh dunia tentang para jurnalis itu. Siapa yang membunuh para jurnalis? Bapak (Militer Indonesia) yang membunuh mereka. Kalau di masa depan Australia atau pihak lain mendirikan suatu tribunal internasional, saya bersedia menyatakan hal ini di tribunal seperti itu...”

Bapak Goncalves mengatakan beliau mendarat dengan kapal di Baucau pada tanggal 19 Desember 1975. “Pada tanggal 19 kami ke Dili ... dan kemudian ke Aileu ... di antara para pasukan orang Timor, tidak seorangpun yang tewas, tapi banyak orang Indonesia yang tewas ... lebih dari 100 orang tewas.” Beliau menceritakan tentang majunya serangan Indonesia perlahan-lahan menuju Aileu, bertempur sehari-hari, namun beliau bersikeras mempertahankan bahwa tidak seorangpun orang Timor dibunuh oleh pasukan orang Timor yang bekerja dengan pasukan Indonesia.

“Di Aileu, saya disuruh menggali membuka kuburan-kuburan orang yang dibantai ... kami membuka tiga kuburan –memang benar, terdapat mayat di sana. Saya menganggap hal ini sebagai konsekwensi dari perang ...”

Kemudian, saat ditanyai oleh Komisaris Isabel Guterres, Bapak Goncalves menyatakan bahwa terdapat banyak mayat dalam kuburan-kuburan itu, tapi ‘saya tidak tahu berapa’.

Menanggapi pertanyaan-pertanyaan lain dari para Komisaris, Bapak Goncalves mengatakan bahwa para ‘prajurit’ Timor tersebut tidak tahu banyak tentang rencana atau kebijakan Indonesia: “sebagai prajurit Timor, orang Indonesia memerintah saja dan kami menurut saja.” Menurut beliau, beliau tidak pernah melihat dokumen apapun, dan semua rencana dirahasiakan oleh para perwira Indonesia.

Bapak Rogerio Lobato, pelaku utama

Bapak Rogerio Lobato, adik Presiden Fretilin Nicolau Lobato, lahir pada tahun 1949. Beliau adalah seorang guru sekolah dasar dan mencapai pangkat tertinggi dalam militer Portugis bagi seorang prajurit Timor. Pada tahun 1975, beliau adalah anggota militer tersebut, dan memainkan peran penting dalam Fretilin selama bulan Agustus 1975. Beliau diangkat sebagai Menteri Pertahanan sesudah proklamasi kemerdekaan pada tanggal 28 November 1975. Beliau meninggalkan Timor-Leste pada tanggal 4 Desember, bersama dengan Mari Alkatiri dan Jose Ramos Horta. Bapak Lobato sekarang menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri dalam RDTL.

Bapak Lobato memberikan kesaksian sepenuhnya dengan penuh emosi. Beliau menceritakan tentang hari-hari penting itu pada tahun 1975, dari segi nasional maupun secara pribadi. Kadang berbicara sambil menangis, kesaksian beliau merubah nada dari dengar pendapat itu.

Kesaksian Bapak Lobato memberikan sudut pandang seorang prajurit Timor yang menjadi anggota militer Portugis pada hari-hari tidak menentu pasca-perubahan rezim di Portugal pada tahun 1974 hingga pecahnya konflik bulan Agustus 1975.

Bapak Lobato menekankan bahwa dalam pendapatnya, para pasukan Portugis dapat mengendalikan situasi di Timor pada tahun 1975, seandainya mereka tegas dan bekerja sama dengan orang Timor yang merupakan anggota militer Portugis.

“... Konflik pada saat itu singkat saja ... pasukan Portugis tidak banyak jumlahnya, dan mereka tiba di Timor tanpa rasa tanggung jawab ... mereka sebenarnya dapat memulihkan keamanan ... tapi mereka terpaksa menunggu perintah dari Lisboa ... kami meminta mereka agar mereka memberikan perintah untuk memulihkan keamanan di Timor, tapi tidak ada ketegasan dari mereka ... seandainya prajurit Portugis bekerja sama dengan prajurit orang Timor pada saat itu, situasi dapat terkendalikan ...”

Beliau menceritakan tentang perasaan yang berlawanan di antara para prajurit orang Timor yang berada di dalam militer Portugis pada saat itu.

“Dalam militer Portugis, kami menyaksikan banyak hal yang tidak kami setuju ... misalnya membuang senjata ke dalam laut ... waktu kami mendengarkan siaran radio dari Kupang tiap hari, bahwa apabila kita ingin hidup, Timor harus menjadi bagian dari Indonesia, hati kami terbelah – haruskah kami berperan sebagai militer Portugis, atau bersikap nasionalis dan membela negara kami?”

Bapak Lobato menceritakan tentang perannya dalam mengkoordinasi serangan perlawanan Fretilin untuk mengambil alih kekuasaan, yang dimulai pada malam hari tanggal 20 Agustus 1975.

“Pada saat Fretilin menyatakan pemberontakan perlawanannya pada tanggal 15 Agustus, ini bukan terhadap UDT saja, tapi terhadap ancaman dari perbatasan ... pada tanggal 19, kami mengkoordinasi segala sesuatu dengan baik. Para komandan tiba di Dili ... pada tanggal 20, kami memulai operasi pada malam hari, kira-kira jam dua pagi ... kami memasuki Quartel di Taibessi (Dili) ... di Dili kami mengatur pasukan ... saya mengirimkan pasukan ke Aileu, Same, Zumalai untuk memblokir jalan raya agar orang tidak melarikan diri ke arah sana, dan ke Baucau untuk mencegah orang melarikan diri keluar dari Timor-Leste ...”

Beliau menceritakan tentang kekacauan di Taibessi pada malam hari itu, di mana menurut beliau lebih dari 1000 orang telah berkumpul dengan senjata, menembakkan senjata tersebut ke udara. Beliau menceritakan bahwa gerombolan orang menghajar seseorang hingga meninggal di depannya. Beliau mengatakan, “Sebagai Komandan pasukan, saya harus bertanggung jawab penuh atas hal ini. Saya meminta agar keluarga korban itu dapat memaafkan saya.”

Bapak Lobato menceritakan tentang kondisi di penjara-penjara Fretilin.

“Sebagai dikatakan oleh Perdana Menteri kemarin, Fretilin adalah sebuah organisasi yang tidak pernah memberikan perintah untuk dilakukannya pelanggaran, tapi para anggota Fretilin, sebagai individu, menyalahgunakan kekuasaannya dan melakukan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia.

“... orang memasuki penjara dan mulai memukuli orang lain ... tidak semua orang melakukannya karena alasan politik – kadang karena alasan seperti kecemburuan karena masalah cinta, tapi ada juga yang betul-betul marah ... Saya marah karena meninggalnya adik saya ... sebagai seorang Komandan Falintil, saya sebenarnya dapat membunuh seseorang ... Memang saya sempat memukul Francisco de Oliveira – saya dapat menyatakan saya tidak melakukan apapun, tapi saya akan mengatakan apa yang saya perbuat. Tapi saya tidak membunuh Francisco de Oliveira ...”

Meninggalnya perwira Portugis Mayor Maggiolo Gouveia belum pernah dijabarkan dengan jelas. Beliau ditahan di sebuah penjara Fretilin, dan hal ini masih merupakan suatu isu yang penuh kontroversi. Bapak Lobato membahas hal ini, tapi tidak menjelaskan secara pasti apa yang menyebabkan kematian perwira tersebut. Beliau mengatakan bahwa saat Mayor Gouveia berada dalam penjara Fretilin itu, beliau dipukuli dan dianiaya oleh para anggota Falintil yang marah. Bapak Lobato mengatakan bahwa beliau mencoba menangani hal ini dengan memindahkannya dari penjara ke rumah sakit militer, di mana menurut beliau, perwira tersebut ‘dapat dilindungi oleh Palang Merah Internasional’. Beliau menceritakan tentang berbagai langkah yang diambil olehnya demi mencegah orang membawa masuk senjata ke dalam rumah sakit. Tapi informasi Bapak Lobato tentang kematian perwira tersebut hanya sejauh itu.

Pada umumnya, tentang pembunuhan terhadap tahanan, Bapak Lobato berkata,

“Saya ingin mengatakan bahwa dalam perang, banyak orang yang meninggal. Saya tidak mau menyalahkan seseorang pada khususnya. Saya kira penting mengetahui fakta-fakta yang terkait ... benar bahwa Fretilin membunuh banyak tahanan UDT ... UDT juga membunuh tahanan Fretilin ... Saya ingin memusatkan perhatian pada ... apa yang merupakan fokus

CAVR, yaitu hak asasi manusia. Pada saat itu, saya adalah Komandan Angkatan Bersenjata. Saya harus bertanggung jawab atas apa yang terjadi ...”

Tapi Bapak Lobato juga memberitahukan pada para hadirin bahwa beliau juga salah seorang korban pelanggaran HAM. Dengan menangis, beliau menceritakan bagaimana anggota keluarganya, termasuk ibu, kakak dan adik semuanya dicari keberadaannya, dan tujuh belas orang anggota keluarganya dibunuh.

“Dalam hal hak asasi manusia, saya juga seorang korban ... saat saya tiba di Manatuto pada tahun 2000 saya pergi ke makam ibu saya di Laclubar ... saya berjanji, bahwa saya dapat memaafkan segala sesuatu penderitaan yang telah saya alami demi kemerdekaan Timor Leste ...akan tetapi saya meminta anda untuk tidak meminta saya melupakannya. Tidak mungkin. Tidak mungkin saya melupakan tentang ibu, adik dan kakak saya, yang tidak bersenjata dan dibunuh ... saya tidak bisa melupakan ... saya dapat memaafkan. Karena kita perlu maju ke depan. Saya juga mempunyai anak ... apabila saya membunuh orang-orang pembunuh itu, mereka akan merampas anak saya. Kita harus menghentikan semua ini ... perlu adanya keadilan, bagi para korban, bukan saja bagi korban dari Fretilin, tapi korban dari segala pihak ... keadilan harus dicapai ... kalau kelak Parlemen memberikan amnesti, itu lain perkara ... tapi keadilan harus diadakan, atau kita tidak akan dapat berjabat tangan saat berjumpa di jalan raya ...”

Bapak Lobato mengakhiri kesaksiannya dengan kata-kata:

“Saya meminta maaf pada semua adik kakak yang merasa bahwa saya melakukan kesalahan pada mereka saat saya menjabat sebagai Komandan Falintil.”

Bapak Domingos de Oliveira, salah satu pelaku dalam proses

Bapak Domingos de Oliveira lahir di Laclubar pada tahun 1936. Beliau menjabat sebagai seorang pegawai senior dalam instansi bea cukai dalam pemerintahan Portugis dari 1961-1975, dan juga mengajar bahasa asing pada tingkat sekolah menengah. Beliau bergabung sebagai anggota UDT pada bulan Mei 1974, dan menjadi Sekretaris Jendralnya pada bulan September tahun itu dan menjabatnya hingga pensiun pada bulan September 2003.

Bapak de Oliveira mengajukan makalah yang rinci pada CAVR, dan sebagian besar kesaksiannya dibacakan dari makalah tersebut. Kadang beliau berbicara secara rinci tentang kejadian-kejadian dari tahun 1974-75, terutama dalam menunjukkan adanya ketegangan yang meningkat antara kedua partai politik utama.

Menurut Bapak de Oliveira, beliau sangat terkejut saat revolusi 25 April 1974 pecah di Portugal. Beliau mengenang:

“ ... sebelum 25 April, yang hanya kami lakukan hanyalah minum kopi dan membicarakan sepak bola dan sebagainya ... sesudah 25 April, yang hanya kami bicarakan adalah konsekwensi dari 25 April ... pada zaman Portugis anak muda takut berbicara politik secara terbuka karena adanya PIDE (aparatur intelijen Portugis) ...”

Beliau menceritakan tentang pertemuan-pertemuan awal yang diadakan untuk mendirikan UDT dan menetapkan prinsip dan posisinya. Beliau mencatat pula bahwa UDT membela prinsip penetapan nasib sendiri untuk Timor, tapi bahwa posisi itu dibela selama Timor dapat ‘berjalan perlahan’ menuju tujuan itu dalam jangka waktu selama sekitar 10 tahun.

“Mengapa saya menjadi anggota UDT? Karena saya kira itu adalah hal yang benar demi memperjuangkan kemerdekaan melalui berbagai tahap. Dan saya seorang sosial demokrat Katolik. Saya mengira kemerdekaan dalam jangka waktu sepuluh tahun atau lebih dapat dicapai.”

Beliau mengatakan bahwa saat ASDT dibentuk, organisasi itu mempunyai banyak prinsip yang sama, tapi ASDT mempunyai posisi yang sangat tegas seputar kemerdekaan. Meski demikian, beliau menceritakan tentang ketegangan antara kedua partai itu yang terus meningkat.

“Dari apa yang saya lihat, saat kedua partai itu ke hutan ... mereka tidak memaksa penduduk untuk ikut serta ... tapi terdapat masalah-masalah. Para mahasiswa dari Portugal berbicara tidak enak di radio tentang UDT, memanggil UDT ultra-konservatif dan sebagainya ... UDT membalas, kemudian ASDT membalas, dan sehingga mulailah ketegangan antar partai ... saya perlu mengakui bahwa pada saat itu, kami semua tidak berkelakuan baik...saya tidak mengatakan bahwa hanya Fretilin atau hanya UDT yang salah... keduanya harus bertanggung jawab.”

Beliau menceritakan tentang dibentuknya dan pecahnya koalisi UDT-Fretilin.

“ ... pada bulan Oktober (1974), karena semuanya selalu buruk, Fretilin dan UDT membahas kemungkinan bersatunya kedua partai tersebut. Kami mengadakan banyak rapat. Saya bertemu dengan Nicolau Lobato, kami tetangga ... tapi banyak yang tidak setuju dari tingkatan bawah kedua partai kami ... banyak amarah ...tujuan kedua partai sama, hanya metodenya yang lain. Jelek bahwa hubungan antara kedua partai tidak harmonis ... sesudah beberapa pertemuan, UDT dan Fretilin membuat kebijakan bersama, yang kami namakan sebuah koalisi ...”

Beliau menceritakan tentang kekerasan oleh Fretilin terhadap anggota UDT, dan tekanan terhadap orang desa untuk menggantikan kartu UDTnya dengan kartu Fretilin, situasi yang akhirnya membuat UDT menarik diri dari koalisi dalam suatu pertemuan.

“... di pertemuan yang diadakan di rumah Presiden Chico Lopes itu ...mayoritas memutuskan untuk mengakhiri koalisi. Ini merupakan kesalahan. Dengan berakhirnya suatu koalisi, biasanya situasi malah memburuk ...”

Menurut Bapak de Oliveira, selama bulan-bulan itu, intel Indonesia selalu mengikuti dengan cermat segala sesuatu yang terjadi di Timor. Beliau mengatakan bahwa “tiap hari Radio Kupang menyiarkan tentang apa yang dilakukan oleh Fretilin dan UDT hari itu...”

Bapak de Oliveira menjelaskan tentang tindakan UDT mengambil alih kekuasaan pada tanggal 11 Agustus 1975, yaitu melalui apa yang beliau namakan “Gerakan 11 Agustus.”

“Australia dan Indonesia mengatakan bahwa Timor sebaiknya tetap dengan Portugal atau integrasi saja dengan Indonesia. Di Jakarta dibahas tentang bahaya komunisme. Kami ingin adanya sebuah gerakan yang dapat mengenyahkan para pemimpin yang komunis ... kami mengadakan suatu aksi.”

Beliau menceritakan bahwa para pemimpin UDT bertemu di Jakarta, sekembali mereka dari sebuah pertemuan di Macau pada bulan Juli 1975.

“Kami ingin Indonesia memahami bahwa ini bukan tindakan yang dilakukan melawan Indonesia atau negara lain ... Mereka mengatakan, ‘tidak ada masalah, kami akan menyaksikan saja’ ... tapi mereka mengatakan bahwa Timor adalah komunis, dan Mario Carrascalão berbicara keras menentang hal ini.’ ... Sekembali kami dari Jakarta ... kami bertemu dengan Gubernur Kupang ... beliau marah besar. Beliau mengatakan bahwa mereka masih akan menyerang Timor-Leste karena di sini komunis .”

And tentang gerakan itu sendiri, meski secara umum saja.

“UDT mempersiapkan gerakan ini ... pertama, itu bukan suatu kudeta ...tujuannya hanya mengusir para radikal, bukan saja dari Fretilin, tapi dari semua partai ... gerakan ini bukan terhadap Fretilin sebagai partai politik. It was to remove members who we considered to be those who would bring problems to our country.... in this movement people were killed. It was not just that Fretilin killed UDT. UDT killed Fretilin ...”

Bapak de Oliveira menceritakan tentang para pemimpin UDT di Indonesia sesudah Fretilin mengambil alih kekuasaan pada bulan Agustus 1975. Beliau mengatakan bahwa para pemimpin UDT tidak sepakat dengan Deklarasi Balibo Declaration yang menyatakan integrasi dengan Indonesia. Beliau mengatakan, “deklarasi itu tidak dibuat oleh partai-partai politik. Melainkan dibuat oleh Indonesia dan mereka menjawabkan beberapa pemimpin politik Timor untuk menandatangani di Bali.”

Bapak de Oliveira mengakhiri kesaksiannya dengan dua kenangan. Sekembalinya di Timor pasca-invasi Indonesia, beliau berangkat ke Aileu:

“Saya sedih sekali saat kembali dan menemukan bahwa 97% dari para pemimpin kami telah dibunuh di Aileu. Saya kehilangan dua orang adik laki-laki gara-gara politik ... saya memaafkan mereka ... yang membunuh mereka ... Sebagai Sekretaris Jendral UDT, saya meminta maaf dari para janda dan pemuda yang menderita akibat tindakan kami ...”

Beliau menutup kesaksiannya dengan mengenang pemimpin Fretilin Nicolau Lobato.

“Saya tidak bisa mengakhiri kesaksian ini tanpa mengatakan beberapa patah kata tentang Nicolau Lobato ... pada tahun 1977 beliau meminta saya untuk membantu membentuk suatu gerakan klandestin untuk melawan musuh bersama kita, Indonesia ... kami melakukan hal ini ... Tentang Nicolau ... sebelum orang membunuh Nicolau, beliau seakan datang pada saya ... beliau mengatakan ‘Domingos, kita semua membuat kesalahan, kami melakukannya, kalian juga ... tapi kita harus bersatu’ ... apa yang saya katakan tidak menentang Fretilin, atau Portugal atau negara lain, hanya fakta belaka ...supaya kita dapat mempersiapkan masa depan yang baik bagi Timor.”

Bapak Francisco Xavier do Amaral, pelaku utama

Bapak Francisco Xavier do Amaral adalah presiden pertama Fretilin, dan diangkat menjadi Presiden RDTL saat kemerdekaan diproklamasikan pada tanggal 28 November 1975. Beliau lahir pada tahun 1937 di Turiscai, anak sulung seorang *chefe de suco*. Beliau bersekolah di Soibada dan Dare, dan kemudian di Sekolah Seminari Jesuit seminary di Maucau. Pada tahun 1975, beliau adalah seorang penerjemah di pengadilan, guru sekolah dan guru di sebuah sekolah yang didirikan khusus untuk mereka yang terkesampingkan dari sistem sekolah kolonial. Pasca- invasi beliau tinggal di desanya di Turiscai tapi tersingkirkan dari posisinya sebagai Presiden pada bulan September 1977. Beliau sekarang adalah kepala partai politik ASDT, dan Wakil Ketua Parlemen Nasional. Beliau adalah salah seorang politisi senior di Timor-Leste saat ini.

Bapak do Amaral memulai kesaksiannya demikian:

“Pertama, saya ingin mengatakan bahwa saya tidak datang ke sini untuk menyerang siapapun, atau untuk membela diri, tapi untuk menceritakan apa yang terjadi sepengetahuan saya, demi masa depan bangsa.”

Beliau mencatat bahwa saat revolusi terjadi pada tanggal 25 April 1974 di Portugal, secara pribadi beliau tidak siap. Pada tahun 1975 Bapak do Amaral adalah seorang pembicara yang ternama, dan seluruh hadirin tertawa saat beliau menceritakan tentang berbagai orang yang terlibat dalam situasi politik dan sosial di Dili pada saat itu.

Beliau mengatakan bahwa Timor menghadapi berbagai masalah pada saat itu, tapi that bahwa beliau pernah mengatakan pada Nicolau Lobato, “Orang Timor sendirilah yang perlu memecahkan masalah Timor.”

“ASDT bermasalah besar. Dunia tidak mengetahui apapun tentang Timor. Bukan saja dunia, di Portugal pun ... dan Indonesia ... jadi saya mengirim Jose Ramos Horta untuk berangkat ke luar negeri ... saya melihat sikap Portugal, mereka membantu memberikan Timor kepada Indonesia ... Portugal ingin mencuci tangan dari masalah Timor dan memberikan kita kepada Indonesia ... dengan demikian ASDT tidak bersedia ikut serta dalam pertemuan Maucau ...”

“... saya siap menerima suatu jajak pendapat atau referendum, yang diadakan oleh Portugal untuk melihat apa yang diinginkan oleh orang Timor ...”

Berbicara tentang persaingan antara UDT dan Fretilin pada saat itu, dan dukungan masing-masing di antara penduduk, beliau mengatakan “Saya dapat melihat bahwa para *chefe do posto* dan pejabat-pejabat daerah dipegang adalah pendukung UDT, tapi penduduk mendukung ASDT ...”

Bapak do Amaral mengatakan bahwa pada saat aksi UDT pada tanggal 11 Agustus, beliau berada di daerah, di Maubisse.

“Saya menerima perintah untuk tidak datang ke Dili ... saya tidak membayangkan bahwa terjadi kudeta atau tindakan militer di Timor ... saya menunggu di Maubisse selama tiga hari ... saya tidak dapat ke Dili, jadi saya pergi ke Turiscai ... saya menyalakan radio dan mendengar bahwa UDT menangkap anggota Fretilin di Bucoli ... mereka telah menangkap semua yang komunis ... saya berpikir, ‘komunis apa?’ ... saya kemudian mendengar tentang serangan tersebut ... mereka bilang itu perang melawan komunis ...”

Bapak do Amaral juga menceritakan tentang penangkapannya oleh Fretilin pada bulan September 1977, dan perlakuannya sebagai seorang tahanan. Beliau menceritakan tentang bagaimana beliau ditahan selama sebulan setengah sebelum dipindahkan, dan bagaimana kelompoknya kemudian ditangkap oleh militer Indonesia di Sungai Dilor. Beliau menceritakan tentang bagaimana beliau dibawa ke Dili, dan bagaimana Indonesia bertujuan menggunakan dirinya sebagai cara untuk mempererat hubungan Timor Leste dengan Indonesia. Beliau dibawa kemudian ke Indonesia, di mana pada dasarnya beliau berstatus tahanan, memelihara kuda-kuda komandan militer Kalbuadi. Beliau mengatakan bahwa ditengah-tengah kejadian September 1999, beliau menelpon diplomat Portugis di Jakarta Ana Gomes, dan meminta bantuannya untuk pergi ke Portugal. Beliau menekankan bahwa tidak pernah sekalipun menandatangani dokument yang menyatakan kesepakatan beliau dengan integrasi.

Sebagai penutup, Bapak do Amaral mencatat bahwa pada tahun 1975 “kami tidak siap ... darah kami panas ... ini sudah bagian dari watak kita ...” beliau melanjutkan,

“Saya kira keadilan itu berat. Kita tidak dapat terus hidup di masa lampau ... kita perlu mendidik orang kita untuk saling memaafkan ... Kita duduk bersama tidak untuk mengecam satu sama lain, tapi untuk saling belajar dari masa lalu. Saling membantu untuk maju ke depan ... demi masa depan bagi anak kita semua ... Orang Timor dapat meninggalkan penderitaan di masa lalu ... dan tinggal dengan damai di negara kita semua. Kita semua menciptakan kemerdekaan ini ... mari kita mengulurkan tangan dan membukakan hati satu sama lain ... saya memohon pada semuanya untuk menghormati perdamaian di tanah kita ini ...”

Hari terakhir Dengar Pendapat adalah momen bersejarah. Hari itu dimulai dengan suatu analisa dari konteks internasional bagi Timor pada tahun 1974-75, oleh mantan Konsul Australia di Timor dan seorang penulis dan pengamat politik yang dihormati, Bapak James Dunn. Kemudian seorang wakil dari tiap-tiap dari lima partai politik berbicara atas nama partainya. Proses ini dimulai oleh tiga wakil dari partai-partai yang lebih kecil, Kota, Tralabista dan Apodeti. Kemudian, saat yang telah dinantikan: kedatangan Bapak Joao Carrascalão dari UDT untuk berbicara. Kesaksian beliau merubah nada dari Dengar Pendapat dan mempersiapkan untuk dua kesaksian terakhir dari Francisco Lu’olo Guterres dan Mari Alkatiri mewakili Fretilin dan meluapnya rasa haru dan emosi pada akhir acara.

James Dunn, saksi ahli

James Dunn datang khusus dari Australia untuk memberikan kesaksian. Beliau bekerja dalam kapasitas resmi mewakili pemerintah Australia selama lebih dari 30 tahun, khususnya dalam bidang hubungan internasional. Beliau menjabat sebagai Konsul Australia di Portugis Timor dari tahun 1962-1964. Dari tahun 1970-1986 beliau adalah Direktur Kelompok Urusan Luar Negeri dari Pelayanan Riset Legislatif Parlemen Australia, sehingga beliau adalah penasihat senior dalam hal urusan luar negeri pada parlemen Australia. Beliau dikirim ke Timor untuk menginvestigasi tentang situasi di sana pada tahun 1974, dan laporan dari kunjungan tersebut merekomendasikan penentuan nasib sendiri. Beliau kembali ke Timor pada tahun 1975 sebagai pemimpin misi kemanusiaan ACFOA dan, pasca invasi Indonesia, beliau mengadvokasi terus-menerus di seluruh dunia tentang masalah hak asasi manusia di Timor-Leste. Beliau menulis buku berjudul *Timor Leste: A Rough Passage to Kemerdekaan* (2003).

Bapak Dunn mengajukan sebuah makalah pada CAVR berjudul *Timor Leste’s Painful Birth – Reflections on the Causes of a Humanitarian Disaster*. Pidato beliau diterjemahkan ke dalam Bahasa

Tetum. Ceramahnya, beliau mencatat, bertujuan untuk “menangani sebab terjadinya peristiwa-peristiwa mengenaskan di Timor Leste pada tahun 1975.” Beliau menggambarkan penjajahan Indonesia selama 24 tahun sebagai “salah satu hal terburuk yang terjadi sesudah berakhirnya Perang Dunia II, secara relatif.” Dalam kata-kata pembukaannya, beliau menekankan bahwa dalam pendapatnya:

“rekonsiliasi yang sejati ... memerlukan suatu pemeriksaan yang rinci tentang bagaimana peristiwa-peristiwa tragis ini dapat terjadi, demi kebenaran, keadilan dan tanggung jawab. Rekonsiliasi menuntut diberkannya siapa yang bertanggung jawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan, dan diterimanya tanggung jawab oleh para pelaku. Termasuk di sini pemerintah-pemerintah di seluruh dunia yang membiarkan terjadinya kejahatan-kejahatan terhadap kemanusiaan itu, sekaligus bagi para pelaku kejahatan-kejahatan tersebut.”

Bapak Dunn menyayangkan bahwa isu tentang tanggung jawab atas kejahatan-kejahatan yang terjadi selama 24 tahun penjajahan tidak terbeberkan, dan jugat tidak diinvestigasi. Beliau mencatat dengan jelas bahwa “tanggung jawab terakhir atas tragedi yang terjadi di Timor Leste pada tahun 1975 termasuk konflik antar partai sebenarnya terletak pada para perwira militer Indonesia yang mengintegrasikan Timor Leste dengan Indonesia secara paksa.”

Beliau mengatakan bahwa tanggung jawab atas tragedi kemanusiaan yang terjadi tidak saja meliputi militer Indonesia, tapi juga termasuk Australia, AS, negara-negara sahabat Indonesia di Eropa, Jepang, India dan ASEAN, “kebanyakan tidak menghiraukan pelanggaran hak asasi manusia yang biasanya mereka kecam kalau terjadi di lain tempat.” Bapak Dunn menjelaskan bahwa dalam pendapatnya peristiwa mengenaskan yang terjadi di Timor dapat dicegah pada tahun 1975, apabila negara-negara tersebut melakukan kewajibannya sesuai dengan Piagam PBB.

Dalam makalahnya, Bapak Dunn menanggapi tentang situasi internasional pada saat itu, intervensi Indonesia, gerakan kemerdekaan Timor Leste, konflik sipil pada bulan Agustus 1975, dan peran Portugis.

Bapak Dunn menjelaskan tentang situasi politik pasca-Perang Vietnam, dan ketakutan pada zaman Perang Dingin terhadap komunisme di negara-negara barat, terutama AS. Beliau mengatakan bahwa situasi seperti ini berpengaruh kuat terhadap para komandan militer Indonesia, yang menurut Pak Dunn telah memutuskan apa yang harus dilakukan dalam kasus Timor tidak lama sejak penggantian pemerintah April 1974 di Portugal.

“Keputusan oleh para jendral rezim Suharto untuk menghentikan proses penentuan nasib sendiri Timor Leste telah diambil saat tidak lama sesudah pertemuan Horta dengan Menlu Indonesia, dan setahun sebelum konflik bersenjata pecah antara UDT dan Fretilin pada pertengahan bulan Agustus 1975.”

Beliau mencatat bahwa pada saat itu, Presiden Suharto “masih agak ragu tentang rencana ini, tapi keraguannya menghilang pada tahun 1974, saat Perdana Menteri (Australia) Gough Whitlam menegaskan pada beliau bahwa hasil yang terbaik demi masa depan Timor Leste adalah apabila wilayah tersebut digabungkan ke dalam wilayah Indonesia.”

Bapak Dunn menekankan kontradiksi yang timbul dalam kebijakan internasional Australia, yang mendukung proses penentuan nasib sendiri di seluruh Pasifik tapi tidak untuk Timor-Leste.

“Pandangan Whitlam dipengaruhi oleh keinginannya untuk menjalin hubungan dekat dengan Indonesia. Bagi beliau, daerah jajahan Portugis adalah sesuatu yang tidak semestinya, sebuah negara yang terlalu kecil dan terbelakang untuk merdeka. Beliau adalah seorang lelaki besar. Beliau lebih menyukai negara-negara besar, dan tidak menyukai negara-negara kecil ... beliau juga berpendapat bahwa Timor Leste sudah semestinya menjadi bagian dari wilayah kepulauan Indonesia, sehingga apa salahnya kalau menjadi bagian dari Republik Indonesia. Whitlam dinyatakan menginginkan hasil ini dari suatu proses penentuan nasib sendiri, tapi tidak menanggapi kami yang menunjukkan bahwa hal ini kontradiktif. Dalam proses penentuan nasib sendiri, jelas-jelas orang Timor Leste tidak akan memilih begitu saja untuk bergabung dengan Indonesia.”

Bapak Dunn menceritakan tentang penerimaan terhadap Jose Ramos Horta yang secara “sopan, tapi hat-hati” di Canberra pada bulan Juli 1975. Beliau menceritakan tentang bagaimana para pejabat Australia menasihatinya pada saat itu bahwa beliau dapat membahas “penentuan nasib sendiri” dengan Ramos Horta, tapi tidak boleh membahas “kemerdekaan,” menyimpulkan bahwa “para pejabat Australia hanya berbasa-basi tentang hak Timor Leste untuk menentukan nasib sendiri.”

Tentang AS, Bapak Dunn mencatat bahwa “sesudah Perang Vietnam, status Indonesia secara strategis meningkat di mata Washington.”

“Kepulauan itu dianggap sebagai pemisah strategis yang penting antara Samudera Pasifik dan Hindia, di mana angkatan laut Soviet, terutama kapal selam nuklir memasuki ... meski berpura-pura tidak beraliansi pada siapa pun, rezim Suharto yang anti-komunis menjadi sekutu AS secara de facto dalam upaya AS untuk mengurangi pengaruh dan kekuatan Soviet dan Cina.”

Bapak Dunn menceritakan bahwa tanggapan negara-negara Asia sangat mengecewakan. Filipina di bawah Marcos “tidak pernah mempertanyakan tindakan-tindakan diktator Indonesia”. Japan menurut beliau adalah pendukung kuat Indonesia, karena alasan harga minyak yang makin naik dan perlunya Jepang akan sumber daya alam itu demi pengembangan ekonominya. India, negara demokratis terbesar di Asia, juga mengecewakan – dari awal mula, menurut beliau, para pemimpin India mempersamakan situasi Timor dengan situasi di Goa dan mendukung Indonesia.

Bapak Dunn juga menekankan bahwa sebenarnya negara-negara komunis tidak mendukung Timor. Beliau mengatakan bahwa, sesudah misinya di Timor pada tahun 1974, beliau bertemu dengan Duta Besar Soviet dan Cina di Canberra. Yang hanya ingin mereka ketahui berkaitan dengan Timor, seingat beliau, adalah apakah masing-masing agen intel berada di dalam daerah itu. Beliau mencatat bahwa Cina secara aktif mendukung kemerdekaan bagi Timor, tapi tidak menganggap daerah itu penting secara strategis.

Portugal, kata beliau, “letih, lelah.” Selain itu, “di bawah Portugal, Timor-Leste tidak mempunyai gambaran yang tepat tentang apa yang sedang terjadi di dunia luar.” Beliau mencatat tidak adanya universitas atau akademi di Timor, dan menambahkan bahwa “Portugal pun tidak tahu banyak.”

“Para pemimpin baru Timor sangat polos dan tidak memahami kompleksitas politik internasional pada saat itu ... bagi negara-negara kecil pada saat itu, retorika dekolonisasi sangat memberanikan. Kemerdekaan untuk daerah-daerah jajahan yang masih tersisa bukan saja impian nasionalis, tapi sudah menjadi hak integral ...”

Posisi Indonesia, menurut beliau, adalah faktor kritis,

“Kenyataannya adalah bahwa Timor mempunyai sedikit saja teman atau pembela yang berpengaruh di antara komunitas internasional ... realita memprihatinkan pada saat itu pada tahun 1975 adalah bahwa hanya satu negara yang sangat tertarik pada kasus Timor, dan itu adalah Indonesia, negara yang tidak ingin sekali apabila Timor menentukan nasibnya sendiri ...”

Bapak Dunn menceritakan bahwa peran PBB sangatlah kurang pada saat itu.

“Kurt Waldheim (Sekjen pada saat itu) memberikan sedikit sekali perhatian pada situasi yang sedang terjadi, sementara Komite Dekolonisasi PBB lebih terpusat perhatiannya pada krisis di wilayah jajahan Portugal di Afrika daripada di Timor Leste.”

Portugal, tutur beliau, “dapat melakukan lebih banyak untuk mendatangkan”, menggemakan apa yang dituturkan oleh Mayor Jendral Lemos Pires dari hari pertama dengar pendapat. Beliau mencatat bahwa PBB “tidak boleh turut campur dalam krisis” di Timor pada bulan Agustus 1975, dan bahwa Pemerintah Whitlam di Australia menyatakan bahwa tidak ada gunanya menduniakan masalah Timor. Bapak Dunn mengatakan bahwa ini adalah “kesalahan besar sekali dalam penilaian PBB, karena intervensi PBB pada saat itu sebenarnya dapat berpengaruh besar terhadap Presiden Suharto yang masih ragu tentang invasi Timor Leste.”

Tanpa adanya kontak resmi antara PBB dengan Timor Leste selama masa pimpinan Fretilin sesudah krisis Agustus, Bapak Dunn mencatat bahwa Majelis Umum tidak mempunyai informasi yang layak tentang kondisi di Timor Leste saat memperdebatkan hal ini pasca-invasi 7 Desember 1975.

“Selepas upaya yang tidak serius untuk menghubungi resistensia, Dewan Keamanan kehilangan minat. Nampaknya dunia telah membiarkan Timor Leste untuk bergelombang dalam nasibnya sebagai daerah jajahan baru.”

Bapak Dunn tidak ragu untuk mengecam tindakan Indonesia.

“Invasi dan pendudukan Timor Leste oleh Indonesia adalah sesuatu yang bodoh dan melanggar Piagam PBB, selain juga mungkin melanggar UUD Indonesia. Tindakan itu tidak berdasarkan tuntutan atas suatu wilayah, dan terjadi tanpa landasan yang kuat ...”

Beliau mencatat bahwa intervensi militer terjadi dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah memanipulasi para pemimpin Timor Leste yang konservatif, dan juga masuknya intel, dilatihnya para gerilyawan Timor dan adanya suatu kampanye propaganda. Tahap kedua, menurut beliau, adalah pemaksaan terhadap elemen-elemen UDT yang terpaksa melarikan diri ke Timor Barat, dan upaya untuk mengucilkan pemerintahan Fretilin. Tahap ketiga adalah serangan militer secara rahasia dari Timor Barat. Operasi gelap ini, menurut beliau, dimonitor oleh instansi-instansi intel Barat.

Bapak Dunn mengatakan bahwa operasi militer pertama diadakan pada tanggal 16 Oktober 1975, dan melibatkan lebih dari 2000 pasukan, termasuk 300 orang Timor Leste. Terjadi dalam operasi ini, pembunuhan terhadap lima orang jurnalis Australia yang meliput berita.

Bapak Dunn mengecam tanggapan Australia dan AS terhadap hal ini.

“Meningat keraguan Presiden Suharto pada awal mulanya tentang invasi, dan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi bersamanya, sebenarnya hal-hal itu dapat dicegah apabila Australia dan AS, yang intel-intelnya mengetahui apa yang sedang direncanakan, bertindak sesuai dengan kewajiban mereka di bawah Piagam PBB dan perjanjian-perjanjian lain tentang dekolonisasi. Mereka mendukung tujuan Indonesia untuk mengintegrasikan Timor Leste. ... Pemerintah-pemerintah Barat melindungi Indonesia dari pemantauan dunia internasional. Mereka tidak saja membantu Indonesia untuk menutup-nutupi serangan ilegalnya, tapi juga membantu menyembunyikan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi juga, terutama dalam empat tahun pertama, dengan mencegah upaya-upaya untuk menginvestigasi laporan-laporan tentang pelanggaran berat hak asasi manusia ...”

Bapak Dunn menekankan bahwa penting bagi komunitas internasional untuk membeberkan tentang kejahatan terhadap kemanusiaan ini dan untuk mempertanggungjawabkan mereka yang melakukannya. Beliau mencatat bahwa hal ini sangat teramat penting bagi reformasi militer Indonesia, di mana banyak di antara para perwira senior yang menduduki jabatan-jabatan penting dalam komando di Timor saat pelanggaran-pelanggaran HAM tersebut dilakukan.

Bapak Dunn menceritakan tentang aspek lain dari situasi internasional pada saat itu. Beliau menceritakan tentang ditekankannya proses dekolonisasi selama tahun 1960an dan 1970an, dan bagaimana resolusi-resolusi Dewan Umum PBB nomor 1514 tahun 1960 dan 2625 tahun 1970 “adalah pernyataan-pernyataan tegas bahwa penjajahan sudah tidak dapat diterima lagi.” Beliau mencatat tentang konteks di mana pulau-pulau kecil di Pasifik telah bergerak menuju pemerintahan sendiri dan kemerdekaan, misalnya Fiji, Nauru dan Papua Niugini.

“Dalam tahun 60an ukuran Timor Leste yang kecil itu dan keterbelakangannya secara ekonomi kadang diketengahkan sebagai tantangan dalam proses kemerdekaan, tapi menginjak tahun 70an, argumentasi semacam itu sudah tidak dapat diterima lagi.”

Dari perjalanannya ke Timor pada bulan Juni-Juli 1974 sebagai ketua misi penelitian untuk pemerintah Australia, Bapak Dunn mencatat “jelas bagi saya... bahwa dalam masa depan Timor Leste, terdapat hanya dua pilihan, meneruskan hubungan pasca-kolonial dengan Portugal, atau kemerdekaan ...

integrasi dengan Indonesia ... adalah suatu pilihan yang dipaksakan terhadap orang Timor oleh Portugis, karena tekanan dari Indonesia ...”

Tentang suasana berkaitan dengan partai politik di Timor, sebelum konflik bulan Agustus 1975, Bapak Dunn mengatakan bahwa “Pada umumnya saya ingin menekankan bahwa sikap politik para pemimpin pada saat itu cukup moderat, dan kondusif terhadap dekolonisasi yang harmonis.” Beliau mengatakan dalam pendapat beliau koalisi itu dapat bertahan “apabila tidak ada campur tangan dari luar, yang dilakukan oleh Bakin, yang tujuannya adalah merusak persatuan nasional Timor Leste.”

Berbicara tentang sedikitnya pemahaman dunia Barat tentang budaya, sejarah dan masyarakat Timor, poin pokok Bapak Dunn adalah bahwa pada tahun 1974-75 “terdapat kondisi yang memungkinkan transisi yang lancar menuju kemerdekaan, seandainya militer Indonesia tidak campur tangan untuk memaksakan kehendaknya yaitu integrasi.”

Tentang perang sipil, Bapak Dunn menggambarkan konflik antara orang Timor pada bulan Agustus 1975 demikian,

“... Itu adalah konflik bersenjata pahit (kebanyakan di daerah Maubisse dan Dili sendiri), yang sesudah tiga minggu menewaskan antara 1200 dan 1500 orang.”

Bapak Dunn mencatat bahwa Joao Carrascalão, pemimpin UDT mengambil alih kekuasaan pada tanggal 10 Agustus 1975 langsung sekembalinya dari Jakarta dengan informasi salah dari intel Indonesia bahwa Fretilin akan mengadakan kudeta kiri.

“Perang dimaksudkan sebagai hasil dari kampanye gelap intervensi politik yang dilakukan oleh mereka-mereka yang merencanakan Operasi Komodo, operasi rahasia intel yang diprakarsai oleh Jendral Ali Murtopo dan Benny Murdani Desember 1974.”

Aksi TNI ini, menurut beliau, sudah hampir pasti dilakukan tanpa sepengetahuan kebanyakan tokoh-tokoh pemimpin politik Indonesia pada saat itu. Beliau menekankan bahwa yang penting dari analisa ini adalah bahwa meski pihak Timor dan Portugis mengetahui sedikit saja tentang apa yang sedang terjadi pada saat itu, Australia tahu dan dapat melakukan sesuatu.

Bapak Dunn mengatakan bahwa selama masa pemerintahan Fretilin sesudah Agustus 1975, “mereka berperilaku penuh tanggung jawab dan bersikap terkendali, mendirikan sebuah pemerintahan sementara yang berhasil menciptakan stabilitas di seluruh Timor Leste, kecuali Oecussi.”

Bapak Dunn mencatat bahwa “seringkali pemerintahan Portugis disalahkan secara tidak adil atas apa yang terjadi terhadap proses dekolonisasi pada tahun 1975.” Tapi tanggung jawab atas hal ini, menurut beliau, adalah di tangan Indonesia yang telah melakukan upaya mengganggu stabilitas Timor Leste. Bapak Dunn mengatakan bahwa para pejabat Portugis Timor berupaya sebisa mungkin dalam kondisi yang sulit, tapi mereka tidak mempunyai sumber daya yang cukup dan tidak didukung dengan baik oleh pemerintah di Lisbon yang pada saat itu sedang “dilanda krisis politik berat.”

He mencatat bahwa dalam masa pasca-revolusi, “angkatan diplomat Portugis kehilangan rasa percaya diri dan ini dapat dilihat dari program-program dekolonisasi yang dilakukan dengan tergesa-gesa.” Bapak Dunn mencatat upaya Dr Almeida Santos, yang mengadakan perjalanan ke Canberra sesudah konflik Agustus 1975, guna mengusahakan adanya dukungan terhadap dikirimkannya pasukan penjaga perdamaian. Permintaannya ditolak oleh Australia.

Menurut Bapak Dunn, keputusan Gubernur Lemos-Pires untuk tidak kembali ke Dili dari Atauro bulan Oktober 1975 untuk melanjutkan proses dekolonisasi adalah mengecewakan, meski dapat dipahami mengingat tidak adanya petunjuk yang layak dari Lisbon. Bapak Dunn menceritakan tentang pertemuan-pertemuannya dengan para pemimpin Fretilin, yang menginginkan kembalinya sang Gubernur, di Dili bulan Oktober 1975. Beliau mengatakan bahwa beliau sempat mengadakan dua perjalanan dari Dili ke Atauro pada bulan Oktober 1975 untuk meminta agar Gubernur Lemos-Pires kembali dan melanjutkan proses dekolonisasi. Beliau mengatakan Gubernur Lemos-Pires menyampaikan bahwa 28 pesan telah dikirim, tetapi belum satupun balasan diterima.

Dalam penutupan kesaksiannya, Bapak Dunn menyimpulkan bahwa sebab dasar gagalnya proses dekolonisasi pada tahun 1975 dan kekerasan yang muncul akibatnya adalah karena intervensi militer Indonesia.

“Apabila Indonesia mendukung proses dekolonisasi tersebut, bukannya malah merusak proses tersebut, sejarah Timor Leste mungkin berbeda pula. Tidak ada perang sipil, atau pun invasi. Timor Leste hari ini dapat menjadi bangsa yang terdiri dari lebih dari 1,3 juta orang ...”

Laporan ini akan membahas sedikit tentang presentasi yang diberikan oleh tiga partai-partai kecil, dan lebih memusatkan perhatian pada pemimpin kedua partai utama, UDT dan Fretilin.

Kota, Bapak Clementino dos Reis Amaral

Bapak Clementino dos Reis Amaral, sebagai salah satu pendirinya pada tahun 1974, memberikan kesaksian atas nama Partai Kota. Bapak Amaral mempunyai riwayat panjang dalam politik Timor Leste. Beliau adalah administrator distrik Baucau pada zaman Portugis. Beliau adalah anggota Parlemen Indonesia selama 14 tahun dan anggota Komisi Nasional Hak asasi manusia (Komnas HAM) Indonesia selama 7 tahun.

Bapak Amaral mengatakan bahwa sebagian dari filsafat di balik dibentuknya Partai Kota adalah demi menghargai tradisi Timor dan adat istiadat nenek moyang. Beliau menekankan bahwa seringkali Partai Kota salah dimengerti, dan beliau mengatakan bahwa Kota tidak pernah mendukung integrasi. Dalam kesaksian beliau tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tahun 1975, Bapak Amaral memusatkan perhatiannya pada daerah Baucau di sebelah timur, karena di sanalah lokasi beliau pada saat itu. Beliau menceritakan tentang apa yang terjadi sebelum dan selama konflik pada bulan Agustus itu dan saat invasi Indonesia pada bulan Desember.

Tentang kekerasan antara partai-partai politik Timor, Bapak Amaral memfokuskan perhatian pada pelanggaran-pelanggaran HAM berupa penangkapan dan penahanan semena-mena, penyiksaan dan pemindahan semena-mena dan pemindahan paksa. Pelanggaran yang terakhir ini, menurut beliau, juga terjadi saat Fretilin mengumumkan bahwa mereka mengungsikan penduduk ke gunung demi melindungi mereka dari serangan Indonesia. Bapak Amaral memusatkan perhatian juga pada eksekusi tahanan di Aileu, Same dan Maubisse oleh Fretilin, menekankan bahwa CAVR seharusnya menginvestigasi pembunuhan-pembunuhan ini. Beliau mengatakan bahwa anggota Partai Kota mempunyai bukti yang ingin mereka sampaikan pada CAVR tentang hal-hal ini.

Bapak Amaral mengatakan bahwa kekerasan terjadi antara orang Timor karena “tidak ada keinginan untuk menciptakan perdamaian antara kita semua.” Beliau mengatakan bahwa tidak ada kedewasaan politik, dan pecahnya koalisi Fretilin-UDT adalah karena persaingan kekuasaan. Menurut beliau, partai-partai kurang komitmen terhadap persatuan nasional, mementingkan partai sebelum persatuan nasional. Beliau juga membicarakan tentang situasi internasional yang tidak menguntungkan untuk Timor pada saat itu, termasuk adanya Perang Dingin.

Ditanyai oleh Wakil Ketua CAVR, Fr Jovito Araujo, apakah dalam pendapat beliau Indonesia hanya menggunakan komunisme sebagai alasan belaka untuk menyerang Timor, Bapak Amaral menekankan bahwa Indonesia aktif bersiap-siap menyerang Timor sebelum Agustus 1975. Beliau mengatakan bahwa motivasi utama Indonesia adalah bahwa mereka tidak ingin apabila Timor merdeka, karena ini akan memberikan contoh bagi propinsi-propinsi Indonesia.

Tentang Deklarasi Baliboyang ditandatangani oleh wakil Kota, Bapak Jose Martins, Bapak Amaral menyatakan bahwa dokumen itu ‘ditulis oleh orang Indonesia, ditandatangani pada jam lima pagi dengan pistol-pistol di meja.’ Beliau mengatakan bahwa dalam jangka waktu sebulan sesudah menandatangani, para anggota Kota sudah menyangkal wewenang dokumen tersebut di PBB.

Bapak Amaral memusatkan sebagian besar dari presentasinya melihat ke depan, daripada ke masa lampau. Beliau menekankan kegiatan CAVR harus menjurus ke depan, dan laporan CAVR sebaiknya

tidak ditaruh saja di dalam laci oleh Parlemen. Beliau juga memohon agar kekerasan tidak terulang kembali di Timor. Beliau berbicara tentang masalah nasional yaitu kekerasan domestik sebagai tanda bahwa kedamaian belum tiba seluruhnya di Timor Leste.

Bapak Amaral mengakhiri presentasinya dengan berdiri dan berbicara dengan penuh emosi.

“Kami partai politik. Kami tidak lolos dari kesalahan. Jika ada anggota kami yang menyebabkan menetesnya air mata penduduk Timor, saya ingin berdiri dan memohon maaf. Saya mohon maaf pada penduduk Timor Leste dan saya meminta maaf atas nama partai saya. Ini bukan propaganda politik. Ini demi tanah air kita dan semua penduduk Timor Leste.”

Apodeti, Bapak Frederico Almeida Costa dan Bapak Gabriel da Costa

Bapak Frederico Almeida Costa, Presiden dari Apodeti Pro-Referendum, membahas tentang keterlibatan Apodeti. Komisaris Jacinto Alves sebelumnya telah menjelaskan tentang upaya-upaya CAVR untuk mengundang anggota-anggota senior Apodeti yang sekarang berada di Timor Barat untuk memberikan kesaksian, tapi mereka menolak undangan tersebut.

Bapak Frederico Almeida Costa berbicara atas nama partai, menjelaskan pada awalnya bahwa beliau mewakili Apodeti yang muncul pada tahun 1999 untuk mendukung jajak pendapat yang diadakan oleh PBB, dan bahwa beliau tidak berbicara atas nama pimpinan Apodeti dari tahun 1974-76.

Bapak Almeida menyatakan bahwa Apodeti mendukung integrasi Timor dengan Indonesia pada tahun 1975. Menurut beliau,

“Saat pemuda menanya, kenapa orang kita harus menderita selama 24 tahun ini adalah pertanyaan yang sangat sulit dijawab oleh Apodeti ...hari ini adalah hari penting bagi kita ... untuk melihat kembali pada konflik tahun 1974.

“... Saat ide tentang integrasi muncul, orang sangat kaget ... karena peristiwa 25 April memberikan kesempatan bagi kemerdekaan ... tapi itu adalah hak kita ... kami bisa melihat bahwa situasi di Timor tidak baik pada saat itu, sehingga dalam pendapat kami, lebih baik bergabung dengan Indonesia, yang lebih dekat daripada Portugal.”

Lain dibandingkan dengan kesaksian anggota Apodeti, Tomas Goncalves pada Hari Ketiga, Bapak Almeida mengatakan “Apodeti tidak pernah membawa senapan ... tidak pernah memberikan perintah untuk menyandang senapan ... politik kita dilakukan dengan mulut, tidak dengan senapan ...”

Beliau mengatakan bahwa Apodeti terjepit di tengah-tengah antara UDT dan Fretilin.

“... Orang memanggil kita pengkhianat, partai kita adalah pengkhianat ... UDT melakukan kudeta, membakar rumah-rumah kami, Fretilin melakukan kontra-kudeta, membakar rumah-rumah kami ...oleh karena kejadian-kejadian ini, banyak orang meninggal. Kami memberikan informasi pada CAVR tentang pembantaian tahun 1974-75 ... untuk memperlihatkan kebenaran dengan cara yang layak ...”

Bapak Almeida menceritakan pandangan partainya tentang hak asasi manusia.

“Kami ingin memberikan gambaran tentang hak asasi manusia. Tentang hak asasi manusia, kita berbicara tentang kasus-kasus tahun 1999 ... kita bertanya tentang 1975, apakah itu dapat dipertimbangkan juga? Kami meminta PBB untuk membantu dengan hal ini. Terakhir, kita memeriksa kasus-kasus tahun 1999 dan 1991, Santa Cruz. Di Santa Cruz banyak sekali yang meninggal. Siapa yang melakukan ini? ...Mengapa insiden Santa Cruz terjadi? ...”

Dalam penutupan presentasinya, Bapak Almeida mengajukan dua poin.

“Para pemimpin perlu mengakui kesalahan-kesalahan mereka ... apabila mereka ingin melakukan rekonsiliasi ...Terakhir, kami meminta para janda, yang keluarganya meninggal ...atas nama Apodeti, saya mohon maaf dan minta dimaafkan oleh mereka.”

Trabalhista, Bapak Paulo Freitas

Trabalhista adalah partai ketiga yang memberikan kesaksian. Bapak Paulo Freitas berbicara atas nama partai tersebut.

Poin utama yang dikemukakan oleh Bapak Freitas adalah bahwa “ambisi kekuasaan Fretilin dan UDT adalah penyebab suatu perang yang sebenarnya tidak perlu terjadi.” Beliau mencatat bahwa orang Timor tidak perlu mengadakan perang terhadap Portugis sebagaimana terjadi di daerah-daerah jajahan di Afrika, tapi bahwa Timor diberikan kesempatan untuk melalui proses dekolonisasi. Beliau mengatakan bahwa semua partai politik Timor kurang pengalaman, dan karena itu, orang biasalah yang menderita.

Bapak Freitas mengatakan bahwa beliau tidak mempunyai keterangan rinci tentang apa pemicu konflik antara Fretilin dan UDT. Tetapi, beliau mengatakan bahwa dalam pandangannya, kalau koalisi tersebut tetap utuh, konflik tidak akan terjadi. Beliau mengatakan bahwa intel-intel Indonesia tersebar di seluruh negeri dan bahwa mereka memainkan peranan untuk mengganggu kestabilan koalisi, tapi para pemimpin Timor tidak dapat merespon situasi seperti ini.

Bapak Freitas berbicara panjang lebar tentang pengalamannya selama kekerasan yang terjadi pada tahun 1975, dan tahun-tahun berikutnya, termasuk gambaran yang mendetail tentang pembunuhan Santa Cruz pada tahun 1991.

UDT, Bapak Joao Carrascalão

Bapak Joao Carrascalão, Presiden UDT, terbang dari Australia untuk memberikan kesaksiannya pada Dengar Pendapat CAVR. Saat kesaksian beliau hampir dimulai, jumlah hadirin memuncak hingga lebih dari 800 orang, sehingga tidak ada tempat duduk lagi. Inilah kesaksian yang telah dinantikan oleh setiap orang.

Bapak Carrascalão memulai dengan mengucapkan terima kasih pada CAVR atas dengar pendapat yang diadakan, dan mengatakan bahwa beliau mempercayai CAVR untuk menyelesaikan misinya. Sesudah itu, kata-kata beliau merubah nada dari empat hari Dengar Pendapat sebelumnya.

“Saya ingin mengatakan betapa sedihnya saya dengan berlanjutnya Dengar Pendapat ini ... tiap-tiap partai ingin menceritakan versinya sendiri ... tidak seorangpun yang ingin mengakui bahwa dirinya salah. Saya ingin memulai dengan mengatakan bahwa saya membuat kesalahan. Semua korban yang dibunuh oleh Fretilin, itu semuanya salah saya. Korban Fretilin yang dibunuh oleh UDT, itu salah saya ... jika anda mencari orang untuk disalahkan, jangan lihat jauh-jauh, sayalah yang salah. Saya akan menanggung beban kesalahan ini ... tapi saya ingin melihat ke masa lalu dan membicarakan perjuangan kita untuk kebebasan.”

Dengan kata-kata ini, para hadirin kaget dan emosional. Bapak Carrascalão melanjutkan.

“... Dengan atau tanpa kekerasan, Indonesia menginginkan satu jalan saja. Indonesia mengetahui bahwa orang Timor menginginkan kemerdekaan ... Indonesia mengetahui bahwa menurut hukum internasional, mereka tidak berhak menuntut wilayah Timor Leste. Indonesia dibentuk berdasarkan batas-batas wilayah jajahan Belanda. Timor adalah daerah jajahan Portugis ... Indonesia mempunyai operasi intel yang besar di Timor ...”

Bapak Carrascalão menceritakan berbagai peristiwa dari masa itu. Sementara kesaksian beliau tidak diberikan secara kronologis, laporan ini akan menguraikannya secara kronologis.

Bapak Carrascalão menceritakan tentang tanggapannya mengenai Revolusi Bunga di Portugal pada tanggal 25 April 1974, dan didirikannya partai-partai politik Timor, menekankan kurangnya pengalaman dan kebijakan para pemimpin politik muda.

“... Portugal memberikan kesempatan pada Timor untuk memilih partai-partai politiknya ... banyak orang ingin terus bersama dengan Portugal ... tapi anak muda dan mereka yang mempunyai kesadaran politik mengetahui bahwa Portugal adalah negara termiskin di Eropa ... Bagus kalau Portugal memberikan kesempatan untuk memilih ... tapi kita tidak dapat melupakan 450 tahun kolonialisme ...”

Beliau mengatakan bahwa beliau bukan salah seorang pendiri partai UDT, tapi pada bulan Mei 1975 beliau menjadi anggota. Berbicara tentang politik pada saat itu dan hubungan antara kedua partai, beliau berkata:

“... Kemarin Bapak Xavier menyatakan bahwa banyak kepala desa dan pegawai negeri adalah pendukung UDT. Tapi bukan mereka saja, juga orang biasa ... tapi saat kampanye mulai, dukungan Fretilin meningkat dengan cepat ... Fretilin ingin kemerdekaan secepatnya, dan Portugis mulai mendukung Fretilin karena mereka ingin membuang Timor Leste secepatnya ... terdapat banyak insiden, termasuk balas dendam pribadi ...

“... Dalam Fretilin beberapa di antara pemimpin adalah komunis, tapi Fretilin bukan partai komunis. Dalam UDT, beberapa dari pemimpin adalah sosialis, tapi UDT bukan partai sosialis, tapi sosial demokrat ... di Timor, di basis, tidak ada perbedaan ... UDT menginginkan kemerdekaan juga, tapi mungkin dalam sepuluh tahun ...”

Tentang koalisi yang gagal, beliau mengatakan,

“... Mengapa dua partai berpisah? Saya bersedia sepenuhnya untuk memahami dan menceritakan kebenaran, tapi saya tidak mau bertanggung jawab atas berpisahnya kedua partai tersebut ... partai-partai tersebut selalu saling menyerang, mengatakan hal-hal buruk tentang satu sama lain ...”

Beliau menceritakan tentang suatu pertemuan antara beliau dan Bapak Francisco Xavier do Amaral dan Gubernur Lemos Pires di Istana Gubernur.

“... Xavier mengatakan ‘Saya tidak mau (menghancurkan koalisi)’ (break the coalition), tapi saya tidak punya kekuasaan di partai.’ Xavier mengatakan dalam pertemuan, ‘Saya tidak punya kekuasaan lagi.’”

“...koalisi itu sudah bukan koalisi sejati lagi. UDT menuduh Fretilin, Fretilin menuduh UDT ...kita selalu saling melawan satu sama lain ... (di pertemuan UDT) hanya tiga orang dari kami yang menolak keluar dari koalisi itu ... tapi itu adalah keputusan demokratis ... Bukan orang Indonesia yang menghancurkan koalisi. Kita tidak usah menyalahkan orang lain, itu salah kita ...”

Dan beliau menceritakan tentang tidak adanya dukungan (dan lebih buruk lagi dari itu) dari pihak masyarakat internasional.

“...Pihak Portugis tidak memberikan pendidikan kewarganegaraan atau politik pada orang Timor, dan oleh karena itu, saya menyalahkan Portugis ... Indonesia didominasi oleh militer ... orang Australia membantu kita, tapi pemerintah Australia selalu memihak pada Indonesia ...”

Bapak Carrascalão memfokuskan perhatian khusus pada Portugal, Australia dan AS dalam hal ini.

Beliau juga menceritakan tentang pertemuan di London Maret 1975, antara pemerintah Portugis dan Indonesia.

“...Portugis menginginkan ... jalan cepat ... mereka tahu banyak orang Timor yang menginginkan kemerdekaan, sebagian ingin terus dengan Portugal ... mereka pikir cara yang termudah adalah melalui integrasi. Mereka seperti saya, mereka tidak tahu benar orang Timor, sehingga mereka sepakat kalau Indonesia mengambil alih Timor ...”

Rapat berlangsung di Macau pada bulan Juni 1975 dan Bapak Carrascalão menceritakan tentang keprihatinannya tentang bagaimana Timor dapat menangani situasi internasional saat itu. Beliau mengatakan bahwa dalam pendapat beliau penting sekali memahami Indonesia pada saat itu.

“Domingos de Oliveira dan saya kembali via Jakarta ... kami bertemu dengan Jendral Murtopo ...kami ke sana dan Presiden UDT sudah berada di dalam ... Presiden UDT tidak membuka mulut, hanya saya yang berbicara ... Kami pikir apabila para mahasiswa kembali ke Portugal dan prajurit komunis kembali ke Portugal, Indonesia tidak punya alasan lagi.

Tapi saat kami ke Kupang ... kami mendengar bahwa Indonesia akan masuk ...mereka memberitahukan bahwa Indonesia sudah akan memasuki Timor ...”

Tentang aksi UDT pada tanggal 11 Agustus 1975,

“Saya tidak membuat suatu kesalahan, karena saya tidak memahami orang Timor ...

“Gerakan 11 Agustus. Namanya bukan gerakan anti-komunis, tapi gerakan 11 Agustus ... Banyak orang memanggilnya kudeta ... itu bukan gerakan anti-Fretilin, bukan untuk mengambil kekuasaan ...bukan untuk memulai perang ... kami tidak mau darah mengalir, kami tidak ingin kekerasan ...aksi dengan kekerasan ini terjadi secara spontan dari basis ...

“... Tiap hari saya ke penjara-penjara UDT dan membebaskan 50-60 orang. Tiga orang meninggal ... Siapa yang bertanggung jawab? Saya bertanggung jawab ... tidak ada perintah untuk membunuh dari partai-partai. Banyak orang yang dibunuh karena balas dendam pribadi, yang sejak lama sudah menumpuk. Banyak sekali yang meninggal. Hampir 2000 dibunuh. Siapa yang patut disalahkan? Saya yang patut disalahkan ...”

Bapak Carrascalão menceritakan tentang persiapan Indonesia untuk memasuki Timor. Selain operasi intel besar yang sedang berlangsung, beliau mencatat bahwa Radio Kupang mengecap bukan saja Fretilin tapi juga UDT, dan beliau sendiri, sebagai seorang komunis . Beliau juga menceritakan tentang kapal yang tiba di Dili sekitar saat yang sama, dan dari kapal tersebut, peti-peti berisi senjata dan dibawa ke Atsabe, di mana Apodeti memegang kekuasaan.

Tentang Deklarasi Balibo, Bapak Carrascalão berbicara terbuka.

“... Hingga saat ini, saya tidak pernah menandatangani apapun yang mendukung integrasi ... tidak ada gunanya (para pemimpin politik) saying others were wrong, ‘they were wrong, saya only did the right thing’ ... the Balibo Declaration, who wrote it? The presidents of the parties wrote it ...”

Bapak Carrascalão menceritakan tentang pengalaman pahit dari kampanye bertahun-tahun untuk Timor di arena internasional.

“Saya di sini untuk menjalin rekonsiliasi ...dalam 24 tahun saya merasa malu sekali ... seluruh dunia menentang kita ... saya pernah menangis di malam hari ... saat kami ke negara-negara lain, bukan saja UDT tapi UDT dan Fretilin, kami sangat sedih ...bukannya Kalbuadi atau Murdani datang untuk bertemu dengan kami, mereka mengirim orang Timor dan mereka menuduh kami ...kami sangat sedih ... saya menangis tiap malam ...”

Beliau menceritakan bagaimana UDT dan Fretilin bekerja sama sesudah perang tahun 1975.

“Bukannya hanya kemarin atau kemarin lampau sebelum Fretilin dan UDT bekerja sama ... sesudah Atambua, Fretilin mengupayakan dialog dengan UDT ... tapi saat itu bukan waktu yang tepat untuk bekerja sama ...”

Bapak Carrascalão mengakhiri presentasinya dengan mengesankan.

“Kata-kata terakhir saya, saya minta maaf. Kita selalu terus meminta maaf, selalu. Bukan dari korban UDT saja, tapi dari semua korban. Prinsip UDT adalah untuk membantu semua...”

“Di negara-negara lain, saya telah mengatakan bahwa orang Timor itu orang berhati besar ... penting bahwa dalam hati kita, terdapat toleransi, rekonsiliasi ...”

“Saya telah membuat kesalahan. Pada saat pembantaian 12 November (1991), saya berada di rumah sakit ... saya mencintai rakyat dan tanah ini. Saya dapat tinggal di Sydney, mempunyai hidup yang enak, pekerjaan yang enak, uang cukup, banyak teman. Tapi saya ingin memberikan sumbangan manusiawi...”

“... hari ini kita bersama lagi ... Jangan menaruh rasa dendam di dalam hati ... Kita tidak perlu mencap orang Cina atau putih atau hitam. Oke, ada orang tinggi di Los Palos, pendek di Maubisse ... kita ini adalah satu ...hidup baru, kita perlu jalan baru ...”

Bapak Mari Alkatiri dan Bapak Francisco Lu'olo Guterres, Fretilin

Kesaksian terakhir diberikan oleh delegasi Fretilin yang terdiri dari Bapak Mari Alkatiri (Sekjen) dan Bapak Francisco Lu'olo Guterres (Presiden). Presiden Xanana Gusmão berada di antara hadirin, bersama dengan tokoh-tokoh politik senior. Sesudah kesaksian Bapak Joao Carrascalão, harapan sangat besar. Bapak Alkatiri mulai, dan memenuhi harapan para hadirin.

“Saya ingin mendengarkan apa yang dikatakan Bapak Joao sebelum memutuskan apa yang akan saya katakan . Beliau berbicara secara jujur. Saya mengucapkan selamat pada beliau atas keberaniannya untuk datang dan berbicara sejujur itu.”

Bapak Alkatiri mengenang pertemuan-pertemuan awalnya sebelum dibentuknya ASDT dan partai-partai lain.

“... kami mengadakan pertemuan di (Restoran) Acait sebelum lahirnya ASDT ... diskusinya hangat sekali ... kami mendiskusikan ‘apakah kita ini Portugis, atau bukan’, tidak ada lagi diskusi politik lain ...”

“...Bapak Jose Ramos Horta ikut serta dalam semua rapat politik pada saat itu. Beliau ikut serta dalam pertemuan yang memutuskan membentuk UDT. Beliau datang dan bertemu dengan saya dan Nicolau Lobato dan mengatakan tidak perlu membentuk partai politik kita sendiri, kita bisa saja menjadi anggota UDT. Saya bertanya apa ideologi UDT? Beliau mengatakan hubungan tetap dengan Portugal. Saya mengatakan, oke, kamu ke UDT, kami terus ...”

Beliau menceritakan tentang didirikannya Apodeti, dan tentang pengalaman pribadinya dalam melihat upaya Indonesia untuk mengkooptasi para pemimpin Timor.

“... Apodeti lahir ... pengaruh Indonesia mulai. Awal mulanya adalah Konsul ...di rumah saya, ibu bapak selalu sering dikunjungi oleh Konsul Indonesia. Beliau mengatakan bahwa anak mereka sebaiknya menjadi anggota Apodeti untuk membantu Timor menjadi bagian dari Indonesia.”

Tentang dibentuknya Fretilin, menurut beliau,

“Ramos Horta mengatakan bahwa masyarakat internasional tidak tahu tentang Timor ataupun mengakui keberadaannya ... dan sehingga mudah bagi mereka untuk menerima integrasi ... jadi kami mulai mempersiapkan rakyat untuk melawan, demi memperjuangkan kemerdekaan ... kami bertujuan membentuk fron bersatu ...kami meminta UDT untuk bergabung ... tapi tidak mendapat tanggapan ...dengan itu lahirlah Fretilin ...”

Bapak Alkatiri menekankan sejauh mana kegiatan militer Indonesia di Timor jauh sebelum invasi Desember di Dili.

“Banyak orang yang mengatakan bahwa invasi Indonesia mulai pada tanggal 7 Desember. Ini salah, sebenarnya mulai pada tanggal 16 Oktober. Pada saat Proklamasi Kemerdekaan tanggal 28 November, Indonesia sudah menduduki Atsabe ... saya dapat menyatakan bahwa perang antara UDT dan Fretilin mulai pada tanggal 20 Agustus ... dan sudah selesai sebelum awal September, maksimum dua minggu ... kemudian pecahlah perang dengan Indonesia ...”

Tentang konflik internal Timor, saat penting tiba saat Bapak Alkatiri mengakui bahwa Fretilin bertanggung jawab atas pembunuhan tahanan,

“... Banyak yang terbunuh dalam perang UDT-Fretilin, orang bilang maksimum 3000 orang. Saya tidak percaya jumlahnya ... tapi kita harus bertanggung jawab ... terdapat pembunuhan oleh (Fretilin) di Aileu, Same, Ermera, Betano. Kita harus bertanggung jawab ... Fretilin membunuh Fretilin sendiri, ini menunjukkan bahwa proses ini penuh kekerasan ...”

“Saya puas melihat Bapak Joao menyatakan bertanggung jawab. Ini sangat penting.”

Kemudian, menjawab pertanyaan dari para Komisaris, Bapak Alkatiri mengatakan,

“Saya telah bertemu dengan banyak janda dan anak yatim piatu dalam perjalanan-perjalanan saya di seluruh Timor. Mereka dulu Fretilin, dan mereka terus masih Fretilin. Suami mereka Fretilin. Fretilin membunuh mereka, sebagai pengkhianat. Dan mereka ingin tahu, apakah kita masih menganggap mereka pengkhianat? ... Fretilin harus menerima hal ini. Kita harus memulihkan nama baik orang secara resmi.”

Bapak Alkatiri kemudian memperkenalkan Bapak Francisco Lu’olo Guterres, Presiden Fretilin, untuk membahas tentang apa yang terjadi selama 24 tahun penjajahan.

Bapak Guterres menghabiskan bertahun-tahun selama penjajahan sebagai anggota Falintil di gunung, sebagai komisar politik senior. Beliau memberikan riwayat rinci tentang pekerjaannya mengorganisir perlawanan terhadap penjajahan Indonesia, tentang krisis dan upaya untuk bersatu kembali dan mengorganisir ulang demi melanjutkan perlawanan. Beliau menceritakan tentang krisis tahun 1979, sesudah meninggalnya Nicolau Lobato, Mau Lere dan Sahe, saat nampaknya perlawanan telah dihancurkan. Beliau menceritakan kebahagiaannya saat Xanana tiba di lokasi kampnya, dan tentang munculnya kepemimpinan dalam hari-hari paling kelabu itu. Beliau menceritakan tentang makin pentingnya persatuan nasional, mulai dari tahun 1983, dengan restrukturisasi dari CRRN, CNRM, dan akhirnya CNRT. Beliau mencatat bagaimana Falintil menjadi non-partisan dengan dibentuknya CNRM pada tahun 1987, dan tentang Xanana meninggalkan Fretilin untuk memimpin baik Falintil maupun CNRM, tentang bagaimana hal ini pada dasarnya “membukakan hati orang Timor.”

Yang terpenting, adalah bahwa menjelang akhir kesaksiannya, Bapak Guterres menggemakan apa yang diucapkan oleh Bapak Alkatiri saat menerima tanggung jawab atas kekerasan yang dilakukan Fretilin.

“UDT membunuh Fretilin. Fretilin membunuh UDT. Fretilin membunuh Fretilin. Sebagai Presiden Fretilin, saya meminta maaf dan mohon diampuni.”

Bapak Guterres menutup dengan pendapat dengan kata-katanya,

“Kata-kata terakhir saya ... perang itu jelek. Perang membunuh banyak sekali orang, memisahkan kita semua secara sewenang-wenang ... pelajari ini, supaya tidak terulang lagi ...”

Pada saat itu juga, Bapak Joao Carrascalão berdiri secara spontan, berjalan menghampiri podium dan merangkul pertama Bapak Alkatiri dan kemudian Bapak Guterres dan Bapak Alkatiri. Presiden Xanana Gusmão berdiri, bergabung dengan mereka, yang bersimbah air mata. Perlahan sepeertinya, orang lain telah berdiri juga dan rangkulan itu mengikutsertakan semua pemimpin politik dan sekalangan hadirin.

Menutup dengan pendapat

Sebelum Presiden mengharukan pidato penutupnya, suatu upacara yang mengharukan dan spontan berlangsung. Bapak Lino, seorang kakek tua yang selama ini telah menonton Dengar Pendapat di rumahnya di Dili, datang ke CAVR dengan dokumen tentang pelanggaran hak asasi manusia. Lemah, dan dibopong oleh anak perempuannya, Bapak Lino berdiri di depan para hadirin dengan Fr Jovito Araujo, wakil ketua CAVR dan Presiden Xanana Gusmão memegang mikrofon baginya. Menyampaikan dokumen-dokumen itu pada Fr Jovito, dengan suara lirih dan gemetar, beliau mengatakan “Saya orang klandestin selama 24 tahun, itu saja.”

Presiden RDRTL naik di podium untuk menutup dengan pendapat selama empat hari itu, di mana para hadirin sangat terharu. Nampaknya beliau tidak lagi menggunakan pidato tertulisnya, dan bicara langsung dari hati nurani dalam suatu pidato yang penuh perasaan dan mengharukan, kadang dengan air mata.

“Kadang orang tidak percaya bahwa CAVR dapat mendapatkan hasil yang baik dari proses ini. Tapi saya terus menerus berhubungan dengan para Komisaris dan staf, dan saya dapat melihat mereka berniat kuat untuk memulai proses penting ini di Timor.”

“Proses oleh CAVR ini ... adalah proses yang unik di dunia. Saya ucapkan terima kasih pada semuanya, korban, seluruh penduduk, para pemimpin politik ... atas keberanian kalian ... Keberanian saat kita memimpikan kemerdekaan, keberanian menerima segala penderitaan supaya kita bisa hidup bebas ... kita perlu keberanian ini untuk melihat pada masa lampau ... agar partai dapat menyatakan bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan mereka ...

“ ... (pada zaman Portugis) kita mencoba untuk belajar, berpikir ... kita hidup di bawah fasisme, dalam suatu masyarakat tertutup ... hari ini juga susah memerdekakan diri sendiri ... misi bersama kita dalam Dengar Pendapat ini dengan CAVR ... adalah untuk melakukan refleksi diri, menganalisa dan memegang terus apa yang telah kita capai, kemerdekaan ...

“Sebagai negara yang masih mencoba memulihkan diri, yaitu memperkuat negara ... partai-partai politik datang tidak untuk membenarkan tindakannya, tapi untuk menjelaskan ... partisipasi para korban ...sangat sulit sekali untuk datang ke sini dan berbicara di sini ...kita semua harus memegang erat persatuan nasional. Kita melakukan hal ini dengan mengadakan dengar pendapat semacam ini.

“Para pemimpin tidak saling menuduh ... penting bahwa para pemimpin mengakui bertanggung jawab, bahwa partai mereka bertanggung jawab ... (sambil menangis) kita bisa menangis, bukan karena sedih tapi karena gembira ... gembira karena rakyat ingin bersatu ... gembira karena kita ingin meninggalkan penderitaan kita ...

“... saya mengucapkan selamat pada CAVR. CAVR telah menunjukkan bahwa orang Timor mengetahui apa misi dan tanggung jawab kita... saya mengucapkan selamat karena CAVR dapat membawa kita semua berkumpul di sini ... kita di sini untuk melonggarkan penderitaan para korban, terutama para korban ... kita seharusnya gembira karena semua ini baik artinya bagi masa depan kita, bagi toleransi...”

Saat beliau selesai berbicara, Presiden meminta agar semuanya bertepuk tangan untuk CAVR. Di antara hadirin yang berdiri bertepuk tangan, Presiden terus berbicara sambil menangis, mengatakan bahwa sebagai seorang anggota Komite Sentral Fretilin dahulu, beliau juga harus bertanggung jawab atas kesalahan-kesalahan.

Saat sebagian hadirin telah duduk kembali, dan banyak di antaranya masih berdiri, Fr Jovito Araujo meminta hadirin berdiam sebentar untuk merefleksikan sejenak. Begitu hadirin tenang kembali, Fr Jovito berbicara dengan suara pelan. Beliau mengucapkan terimakasih pada semuanya atas semangat dan keinginan masing-masing untuk menyukseskan Dengar Pendapat. Beliau mengingatkan tentang penderitaan para korban, dan penderitaan semua orang Timor berasal dari perpecahan di antara masyarakat pada saat itu. Beliau mencatat betapa pentingnya duduk bersama pada masa damai untuk saling mendengarkan, mencoba saling memahami, dan betapa pentingnya tindakan para pemimpin politik dalam menyatakan tanggung jawabnya atas apa yang dilakukan oleh mereka dan partai mereka. Melalui proses yang bertujuan untuk menenangkan para hadirin dan peserta Dengar Pendapat ini, dapat dilihat betapa pentingnya apa yang telah berhasil dicapai dalam empat hari sebelumnya.

Sebuah doa penutup dipimpin oleh Pastor Maria de Fatima Gomes, anggota Dewan Penasihat CAVR. Rangkaian antara para peserta terus berlanjut dan air mata masih terus mengalir lama sesudah itu, termasuk juga sesuatu yang mengharukan di mana Presiden RDTL, Bapak Xanana Gusmão, memeluk para janda dari masa itu yang telah datang ke CAVR untuk ikut serta sesudah mendengarkan siaran radio Dengar Pendapat. Di seluruh ruang auditorium, penonton menangis dan saling berpelukan. Ada yang tersenyum dan mereka yang dulu bermusuhan sekarang bergandengan tangan. Sesuatu yang sangat menakutkan yang mengakhiri empat hari bersejarah tersebut.

Sementara proses penggalian kebenaran dari periode itu masih terus berlangsung, dan tugas rekonsiliasi masih harus dilanjutkan sesudah mandat CAVR habis, tidak diragukan lagi bahwa sukses Dengar Pendapat ini melebihi harapan semua orang. Para pemimpin politik Timor dan rakyat telah mengambil langkah yang berani dan luar biasa dalam proses menjalin perdamaian secara jangka panjang. Sebagaimana dikatakan oleh jurnalis Portugis Adelino Gomes, yang memiliki pengalaman meliput kasus Timor-Leste selama 28 tahun, Dengar Pendapat ini adalah sebuah “pelajaran dalam kemanusiaan.”